

# **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AGROPOLITAN BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN DALAM MEMBANGUN EKONOMI DAERAH**

(Studi Pada Kawasan Agropolitan Bawang Merah Kecamatan Sukomoro  
Kabupaten Nganjuk)

## **SKRIPSI**

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana

Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

**DINA ZUHRUFIA**  
**NIM. 125030500111017**



Dosen Pembimbing :

1. Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS.
2. Dr. Bambang Santoso Haryono, MS.

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**  
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**  
**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK**  
**MINAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**  
**MALANG**  
**2016**

**MOTTO**

**LIFE-LIFE TODAY AND DREAM TOMORROW**

**(McFadden, 2004)**

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

**I dedicate this book for everyone I love,  
Parent, siblings and friends**

## TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi

Universitas Brawijaya, pada :

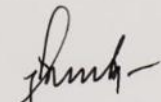
Hari : Jumat  
Tanggal : 20 Mei 2016  
Jam : 09.00-10.00  
Skripsi atas nama : Dina Zuhurfia  
Judul : Implementasi Kebijakan Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan  
dalam Membangun Ekonomi Daerah (Studi pada Kawasan  
Agropolitan Bawang Merah Kecamatan Sukomoro)

Malang, 23 Mei 2016


**Dan Dinyatakan LULUS**

## MAJELIS PENGUJI

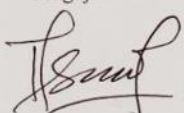
Ketua

  
**Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS.**  
NIP. 19610905 198601 1 001

Anggota

  
**Dr. Bambang Santoso Haryono, MS.**  
NIP. 19610201 198601 1 001

Penguji

  
**Trisnawati, S.Sos., MAP**  
NIP. 19800307 200801 2 012

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, 23 April 2016



Nama : Dina Zuhurfia  
NIM : 125030500111017

## RINGKASAN

Dina Zuhurfia, 2016, **Implementasi Kebijakan Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan dalam Membangun Ekonomi Daerah** (Studi Pada Kawasan Agropolitan Bawang Merah Kecamatan Sukomoro) dosen Pembimbing: Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS. dan Dr. Bambang Santoso Haryono, MS. halaman 206+xiv

---

Pembangunan sektor pertanian berperan strategis dalam membangun ekonomi daerah melalui gerakan pengembangan kawasan agropolitan. Pengembangan kawasan agropolitan memunculkan dua permasalahan yaitu bagaimana implementasi kebijakan agropolitan dalam mengembangkan kawasan berbasis komoditas unggulan dan bagaimana dampak pengembangan kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan terhadap pembangunan ekonomi daerah. Kajian terhadap permasalahan tersebut dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa implementasi kebijakan agropolitan berbasis komoditas unggulan dalam membangun ekonomi daerah sehingga dapat mendiskripsikan fenomena yang terjadi secara konkrit, benar, komplit.

Penelitian dilakukan di kawasan agropolitan bawang merah Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Terdapat tiga fokus penelitian sebagai batasan masalah pokok yang menjadi bahasan yaitu: 1) implementasi kebijakan agropolitan dalam pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan yang mencakup empat variabel yaitu: kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, badan-badan pelaksana, serta unsur-unsur lingkungan yang mempengaruhi. 2) Pembangunan ekonomi daerah sebagai dampak pengembangan kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan melalui aspek pusat pertumbuhan (*growth pole*) 3) Faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan agropolitan berbasis komoditas unggulan dalam membangun ekonomi daerah terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat.

Hasil dari penelitian berdasarkan fokus yang telah ditentukan bahwa implementasi kebijakan agropolitan berbasis komoditas unggulan berdasarkan variabel implementasi Kebijakan Thomas B. Smith telah dilaksanakan dengan baik. Namun belum berkembangnya kemampuan petani dalam pengolahan produk bawang merah pasca panen (*off farm*) serta belum optimalnya pengembangan pasar Sentra Pengembangan Agropolitan (SPA) masih menjadi perhatian khusus pokja pengembangan kawasan agropolitan. Selanjutnya dampak pengembangan kawasan agropolitan terhadap pembangunan ekonomi daerah dilihat dari pusat pertumbuhan (*growth pole*) telah mampu menjadi kawasan pembangunan ekonomi berdasarkan susunan pola dan struktur ruang kawasan agropolitan yang

funksinya diklasifikasikan atas sistem hirarki pusat. Tujuan dari pembangunan ekonomi ini adalah agar terwujudnya kawasan pertanian modern sebagai penggerak perekonomian perdesaan yang mampu mensejahterakan masyarakat.

Faktor yang berpengaruh dalam pengembangan kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan dalam membangun ekonomi daerah terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Hal-hal yang mendukung adalah komitmen pemerintah yang tinggi serta dukungan dan partisipasi yang besar dari masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah rendahnya permodalan petani untuk pengembangan pengolahan bawang merah pasca panen (*off farm*) dan terbatasnya sarana pengolahan bawang merah pasca panen (*off farm*). Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan, peneliti merekomendasikan pembentukan kelembagaan masyarakat untuk pengembangan pengolahan bawang merah pasca panen (*off farm*). Selain itu diperlukan pengoptimalan fungsi Sentra Pengembangan Agropolitan (SPA) menjadi pusat kawasan agropolitan.

**Kata Kunci: Agropolitan, Bawang Merah, Pembangunan, Ekonomi.**

## SUMMARY

Dina Zuhurfia, 2016, **Agropolitan Policy Implementation Based on Competitive Commodity in Develop Regional Economic.** (a study at Agropolitan Onion Area Sukomoro) Supervisor: Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS. and Dr. Bambang Santoso Haryono, MS. page 206+xiv

---

Agriculture sector development has a strategic role in develop regional economic by developing agropolitan area. In developing agropolitan area appear two problems, first how agropolitan policy implementation based on competitive commodity, secondly how the impact of agropolitan policy implementation based on competitive commodity in develop regional economic. Study toward problems with qualitative approach. The purpose of researching based on that problems is to determine and analyze agropolitan policy implementation based on competitive commodity in develop regional economic so the phenomenon can be describe concretely, rightly and completely.

The research was conducted at agropolitan onion area Sukomoro Nganjuk District. There are three focuses as problem limitation that be study, that are: 1) agropolitan policy implementation based on competitive commodity that include four variables that are: idealized policy, target group, implementing organization and environmental factors. 2) Regional economic development as an impact agropolitan policy implementation based on competitive commodity measured from growth pole aspect, export basic, and value added. 3) Agropolitan policy based on competitive commodity's influence factors consist of supporting factors and inhibiting factors.

The result of the research by its focus that was chose that agropolitan policy implementation based on competitive commodity have done rightly. But peasants capability in off farm onion processing is not effloresce yet and developing central agropolitan development (SPA) is not maximal yet to be big interest of pokja. Then, the impact of agropolitan policy implementation toward regional economic development is seen by growth pole have afford be economic development area based on pattern and space structure agropolitan area wich its function is classificated to hierarchy center system. Economic development based on onion productivity export Nganjuk have meet a national demand up to decrease onion import. Furthermore, economic development by value added by develop agroindutry products and cooperation. The goal of economic development is to make modern agriculture area as activator rural economic that can make society prosperous.



Agropolitan policy based on competitive commodity's influence factors consist of supporting factors and inhibiting factors. The supports are big government's big commitment and society's support and participation. While inhibitions are the less peasants's capital and the limit off farm onion processing tools. Based on the research result, researcher recommended to compose society institute for developing onion off farm. Beside that, need central agropolitan development's function optimisation to be agropolitan area center.

**Key words: Agropolitan, Onion, Development, Economic.**

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Atas segala rahmatnya sehingga karya tulis dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN AGROPOLITAN BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN DALAM MEMBANGUN EKONOMI DAERAH (Studi Pada Kawasan Agropolitan Bawang merah Kecamatan Sukomoro)”** dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Orang tua tercinta, Bapak Sulistyo Wibowo dan Ibu Rubingah yang selalu memberikan doa dalam setiap kegiatan positif.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, Ms. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dan selaku ketua komisi pembimbing.
3. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik.
4. Bapak Dr. Drs. Luqman Hakim, M.Sc. selaku ketua minat Administrasi Pemerintahan.
5. Bapak Dr. Bambang Santoso Haryono, MS. Selaku anggota komisi pembimbing.

6. Seluruh staf dan Karyawan Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Nganjuk.
7. Seluruh staf dan Karyawan Bidang Holtikultura Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk.
8. Seluruh staf dan Karyawan UPT Pertanian Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk.
9. Seluruh Anggota Kelompok Tani Putra Maju Kecamatan Sukomoro.
10. Teman-teman yang telah banyak memberikan dukungan dan semangat.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah memberikan banyak bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Untuk kesempurnaan penyusunan selanjutnya penulis berharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang membaca dan memerlukannya. Semoga apa yang terkandung dalam karya tulis ini berguna bagi penulis dan pembaca Amin.

Malang, Mei 2016

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SUMMARY.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Kontribusi Penelitian.....	13
E. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Administrasi Publik.....	16
B. Kebijakan Publik.....	17
C. Implementasi Kebijakan.....	19
1. Konsep Implementasi.....	19
2. Konsep Implementasi Kebijakan.....	20
3. Model Implementasi kebijakan.....	21
4. Faktor pendukung dan penghambat Implementasi.....	30
D. Agropolitan.....	33
1. Konsep Agropolitan.....	33
2. Struktur Kawasan Agropolitan.....	35
3. Ciri-ciri Agropolitan.....	38
4. Tujuan dan Strategi Pengembangan Agropolitan.....	40
E. Komoditas Unggulan.....	44
1. Konsep Komoditas Unggulan.....	44
2. Konsep komoditas Bawang Merah.....	46
F. Pembangunan Ekonomi Daerah.....	50
1. Konsep Pembangunan Ekonomi.....	50
2. Teori Pembangunan Ekonomi.....	53

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>57</b>
A. Jenis Penelitian.....	58
B. Fokus Penelitian.....	58
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	59
D. Jenis dan Sumber Data.....	60
E. Teknik Pengumpulan data.....	62
F. Instrumen penelitian.....	64
G. Analisis data.....	65
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>68</b>
A. Gambaran Umum Lokasi dan kawasan Agropolitan.....	68
1. Gambaran umum Kabupaten Nganjuk.....	68
2. Gambaran Umum Kawasan Agropolitan Kecamatan Sukomoro.....	77
3. Profil Komoditas Unggulan.....	79
4. Profil Kebijakan Agropolitan.....	80
B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian.....	90
1. Implementasi Kebijakan Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan di kawasan Agropolitan Bawang Merah Sukomoro.....	90
2. Pembangunan ekonomi sebagai dampak implementasi kebijakan agropolitan berbasis komoditas unggulan di Kecamatan Sukomoro.....	136
3. Faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan agropolitan berbasis komoditas unggulan di kawasan agropolitan kecamatan Sukomoro.....	151
C. Analisis data.....	157
1. Implementasi Kebijakan Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan di kawasan Agropolitan Bawang Merah Sukomoro.....	157
2. Pembangunan ekonomi sebagai dampak implementasi kebijakan agropolitan berbasis komoditas unggulan di Kecamatan Sukomoro.....	175
3. Faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan agropolitan berbasis komoditas unggulan di kawasan agropolitan kecamatan Sukomoro.....	184
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>189</b>
A. Kesimpulan.....	189
B. Saran.....	192
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>194</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1	Kawasan Agropolitan Jawa Timur	6
Tabel 2	Tripologi Kawasan Agropolitan	37
Tabel 3	Nama Desa dan kelurahan di kecamatan Sukomoro	78
Tabel 4	penilaian basis komoditas unggulan Bawang merah Kecamatan Sukomoro	80
Tabel 5	Komoditas pertanian Unggulan (Utama dan pendamping) pengembangan agropolitan Kabupaten Nganjuk	86
Tabel 6	Pelatihan dan pembinaan petani pelaku agribisnis Holtikultura	96
Tabel 7	PPL Kawasan Agropolitan Sukomoro Tahun Anggaran 2013-2017	98
Tabel 8	Alokasi dana pengadaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Sukomoro	101
Tabel 9	Gapoktan kawasan agropolitan Sukomoro	108
Tabel 10	Alokasi dana penguatan kelembagaan poktan dan gapoktan	112
Tabel 11	Alokasi dana pengadaan jaringan irigasi	113
Tabel 12	Data standar kebutuhan air bersih Kecamatan Sukomoro	114
Tabel 13	Program umum Kebijakan Agropolitan berbasis komoditas Unggulan	125
Tabel 14	Susunan keanggotaan kelompok kerja (pokja) program	

	pengembangan kawasan Agropolitan Kabupaten Nganjuk	131
Tabel 15	Pola ruang kecamatan Sukomoro	139
Tabel 16	Kontribusi Kabupaten Nganjuk terhadap Produksi Bawang Merah Nasional Tahun 2010-2013	143
Tabel 17	Kontribusi Sukomoro terhadap produksi Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2013	144
Tabel 18	Perkembangan Harga Bawang Merah di Tingkat Konsumen Bawang Merah Tahun 2013-2015	146
Tabel 19	Potensi Nilai Tambah <i>Off Farm</i> dan Potensi Kemitraan Pengembangan Produk Unggulan Bawang merah	150
Tabel 20	Program umum Kebijakan Agropolitan berbasis komoditas Unggulan	162
Tabel 21	Pelaksana Program umum Kebijakan Agropolitan	171

## DAFTAR GAMBAR

<b>Nomor</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Gambar 1	Kawasan Agropolitan di Indonesia	5
Gambar 2	Tahapan Kebijakan Publik Ripley	18
Gambar 3	Model implementasi kebijakan Smith	27
Gambar 4	Kompenen dalam analisis data ( <i>interactive model</i> )	66
Gambar 5	Pendopo Nganjuk tahun 1860	70
Gambar 6	Logo Kabupaten Nganjuk	73
Gambar 7	Peta Administratif Kecamatan Sukomoro	78
Gambar 8	Lahan bawang merah Desa Kapas Kecamatan Sukomoro	79
Gambar 9	Mekanisme Penyelenggaraan Agropolitan	83
Gambar 10	Kawasan Agropolitan Kabupaten Nganjuk	85
Gambar 11	Replika Bawang merah LCR Kabupaten Nganjuk tahun 2015	117
Gambar 12	Denah Pasar bawang merah Sukomoro	120
Gambar 13	Lingkup Pengembangan AgroIndustri Kabupaten Nganjuk	121
Gambar 14	Bagan Konsep pengembangan Agribisnis Hulu hingga Hilir Produk Utama Bawang Merah pada Kawasan Agropolitan	147



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Nomor</b>	<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
Lampiran 1	Surat rekomendasi Penelitian	199
Lampiran 2	Pedoman wawancara	200
Lampiran 3	Data Kelompok Tani	203
Lampiran 4	Foto Observasi	206

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional di Indonesia bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Menurut Siagian (1985:29) pembangunan diartikan sebagai suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perbuatan yang berencana dan dilakukan suatu bangsa, negara dan pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Indonesia sebagai negara berkembang selalu mengupayakan pencapaian pembangunan nasional untuk mewujudkan cita-citanya yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan nasional merupakan masalah yang penting jika dilihat dari kacamata Administrasi Publik. Administrasi Publik adalah sudut pandang pemerintah untuk menangani masalah-masalah yang terjadi di masyarakat serta melaksanakan kebijakan-kebijakan untuk melaksanakan pembangunan. Menurut Pasolong (2007:1) bahwa Administrasi Publik adalah sebuah konsep yang menangani hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responsibilitas kebijakan terhadap berbagai kebutuhan politik, dan juga melembagakan praktek-praktek manajerial agar terbiasa melaksanakan suatu kegiatan dengan efektif, efisien dan rasional. Pemerintah sebagai pelaksana administrasi publik mempunyai kewajiban menyelenggarakan pelayanan sesuai kepentingan masyarakat serta bertanggung jawab atas penyelesaian masalah-

masalah yang terjadi di masyarakat. Untuk itu analisis administrasi publik dibutuhkan untuk menyelenggarakan pembangunan nasional yang bertujuan mensejahterakan masyarakat.

Suatu negara dikatakan sejahtera apabila suatu negara dapat menyelesaikan masalah kemiskinan. Untuk memberantas kemiskinan maka harus memenuhi semua aspek. Salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah ekonomi. Menurut Irkham dalam Kompasiana.com (2015) menyatakan bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kemiskinan dapat diselesaikan dan kesejahteraan masyarakat tercapai. Istilah kesejahteraan masyarakat dalam terminologi akademik adalah kesejahteraan sosial. Menurut Segel dan Bruzzy dalam Suud (2006:5) bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi sejahtera dari suatu masyarakat yang meliputi keadaan ekonomi, kesehatan, kebahagiaan dan kualitas hidup rakyat. Agar pertumbuhan ekonomi tercapai maka pemerintah perlu melakukan upaya-upaya dalam pembangunan ekonomi. Menurut Rostow yang dikutip dalam elearning.gunadarma.ac.id (2016) bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan perubahan karaktersitik penting suatu masyarakat, misalnya perubahan keadaan sistem politik, struktur sosial, sistem nilai dalam masyarakat dan struktur ekonomi serta jika perubahan-perubahan tersebut terjadi maka proses pertumbuhan ekonomi dikatakan sudah terjadi.

Upaya pembangunan ekonomi dilakukan di sektor-sektor yang memiliki potensi dan nilai ekonomi. Bentuk upaya-upaya tersebut dituangkan dalam perumusan kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut diarahkan dalam pengembangan sektor-sektor yang mengakomodir potensi-potensi lokal seperti

sektor pertanian, sektor pariwisata, sektor perikanan, sektor perindustrian dan lain-lain.

Sektor pertanian di Indonesia menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Peranan penting sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi menurut Rostow yang dikutip dalam [elearning.gunadarma.ac.id](http://elearning.gunadarma.ac.id) (2016) adalah sebagai berikut :

“Sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam masa peralihan sebelum tinggal landas dalam pembangunan ekonomi. Peranan sektor pertanian tersebut antara lain :

1. Kemajuan pertanian menjamin penyediaan bahan makanan bagi penduduk di pedesaan maupun di perkotaan sehingga menjamin penduduk agar tidak kelaparan dan menghemat devisa karena impor bahan makanan bisa dihindari;
2. Kenaikan produktivitas di sektor pertanian akan memperluas pasar dari berbagai kegiatan industri. Kenaikan pendapatan pertanian memperluas pasar industri-industri penghasil input pertanian modern seperti mesin-mesin pertanian dan pupuk kimia, kenaikan pendapatan di sektor pertanian akan menaikkan penerimaan pemerintah melalui pajak sektor pertanian dan kemajuan sektor pertanian akan mencitakan tabungan yang bisa digunakan sektor lain (terutama industri) sehingga bisa meningkatkan investasi di sektor-sektor lain tersebut.

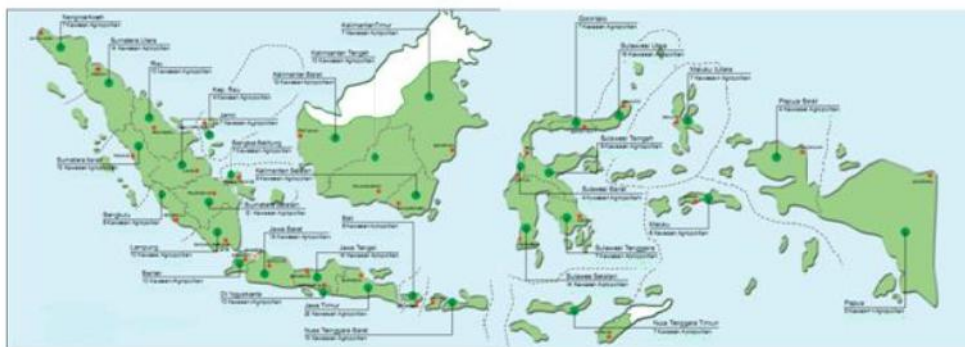
Selain itu dalam Rencana Strategi Kementrian Pertanian Tahun 2015-2019(2014:2) menjelaskan bahwa peran strategis sektor pertanian tersebut digambarkan dalam kontribusi sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang Produk Domestic Bruto (PDB), penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Data BPS (2014) menyatakan bahwa periode lima tahun terakhir, kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian nasional semakin nyata. Selama periode 2010-2014, rata-rata kontribusi sektor pertanian

terhadap PDB mencapai 10,26 % dengan pertumbuhan sekitar 3,90 % sehingga mampu menyerap angkatan kerja sekitar 35,76% juta dari total tenaga kerja pada tahun 2014. Berdasarkan kontribusi sektor pertanian terhadap pembangunan ekonomi nasional maka pertanian merupakan basis perekonomian Indonesia.

Renstra Kementrian Pertanian Tahun 2015-2019 (2014:4) menyatakan bahwa dengan memposisikan sektor pertanian dalam pembangunan nasional merupakan kunci utama keberhasilan dalam mewujudkan Indonesia yang bermartabat, mandiri, maju, adil dan makmur. Demikian pemerintah menyusun kebijakan-kebijakan untuk mendukung pembangunan sektor pertanian. Salah satu upaya adalah melalui gerakan pengembangan kawasan agropolitan. Friedman dan Douglass dalam Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya (2012:22) menyarankan suatu bentuk pendekatan agropolitan sebagai aktivitas pembangunan yang terkonsentrasi di wilayah perdesaan dengan jumlah penduduk antara 50 ribu sampai 150 ribu jiwa. Muhammad (2008:296) menyatakan bahwa agropolitan sebagai upaya pembangunan pertanian secara holistik dengan membangun semua infrastruktur pertanian yang ada di perkotaan ke pedesaan seperti fasilitas komunikasi, transportasi, kesehatan, pendidikan, fasilitas pendukung perekonomian atau keuangan dan lainnya.

Kawasan agropolitan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada pasal 1 ayat 24 didefinisikan sebagai kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem

permukiman dan sistem agribisnis. Pengembangan kawasan agropolitan juga didukung oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Cepat Tumbuh di Daerah. Dalam pasal 17 ayat 2 dijelaskan bahwa pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh khusus bidang ekonomi di daerah salah satunya adalah kawasan agropolitan.



Gambar 1. Kawasan Agropolitan di Indonesia

*Sumber : Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya (2012:1)*

Pengembangan kawasan merupakan bagian dari potensi kewilayahan dengan mengembangkan daerah melalui optimalisasi sumber daya tumbuhan dan hewan yaitu pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. Pengembangan kawasan agropolitan di Indonesia tersebar di seluruh daerah karena hampir seluruh daerah mempunyai potensi komoditas unggulan. Menurut Muhamad (2008:296) bahwa dalam membangun pertanian memerlukan satu atau beberapa komoditas unggulan agar semua upaya bisa terfokus. Selain itu dalam *masterplan* Kawasan Agropolitan Kabupaten Nganjuk (2013:29) menyebutkan bahwa salah satu syarat kawasan agropolitan adalah memiliki sumber daya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk mengembangkan komoditi pertanian yang dapat dipasarkan atau telah mempunyai pasar yang disebut komoditi unggulan.

Pengembangan kawasan agropolitan di Indonesia sudah berlangsung sejak tahun 2002. Hingga sekarang sudah terbangun 382 kawasan agropolitan di 32 Provinsi (Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2012). Pengembangan kawasan agropolitan tersebut berbasis produk unggulan seperti beras organik, kelapa, sayur-mayur, buah-buahan dan hewan ternak.

Jawa Timur adalah salah satu daerah yang mengembangkan kawasan agropolitan sejak tahun 2003. Hingga saat ini sudah terbentuk 26 kawasan agropopolitan dan 2 kawasan persiapan pengembangan agropolitan. Lokasi kawasan Agropolitan yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kawasan Agropolitan Jawa Timur

No.	Kabupaten/Kota	Komoditas
1.	Kota Batu, Malang, pasuruan	Apel, Sayuran
2.	Banyuwangi, Mojokerto, Ngawi, Situbondo	Padi, sapi perah, tanaman holtikultura
5.	Lumajang (KASeroja)	Pisang Agung Semeru, Pisang Mas Kirana, Ternak sapi, Sapi perah, Ayam Kampung).
6.	Tulungagung, Trenggalek, Probolinggo	
7.	Bangkalan (KASoburbang)	Salak
8.	Pamekasan, madiun, ponorogo	Kayu, Kopi, Kelapa, Kakao, Pisang, Durian, Salak, Manggis
9.	Blitar	Belimbing
10.	Pacitan	Janggolan
11.	Nganjuk, Sumenep	Bawang merah
12.	Lamongan, Bojonegoro	Tembakau
13.	Tuban	Duku
14.	Bondowoso	Kopi, tanaman bunga
15.	Jombang, Magetan	holtikultura
16.	Sampang	Semangka, cabe

Sumber : Sistem Informasi Agropolitan Jawa Timur (2015)

Penataan ruang pengembangan kawasan agropolitan di Jawa Timur diarahkan untuk memberdayakan masyarakat perdesaan melalui beberapa upaya,

antara lain adalah pengembangan lembaga perekonomian perdesaan untuk meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi dalam kawasan perdesaan, termasuk kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, dan kegiatan perkebunan (Sistem Informasi Agropolitan Jawa Timur, 2015). Maka diperlukan visi dan misi yang dimuat di Sistem Informasi Agropolitan pengembangan kawasan agropolitan Jawa Timur, visi tersebut adalah mewujudkan kawasan pertanian modern sebagai penggerak perekonomian perdesaan yang mampu mensejahterakan masyarakat. Sedangkan Misi yang ada dalam mewujudkan kawasan Agropolitan Jawa Timur adalah sebagai berikut :

1. Menumbuh kembangkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian;
2. Membuka lapangan pekerjaan baru khusus bagi masyarakat perdesaan sehingga dapat mengurangi urbanisasi;
3. Meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan;
4. Mewujudkan tata ruang ideal antara perkotaan dan perdesaan yang saling mendukung, melengkapi dan memperkuat.

Selain itu dalam Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan Jawa Timur (2014) menjelaskan sasaran pengembangan, yaitu :

1. Pemberdayaan masyarakat melalui agribisnis;
2. Pengembangan komoditas unggulan pertanian;
3. Pengembangan kelembagaan petani dan penyelia jasa pertanian;
4. Pengembangan iklim yang kondusif bagi usahatani dan investasi;
5. Pengembangan sarana dan prasarana penunjang.

Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan-Minapolitan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 pada tanggal 07 April 2015 membahas kegiatan dukungan pengembangan kawasan di masing-masing kawasan yang ada di kabupaten/kota untuk mengatasi kendala-kendala Pengembangan Kawasan Agropolitan. Dalam pelaksanaan pengembangan



kawasan Agropolitan di Jawa Timur selama tahun 2003 hingga sekarang menunjukkan beberapa kendala dan permasalahan antara lain:

1. Pemahaman para stakeholder terhadap hakekat konsepsi pengembangan kawasan agropolitan belum tersosialisasikan sampai tataran yang paling rendah, oleh karena perangkat organisasi dan tata-laksana operasionalnya belum memiliki landasan legal operasional (Norma, Standar, Pedoman dan Manual) yang memadai.
2. Koordinasi lintas institusi di tingkat lokal, regional maupun nasional masih belum optimal.
3. Pengendalian kegiatan belum tertata dengan baik, oleh karena belum dimilikinya pedoman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan PKA. Terbukti pada beberapa daerah yang sudah habis masa stimulasinya oleh Pemerintah Pusat / Provinsi, tetapi belum dilakukan evaluasi.

Pengembangan kawasan agropolitan disetiap daerah di Jawa Timur tentu mengalami dukungan dan kendala yang berbeda sehingga pencapaian program tersebut berbeda. Kota Batu merupakan kota yang mengembangkan kawasan Agropolitan secara mandiri dengan menetapkan kecamatan Bumiaji sebagai kawasan pengembangan agropolitan. Potensi sektor unggulan pertanian di wilayah kota Batu sebagai komoditas pengembangan agropolitan meliputi tanaman hortikultura dengan komoditas unggulan. Sejak tahun 2003 hingga sekarang, sebagai kawasan agropolitan telah berhasil memunculkan rumah-rumah industri yang mengolah bahan pangan yang berasal dari apel sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar ( Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2011:23).

Selain kota Batu daerah di Jawa Timur yang mengembangkan kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan adalah Kabupaten Nganjuk. Visi Kabupaten Nganjuk seperti tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2014-2018 adalah :

“Terwujudnya kejayaan Nganjuk berlandaskan iman dan taqwa, dengan prioritas sektor utama pembangunan yang bertumpu pada pengembangan perdagangan dan industri berbasis potensi pertanian untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat”.

Sedangkan Misi Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Terus mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan pelayanan prima dengan nuansa kehidupan yang religious;
2. Meningkatkan pelayanan bidang kesehatan dan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di masa depan;
3. Memacu pertumbuhan ekonomi melalui pembinaan ekonomi kerakyatan bertumpu pada perdagangan dan industri yang berbasis potensi pertanian;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap mengedepankan aspek pelestarian lingkungan hidup;
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil pembangunan;
6. Mengembangkan pola kehidupan dan hubungan masyarakat yang adil, bermartabat, tertib dan aman.

Pengembangan Kawasan Agropolitan menjadi salah satu upaya untuk mencapai tujuan salah satu misi yaitu untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan sektor pertanian, industri dan perdagangan yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dengan tetap menjaga lingkungan. Penetapan Kabupaten Nganjuk sebagai kawasan agropolitan didasarkan atas Surat Keterangan Gubernur Nomor 520/127/201.2/2009 bahwa Kabupaten Nganjuk

ditetapkan sebagai kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan. Menurut pedoman umum Pengembangan Kawasan Agropolitan Jawa Timur (2014) bawang merah merupakan salah satu alternatif tanaman hortikultura utama yang dapat menjadi komoditas unggulan Kabupaten Nganjuk. Hal ini diperkuat dengan Surat keputusan Bupati Nganjuk No.188/84/K/411.101.03/2007 mengenai komoditas unggulan Kabupaten Nganjuk yakni bawang merah (13,8%) selain tanaman pangan seperti beras (60,9%) dan jagung (25,2%).

Nganjuk sebagai penghasil bawang merah terbanyak kedua skala nasional setelah Kabupaten Brebes, Jawa Tengah serta menjadi penghasil bawang merah terbanyak pertama skala Jawa timur. Produksi bawang merah di Kabupaten Nganjuk tahun 2014 mencapai 116,507 ribu ton, dengan demikian bahwa kontribusi bawang merah Kabupaten Nganjuk terhadap produksi provinsi Jawa Timur sebesar 52,28% (Dinas Infokom Jawa Timur, 2015). Pengembangan potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten Nganjuk tertuang dalam kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. Sesuai dengan Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk tahun 2010-2030 bahwa ditetapkannya Kecamatan Sukomoro sebagai kawasan agropolitan. Kawasan yang ditetapkan mejadi kawasan agropolitan adalah Kecamatan Sukomoro yang merupakan kawasan subsektor hortikultura komoditas unggulan bawang merah.

Strategi pengembangan kawasan agropolitan Sukomoro dituangkan dalam *masterplan* pengembangan kawasan agropolitan Kabupaten Nganjuk tahun 2013. *Masterplan* tersebut disusun setelah dilakukan 6 analisa utama yaitu :

- (1) Identifikasi komoditi unggulan
- (2) Identifikasi dan dileniasi kawasan

agropolitan (3) Penentuan struktur kawasan agropolitan (4) Analisa pengembangan agrobisnis (5) Rencana pengembangan kawasan dan (6) Penyusunan strategi pengembangan kawasan (*Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Nganjuk 2013:3*). Selanjutnya *Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Nganjuk* tersebut menjadi acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kawasan Agropolitan Kabupaten Nganjuk Tahun 2015-2019. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam rancangan RPJM Kawasan Agropolitan adalah kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan meningkatnya perekonomian daerah. Arah kebijakan Agropolitan sesuai RPJM Kawasan Agropolitan Kabupaten Nganjuk 2015-2019 adalah peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) petani bawang merah, penguatan kelembagaan agropolitan, pengembangan infrastuktur dan pengembangan agribisnis.

Ditetapkannya Sukomoro sebagai kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan bawang merah, masyarakat Sukomoro khususnya petani bawang merah mengalami perubahan secara fisik yang lebih maju dibanding sebelum ditetapkannya sebagai kawasan agropolitan. Sebelum agropolitan dikembangkan kelembagaan petani bawang merah belum kuat, belum ada pengawasan serta penyuluhan sehingga produktivitas bawang merah rendah. Selain itu sarana dan prasara masih belum mendukung kegiatan pertanian serta tidak adanya dukungan pengembangan agribisnis dan industri bawang merah. Namun setelah dikembangkannya kawasan agropolitan, penguatan kelembagaan selalu dioptimalkan, sarana dan prasanara memadai serta adanya Pasar Sentra

Pengembangan Agribisnis (SPA) untuk mengembangkan agribisnis dan industri bawang merah.

Implementasi kebijakan Agropolitan di kabupaten Nganjuk dilaksanakan dengan mengembangkan kawasan agropolitan untuk menghasilkan produk bawang merah yang berkualitas sehingga mampu menciptakan pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan kebijakan agropolitan dengan judul **“Implementasi Kebijakan Agropolitan Berbasis Komoditas Unggulan dalam Membangun Ekonomi Daerah”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan pedoman penentuan langkah-langkah untuk memperoleh cara-cara pemecahannya. Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan agropolitan dalam mengembangkan kawasan berbasis komoditas unggulan dalam membangun ekonomi daerah di kawasan agropolitan bawang merah Kecamatan Sukomoro?
2. Bagaimana dampak pengembangan kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan terhadap pembangunan ekonomi daerah di kawasan agropolitan bawang merah Kecamatan Sukomoro?
3. Apa faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan dalam membangun ekonomi daerah di kawasan agropolitan bawang merah Kecamatan Sukomoro?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan agropolitan dalam mengembangkan kawasan berbasis komoditas unggulan dalam membangun ekonomi daerah di kawasan agropolitan bawang merah Kecamatan Sukomoro.
2. Untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis dampak pengembangan kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan terhadap pembangunan ekonomi daerah di kawasan agropolitan bawang merah Kecamatan Sukomoro.
3. Untuk mengetahui, mendiskripsikan dan menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan dalam membangun ekonomi daerah di kawasan agropolitan bawang merah Kecamatan Sukomoro

### **4. Kontribusi Penelitian**

Adapun kontribusi yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis
  - a. Sebagai sumbangan pemikiran serta wacana terkait implementasi kebijakan agropolitan berbasis komoditas unggulan di kawasan agropolitan bawang merah Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk.
  - b. Untuk mengembangkan ilmu Administrasi Publik melalui konsep pembangunan di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

- c. Sebagai sumbangan bahan referensi bagi calon peneliti berikutnya yang meneliti isu-isu yang sama.

## 2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan yang positif bagi Pemerintah Daerah atau instansi terkait perbaikan implementasi kebijakan agropolitan berbasis komoditas unggulan di kawasan agropolitan bawang merah Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk.

## 5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi tentang pemadatan isi dari masing-masing bab sehingga memudahkan pembaca untuk memahami penelitian ini, maka peneliti memberikan gambaran umum tentang isi skripsi ini. Secara garis besar skripsi ini terbagi dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut :

### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini pembahasan terdiri dari latar belakang implementasi kebijakan agropolitan berbasis komoditas unggulan bahwa pemerintah perlu meningkatkan produktivitas bawang merah agar mampu bersaing di pasar karena harga bawang merah memiliki tingkat fluktuasi yang tinggi. Pada bab ini juga memaparkan rumusan masalah implementasi kebijakan agropolitan berbasis komoditas unggulan untuk membangun ekonomi daerah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini memaparkan tentang teori-teori yang digunakan dalam disiplin ilmu administrasi yang kaitannya dengan materi penulisan skripsi sehingga dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk memudahkan pemecahan terhadap masalah yang ada. Teori-teori tersebut yaitu konsep implementasi kebijakan, konsep Agropolitan, konsep komoditas unggulan serta konsep pembangunan ekonomi.

## Bab III Metode Penelitian

Pada Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif maka diuraikan jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian serta jenis analisis data yang digunakan.

## Bab IV Hasil Pembahasan

Pada bab ini berisi tentang data hasil penelitian, analisi data dan interpretasi data.

## Bab V penutup

Pada bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan diuraikan mengenai hal penting secara garis besar dan umum. Sedangkan dalam saran berisikan tentang masukan-masukan mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Administrasi Publik**

Di Indonesia Administrasi publik dikenal dengan istilah Administrasi Negara yakni salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan (Kasim, 1993:21). Menurut Gordon dalam Kasim (1993: 22) menganggap secara implisit bahwa administrasi publik terlibat dalam seluruh proses kebijakan publik. Definisi administrasi publik tersebut adalah sebagai berikut :

“Administrasi publik adalah studi tentang seluruh proses, organisasi dan individu yang bertindak sesuai dengan peran dan jabatan resmi dalam pelaksanaan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif dan peradilan.”

Ellwein dan Hesse serta Peter dalam Knill (2001:65) berpendapat bahwa administrasi publik lebih berfungsi sebagai aplikasi hukum daripada pembuatan kebijakan dan kurang memiliki fleksibilitas dan diskresi secara komparatif ketika menerapkan provisi legal. Dalam arti luas, administrasi publik menurut Henry (1989:17) merupakan suatu kombinasi teori praktek birokrasi publik.

Hughes (1994:4-9) menyatakan bahwa administrasi publik merupakan aktivitas melayani publik dan atau aktivitas pelayan publik dalam melaksanakan kebijakan yang diperoleh dari pihak lain. Pelaksanaannya didasarkan pada prosedur dengan cara menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan. Administrasi publik terfokus pada proses, prosedur dan kesopanan. Tujuan administrasi publik baik menurut Henry (1989) ialah untuk memajukan pemahaman tentang pemerintah dan hubungannya dengan rakyat

yang pada gilirannya akan memajukan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap tuntutan sosial dan untuk menetapkan praktek manajemen yang efisien, efektif dan lebih manusiawi.

Jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan negara yang dilakukan oleh pemerintah. Kegiatan-kegiatan tersebut untuk melayani masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan publik. Serta kegiatan-kegiatan tersebut memiliki dasar hukum.

## **B. Kebijakan Publik**

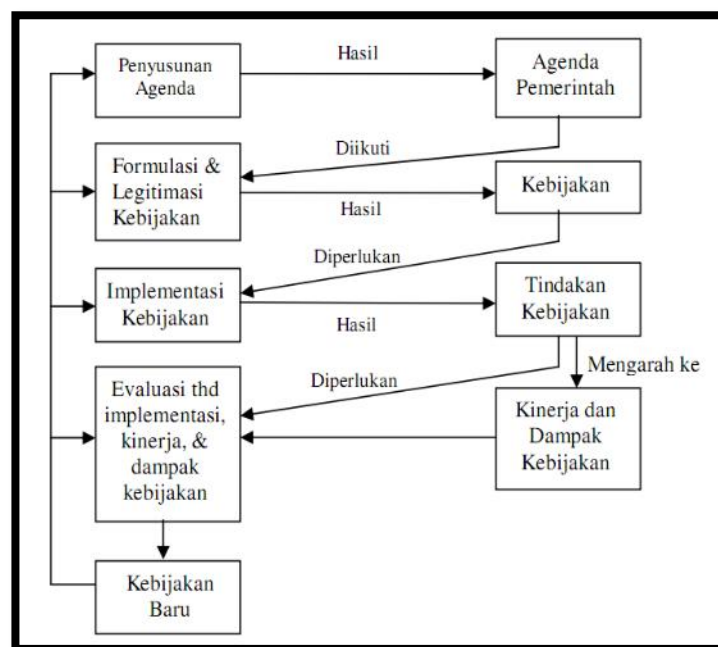
Kebijakan menurut pendapat Friedrich dalam Wahab (2001:3) bahwa:

“Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”

Kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah untuk masyarakat disebut kebijakan publik. Leslie dalam widodo (2010:12) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “*as a course of action or inaction chosen by public authorities to address a given problem or interrelated set of problems*”. Maksud dari pernyataan tersebut yaitu kebijakan publik adalah sebagai sebuah rangkaian dari pilihan antara tindakan atau kegiatan oleh kewenangan-kewenangan publik untuk menunjukkan sebuah permasalahan atau permasalahan yang saling berhubungan. Sedangkan Dye dikutip oleh Islamy (2007:18) bahwa kebijakan merupakan pilihan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan

sesuatu dan juga pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu harus ada tujuannya dan kebijakan publik harus melalui semua tindakan pemerintah.

Menurut Ripley dalam Subarsono (2009:11) bahwa tahapan kebijakan publik terdiri dari: (1) penyusunan agenda kebijakan (2) formulasi dan legitimasi kebijakan (3) Implementasi kebijakan dan (4) Evaluasi terhadap imlementasi kinerja dan dampak kebijakan.



Gambar 2 . Tahapan Kebijakan Publik Ripley

*Sumber : Subarsono (2009:11)*

Dari gambar diatas bisa dilihat bahwa implementasi kebijakan adalah suatu tindakan kebijakan yang mengarah pada dampak kebijakan serta memerlukan evaluasi terhadap implementasi tersebut. Menurut Ripley dalam Subarsono (2009:12) bahwa dalam tahap implementasi diperluan dukungan

sumber daya dan penyusunan organisasi pelaksanaa kebijakan. Sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi suatu kebijakan berjalan baik.

Dalam implementasi kebijakan akan menghasilkan suatu dampak implementasi. Menurut Dye dalam Islamy (2007) dampak kebijakan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata. Dye mengatakan bahwa terdapat sejumlah dampak kebijakan yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Dampak kebijakan terhadap situasi atau kelompok sasaran;
2. Dampak Kebijakan terhadap situasi atau kelompok lain selain situasi kelompok sasaran;
3. Dampak kebijakan terhadap kondisi sekarang dan kondisi masa yang akan datang;
4. Biaya langsung kebijakan dalam bentuk sumber dana dan dana yang digunakan dalam programnya;
5. Biaya langsung kebijakan yang mencakup kehilangan peluang melakukan kegiatan-kegiatan lainnya.
6. Ukuran manfaat tidak langsung terhadap komunitas.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah kesepakatan yang dirumuskan oleh pemerintah sebagai penyelenggara administrasi publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu kebijakan juga diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat. Perumusan kebijakan dilaksanakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang diperjelas dengan suatu struktur program.

### **C. Implementasi Kebijakan**

#### **1. Konsep Implementasi**

Implementasi adalah proses pelaksanaan dari kebijakan yang dibuat. Implementasi adalah tindak nyata untuk mewujudkan tujuan dari suatu kebijakan.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut kamus Webster dalam Wahab (2004:64) bahwa implementasi menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu dan untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.

Adapun makna implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Wahab (2008:65), mengatakan implementasi yaitu:

“Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Suatu implementasi tentu dipraktekkan berdasarkan kebijakan yang sudah dibuat terlebih dahulu. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat yang dibuat oleh administrasi publik disebut kebijakan publik.

## **2. Konsep Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam Agustinus (2006:139) bahwa :

“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan, lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang akan dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi”.

Sejarah pemikiran implementasi kebijakan Menurut Goggin et al dalam Smith (2009:158) secara tradisional dibagi menjadi 3 (tiga) generasi. Alasan pemahaman implementasi menjadi tiga generasi tersebut adalah sejak

kemungkinan masalah bisa dipecahkan, kedewasaan berpikir dan kesadaran penafsiran. Selain itu terus terjadi debat dalam pemahaman implementasi untuk menyeimbangkan kemajuan dan menjaga konsistensi.

### **3. Model Implementasi kebijakan**

Terdapat beberapa bentuk implementasi kebijakan sebagai acuan pencapaian implementasi dikatakan berhasil atau tidak. Dua macam pendekatan implementasi kebijakan yaitu *top down* dan *Bottom Up*. Pendekatan *top down* mengasumsikan bahwa proses kebijakan merupakan suatu rangkaian perintah di mana para pemimpin politik mengartikulasikan suatu preferensi kebijakan yang jelas yang akan dilaksanakan dengan cara yang semakin spesifik (Tachjan, 2006:11). Tokoh-tokoh yang memiliki sudut pandang pendekatan *top down* antara lain George C. Edward, Van Meter Van Horn, serta Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier serta Merilee S. Grindle.

#### **a. Teori George C. Edward**

Edward III memandang bahwa implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pihak-pihak terkait yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif yang menghasilkan regulasi perundang-undangan dan konsekuensi kebijakan untuk orang-orang yang berpengaruh (Widodo, 2010:95). Selanjutnya Edward III menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

### 1) Komunikasi

Menurut Edward III komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*) (Widodo,2010:97).

### 2) Sumber Daya

Edward III dalam Widodo (2010:98) mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan. Edward III dalam Widodo (2010:97) menjelaskan sumberdaya tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Sumberdaya manusia  
Sumber daya manusia yang paling penting dalam implementasi adalah staff. Walaupun sebuah kebijakan sangat jelas dan konsisten implementasinya, serta akuratnya penyalurannya, jika tidak ada sumber daya yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang efektif tersebut, pelaksanaannya tidak akan efektif.
- b) Sumberdaya anggaran  
Terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

- c) Sumberdaya peralatan  
Sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.
- d) Sumber daya kewenangan  
Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

### 3) Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Subarsono (2011: 90-92)

adalah sebagai berikut :

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Edward III dalam Widodo (2010:104-105) mengatakan jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementor*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari pengangkatan birokrasi, dan insentif.



#### 4) Struktur Birokrasi

Edward II mengatakan bahwa Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini menurut Edward III mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya (Widodo,2010:106).

Menurut Edwards III dalam Winarno (2005:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yaitu:

- a) Standar Operational Procedure (SOP)  
Standard operational procedure (SOP) merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.
- b) Fragmentasi  
Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi.

#### b. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Van Meter dan Horn dalam Winarno (2002:110) menamai model implementasi dengan model proses. Model yang mereka rumuskan tersebut mempunyai enam variabel, yaitu :

- 1) *Policy standards and objectives* (Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan program)  
Yaitu variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap faktor-faktor yang menentukan kinerja kebijakan. Identifikasi indikator kinerja untuk menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan;

- 2) *Policy resources* (Sumber-sumber kebijakan)  
 Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif;
- 3) *Interorganizational communication and enforcement activities* (Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan)  
 Implementasi akan berjalan efektif jika standar dan sasaran dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Hal ini sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, ketetapan komunikasinya dengan para pelaksana dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi;
- 4) *Characteristics of the implementing agencies* (Karakteristik badan-badan pelaksana)  
 Karakteristik badan-badan pelaksana mencakup struktur birokrasi yang diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.;
- 5) *Disposition of implementors* (Disposisi atau kecenderungan para pelaksana)  
 Tiga unsur tanggapan pelaksana yang mungkin mempengaruhi kemampuan dan keinginan melaksanakan kebijakan yaitu : (1) kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan; (2) Macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan); (3) intensitas tanggapan itu;
- 6) *Economic, sosial and conditions* (Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi)  
 Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel. Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar. Perubahan kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi interpretasi terhadap masalah dan dengan demikian akan mempengaruhi cara pelaksanaan program, variasi-variasi dalam situasi politik berpengaruh terhadap pelaksanaan kerja.

c. Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2011:94) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik

kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

d. Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Grindle dalam Subarsono (2011:93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan (*content of Policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementatation*). Variabel tersebut mencakup:

- 1) Sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau *target groups* termuat dalam isi kebijakan;
- 2) Jenis manfaat yang diterima oleh *target group*;
- 3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan;
- 4) Apakah letak sebuah program sudah tepat;
- 5) Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci;
- 6) Apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan Wibawa dalam Samodra Wibawa (1994:22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Konteks implementasinya adalah sebagai berikut :

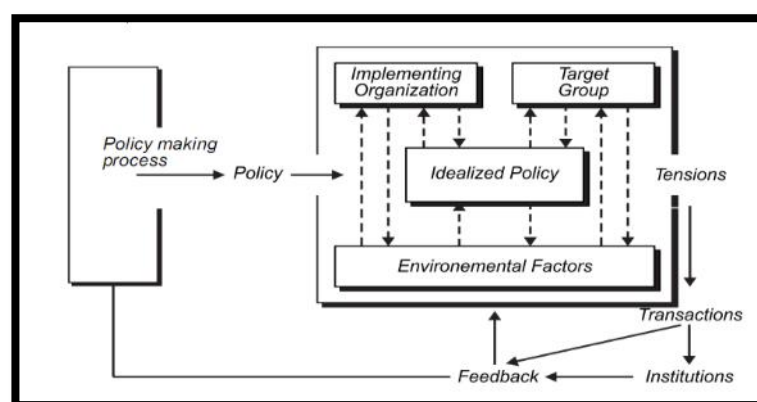
- 1) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat;
- 2) Karakteristik lembaga dan penguasa;
- 3) Kepatuhan dan daya tanggap.

Pendekatan *Bottom up* merupakan kritikan terhadap pendekatan *top down* yang mengabaikan fokus terhadap para pejabat pada tingkatan yang lebih rendah. Pendekatan *bottom up* melihat dari aktor yang terlibat dalam pelaksaaan

program dari publik hingga swasta serta mengkaji tujuan pribadi dan organisasi. Kemudian pendekatan *bottom up* bergerak ke arah atas untuk menemukan tujuan-tujuan, strategi-strategi dan konteks dari orang-orang yang terlibat dalam melaksanakan program (Tachjan,2006:12). Tokoh-tokoh yang mengembangkan pendekatan *bottom up* antara lain Adam Smith, Richard Elmore dan Gordon Chase.

a. Teori Thomas B. Smith

Menurut Smith dalam Tachjan (2006:37) proses implementasi ada empat variabel yang perlu diperhatikan. Keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, oleh karena itu terjadi ketegangan-ketegangan (*tensions*) yang bisa menyebabkan timbulnya protes-protes, bahkan aksi fisik, dimana hal ini menghendaki penegakan institusi-institusi baru untuk mewujudkan sasaran kebijakan tersebut. Ketegangan-ketegangan itu bisa juga menyebabkan perubahan-perubahan dalam institusi-institusi lini.



Gambar 3. Model Implementasi Kebijakan Smith  
Sumber: Tachjan (2006:39)

Menurut Smith dalam Islamy (2001), variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) *Idealized Policy*, yaitu pola interaksi yang diidealkan oleh perumus dengan tujuan mendorong target group untuk melaksanakan kebijakan. Dalam suatu organisasi publik, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pemberian informasi kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang bertentangan (*conflicting*), maka pelaksana kebijakan akan sulit terlaksana secara intensif. Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten (*accuracy and consistency*). Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil, demikian pula sebaliknya.
- 2) *Target Group*, yaitu bagian dari stakeholders yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi yang diinginkan. Mereka merupakan bagian dari stakeholders yang diharapkan dapat menerima dan menyesuaikan terhadap pola interaksi yang ditentukan oleh kebijakan. Keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan dilihat dari bagaimana respon atau daya tanggap kelompok sasaran, jika kelompok sasarannya berlapang hati untuk menerima dan menjalankan kebijakan yang ditetapkan tanpa ada yang mengeluh maka kebijakan tersebut akan berhasil. Adapun yang mempengaruhi kelompok sasaran untuk dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan bergantung kepada (1) kesesuaian isi kebijakan dengan harapan mereka; (2) karakteristik oleh masing-masing kelompok sasaran, seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia, dan keadaan sosial ekonomi; (3) komunikasi antara pelaksana kebijakan (implementor) dengan penerima kebijakan (kelompok sasaran) sehingga jeleknya proses komunikasi ini akan menjadi titik lemah dalam mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan.
- 3) *Implementing Organization*, yaitu pelaksana yg bertanggung jawab dalam pelaksanaan. Pelaksana tersebut dapat berupa organisasi ataupun perorangan yang melaksanakan kebijakan di lapangan dengan bertugas sebagai pengelola, pelaksanaan serta pengawasan.

Karakteristik lembaga pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan melihat karakteristik lembaga-lembaga pelaksana, maka pembahasan ini tidak lepas oleh struktur birokrasi. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para lembaga pelaksananya. Pada beberapa kebijakan menuntut para lembaga pelaksana kebijakan agar bersikap ketat dan disiplin. Sedangkan pada konteks lain diperlukan lembaga pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

- 4) *Enviromental factors*, yaitu unsur lingkungan yang dapat mempengaruhi implementasi. Hal terakhir yang perlu diperhatikan dalam menilai kinerja keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak mendukung atau tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan proses implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Banyak perhatian yang difokuskan kepada dampak lingkungan sosial, ekonomi dan politik pada kebijakan publik dengan mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan yang dapat mempengaruhi hasil atau output kebijakan.

#### b. Richard Elmore dkk

Richard Elmore, Michael Lipsky dan Benny Hjern dan David O'Porter mengemukakan dalam Tachjan (2006:43) bahwa pada hakekatnya semua kebijakan publik diimplementasikan oleh organisasi-organisasi publik yang besar, oleh karena itu pengetahuan tentang organisasi-organisasi telah menjadi suatu unsur penting dari analisis kebijakan. Organisasi-organisasi tersebut menyelesaikan masalah dengan memperincikan tugas-tugas yang dapat dikelola dan mengalokasikan tanggung jawab terhadap tugas-tugas tersebut kepada unit-unit khusus. Dengan demikian, hanya dengan memahami bagaimana

organisasi-organisasi itu bekerja maka kita dapat memahami bagaimana kebijakan-kebijakan tersebut dibentuk dalam proses implementasi.

Dalam hal teori organisasi, tak ada kumpulan tunggal dan koheren tentang teori organisasi yang akan berlaku sebagai dasar bagi analisis. Jika demikian, ada dua cara untuk menanggulanginya dari jalan buntu ini, pertama, mensintesis semua teori organisasi ke dalam sehimpunan teratur persepsi-persepsi analitik yang berguna dalam analisis implementasi. Kedua, setuju dengan adanya diversitas pemikiran yang ada tentang organisasi-organisasi dan berusaha mencoba menjaring dari diversitas tersebut sejumlah model-model yang dapat dibedakan serta dapat digunakan untuk menganalisis masalah implementasi tersebut.

Elmore dalam Tachjan (2006:45) mengembangkan empat model organisasi yang menggambarkan sekumpulan besar pemikiran mengenai masalah implementasi. Model-model tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) *The systems management model*
- 2) *The bureaucratic process model*
- 3) *The organizational development model*
- 4) *The conflict and bargaining model*

#### **4. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi**

Dalam implementasi kebijakan tentu ditemui faktor pendukung serta factor penghambat implementasi tersebut. Faktor pendukung adalah hal-hal yang mendukung implementasi kebijakan sehingga tujuan implementasi kebijakan dapat dicapai. Menurut Winarno (2002:102) Alat administrasi hukum dimana

berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Jadi pendukung implementasi kebijakan yang dimaksud diatas adalah alat administrasi hukum yang bekerja bersama-sama.

Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990:235), menjelaskan yang dimaksud dengan penghambat adalah hal yang menjadi penyebab atau karenanya tujuan atau keinginan tidak dapat diwujudkan. Menurut Sunggono (1994: 149-153) implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

1) Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

2) Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

3) Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

4) Pembagian potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi



pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas.

Selain itu Donald P. Warwick dalam Tacjhan (2006:28) melalui pendekatan transaksional mengembangkan model yang prinsipnya bertolak dari pandangan bahwa guna memahami berbagai masalah pada tahap pelaksanaan rencana atau kebijakan, maka keterkaitan antara perencanaan dan implementasi tidak dapat diabaikan. Proses perencanaan itu sendiri tidak dapat dilihat sebagai suatu proses yang terpisah dengan pelaksanaan. Pada tahap implementasi berbagai kekuatan akan saling berebut berpengaruh, baik kekuatan yang mendorong atau memperlancar (*facilitating condition*), maupun kekuatan yang menghambat(*impeding condition*) pelaksanaan program atau proyek. Faktor-faktor tersebut adalah:

- 1) Faktor Pendukung (*facilitating conditions*), terdiri dari:
  - Komitmen pimpinan politik (*commitment of political leaders*): Adanya komitmen dari pimpinan pemerintahan dalam pelaksanaan suatu proyek menjadi hal yang utama, karena pimpinan politik adalah yang memiliki kekuasaan di daerah.
  - Kemampuan organisasi (*organizational capacity*):
  - Komitmen para pelaksana (*the commitment of implementors*): *If the generals are ready to move to captain and toops will follow.*
  - Dukungan kelompok kepentingan (*interest group support*) : Implementasi kebijakan sering lebih sering mendapat dukungan dari kelompok kepentingan dalam masyarakat manakala mereka terkait langsung dengan kebijakan.
- 2) Faktor Penghambat (*impeding conditions*), terdiri atas:
  - Banyaknya aktor yang terlibat : Semakin banyak pihak yang terlibat dan turut mempengaruhi pelaksanaan, maka semakin rumit komunikasi dalam pengambilan keputusan dan makin besar kemungkinan terjadi hambatan dalam implementasi program tersebut.

- Terdapat komitmen atau loyalitas ganda : Hal ini disebabkan adanya tugas ganda yang dirangkai dan dijabat oleh suatu organisasi, sehingga perhatian pelaksana menjadi terpecah.
- Kerumitan yang melekat pada proyek-proyek itu sendiri (*intrinsic complexity*) : hambatan yang biasanya melekat adalah disebabkan oleh faktor-faktor teknis, faktor ekonomi, pengadaan pangan dan faktor perilaku pelaksana atau masyarakat.
- Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak : Semakin banyak jenjang pengambilan keputusan atau memiliki prosedur yang harus disetujui oleh pihak yang berwenang, maka akan memerlukan waktu lama dalam pelaksanaannya.
- Faktor lain, yaitu waktu dan perubahan kepemimpinan : Perubahan kepemimpinan baik pada tingkat pimpinan pelaksana maupun dalam organisasi di daerah sedikit banyak mempunyai pengaruh terhadap proyek atau program.

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses lanjutan dari kebijakan yang tertulis dalam lembar kebijakan dalam tindak nyata untuk mencapai tujuan. Keberhasilan atau kegagalan program dapat dilihat dari hasil outcome implementasi yang mempunyai faktor pendukung serta faktor penghambat dalam proses implementasi kebijakan.

## **D. Agropolitan**

### **1. Konsep Agropolitan**

Agropolitan adalah konsep pemusatan kegiatan pertanian berbasis produk unggulan dalam satu wilayah. Menurut Rustiadi dkk dalam Baladina (2013:31), agropolitan merupakan konsep pembangunan antara wilayah kota sebagai pusat kegiatan dan pertumbuhan ekonomi dengan wilayah pedesaan sebagai pusat kegiatan pertanian yang tertinggal. Friedman dan Weaver dalam Iqbal (2009:171) mengemukakan bahwa agropolitan termasuk salah satu kebijakan pengembangan dari bawah, namun implementasinya dapat berjalan baik apabila memenuhi

beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut antara lain : (1) kecukupan dana penunjang, (2) kekuatan komitmen koordinasi, dan (3) tidak tergantung sepenuhnya pada keputusan dari pusat (sentralistik).

Friedman dan Douglas dalam Iqbal (2009:172) mengemukakan bahwa agropolitan berasal dari kata *agro* (pertanian) dan *politan* (kota) yang berarti kota pertanian atau pertanian di kawasan kota. Mereka juga menjelaskan tentang pemikiran mereka yang melatarbelakangi pengalaman kegagalan pengembangan sektor industri di beberapa Negara berkembang (di Asia) yang mengakibatkan terjadinya berbagai kecenderungan, antara lain :

- a. Terjadinya *Hyper Urbanization*, sebagai akibat terpusatnya penduduk di kota-kota yang padat;
- b. Pembangunan *modern* hanya terjadi di beberapa kota saja, sementara daerah pinggiran relative tertinggal;
- c. Tingkat pengangguran dan setengah pengangguran yang relative tinggi;
- d. Pembagian pendapatan yang tidak merata (kemiskinan);
- e. Kekurangan bahan pangan, akibat perhatian pembangunan terlalu tercurah pada percepatan pertumbuhan sector industry (*rapid industrialization*);
- f. Penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat desa (petani);
- g. Terjadinya ketergantungan pada dunia luar.

Soemarno (2008:4) berpendapat bahwa agropolitan merupakan suatu pendekatan pembangunan melalui gerakan masyarakat dalam membangun ekonomi berbasis pertanian (agribisnis) secara terpadu dan berkelanjutan pada kawasan terpilih melalui pengembangan infrastruktur pedesaan yang mampu melayani, mendorong dan memacu pembangunan pertanian di wilayahnya.

Dari pemaparan konsep agropolitan diatas, dapat disimpulkan bahwa Agropolitan adalah strategi pemusatan kegiatan pertanian berbasis produk unggulan dalam satu wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan

perekonomian masyarakat sekitar. Konsep agropolitan adalah didasarkan dari perencanaan pembangunan yang bertujuan mempercepat wilayah baik perdesaan maupun perkotaan untuk mencapai kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Munculnya konsep Agropolitan dari Friedman dan Douglas, menjadikan konsep tersebut diterapkan di kawasan yang mempunyai potensi unggulan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

## **2. Struktur Kawasan Agropolitan**

Agropolitan berasal dari kata agro yang berarti pertanian dan politan yang berarti kota. Sedangkan kawasan agropolitan adalah kawasan agribisnis yang memiliki fasilitas perkotaan. Kawasan agropolitan terdiri dari kota pertanian dan desa-desa sentra produksi pertanian yang ada di sekitarnya, dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batasan administrasi pemerintahan, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi yang ada (Departemen Pertanian, 2002). Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang, kawasan agropolitan merupakan kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.

Menurut Djakapermana (2003:33) kawasan agropolitan berperan sebagai sistem fungsional desa-desa dengan adanya hirarki keruangan desa terdiri atas pusat agropolitan dan desa-desasekitarnya membentuk kawasan agropolitan. Kawasan agropolitan juga dicirikan oleh kawasan pertanian yang tumbuh dan

berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis di pusat agropolitan yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Kawasan agropolitan adalah kawasan agribisnis terpilih (sentra produksi pertanian) yang memiliki komoditi unggulan (spesifik lokasi) yang merupakan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat.

Suatu wilayah dapat dikembangkan menjadi suatu kawasan agropolitan menurut Soemarno (2008:6) harus dapat memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki sumberdaya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk mengembangkan komoditi pertanian khususnya pangan, yang dapat dipasarkan atau telah mempunyai pasar (selanjutnya disebut komoditi unggulan);
- b. Memiliki prasarana dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis khususnya pangan, seperti misalnya: jalan, sarana irigasi/pengairan, sumber air baku, pasar, terminal, jaringan telekomunikasi, fasilitas perbankan, pusat informasi pengembangan agribisnis, sarana produksi pengolahan hasil pertanian dan fasilitas umum serta fasilitas sosial lainnya;
- c. Memiliki sumber daya manusia yang mau dan berpotensi untuk mengembangkan kawasan agropolitan;
- d. Konsentrasi alam dan kelestarian lingkungan hidup bagi kelestarian sumberdaya alam, kelestarian sosial budaya maupun ekosistem secara keseluruhan.

Kawasan Agropolitan memiliki tripologi kawasan sesuai klasifikasi sektor usaha pertanian dan agribisnisnya masing-masing, tipologi tersebut yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. Tripologi Kawasan Agropolitan

No.	Sektor Usaha Pertanian	Tipologi kawasa	Persyaratan Agropolitan
1.	Tanaman pangan	Dataran rendah dan dataran tinggi, dengan tekstur lahan yang datar, memiliki sarana pengairan (irigasi) yang memadai.	Harus sesuai dengan jeniskomoditi yang dikembangkan seperti ketinggian lahan, jenis tanah, tekstr lahan, iklim, dan tingkat kesamaan tanah.
2.	Holtikultura	Dataran rendah dan dataran inggi, dengan tekstur lahan datar dan berbukit, dan tersedia air yang memadai.	Harus sesuai dengan jenis komoditi yang dikembangkan seperti ketinggian lahan, jenis tanah, tekstur lahan, iklim, dan tingkat keasaman tanah.
3.	Perkebunan	Dataran tinggi dengan tekstur lahan berbukit, dekat dengan kawasan konservasi alam.	Harus sesuai dengan jenis komoditi yang dikembangkan seperti ketinggian lahan, jenis tanah, tekstur lahan, iklim, dan tingkat keasaman tanah.
4.	Peternakan	Dekat dengan kawasan pertanian dan perkebunan, dengan sisten sanitasi yang memadai.	Lokasi tidak boleh berada dipermukiman dan memperhatikan aspek adapasi lingkungan.
5.	Perikanan darat	Terletak pada kola perikanan darat, tambak, danau lama dan danau buatan, daerah aliran sungai baik dalam bentuk keramba maupun tangkapan alam.	Memperhatikan aspek keseimbangan teknologi dan tidak merusak ekosistem lingkungan yang ada.

Sumber: Soemarno (2008:9)

Arahan pengembangan struktur ruang kawasan agropolitan dilakukan untuk menentukan lokasi pengembangan kawasan agropolitan. Menurut Friedman dalam RPJM agropolitan Kabupaten Nganjuk (2015 : 119) bahwa langkah awal untuk menyusun pola dan struktur kawasan agropolitan dimulai dari penentuan titik-titik lokasi sentra komoditas, kemudian diklasifikasikan berdasarkan kapasitas produksi dan daya dukung lain, serta menemukan pola dan menyusun struktur dasar pengembangan wilayah agropolitan. Dalam *Masterplan* agropolitan Kabupaten Nganjuk (2013:1) pengertian strktur kawasan agropolitan adalah sebagai berikut :

“Struktur kawasan agropolitan adalah sistem wilayah kawasan agropolitan yang mengatur elemen-elemen spasial dalam sebuah kawasan agropolitan. Sehingga setiap elemen memiliki fungsi dan peran yang spesifik dan menunjang sistem utama agropolitan. Secara umum elemen spasial adalah sebagai berikut :

- a. Sistem Kepusatan
- b. Skala kegiatan
- c. Fungsi kegiatan tiap pusat kegiatan
- d. Interaksi anatar pusat kegiatan didalam wilayah tersebut

Dari beberapa pemaparan tentang kawasan agropolitan diatas, dapat disimpulkan bahwa kawasan agropolitan adalah kawasan yang mempunyai potensi produk unggulan yang dikembangkan dan dikelola untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dengan konsep agropolitan dengan prinsip-prinsipnya.

### **3. Ciri-Ciri Agropolitan**

Pengembangan agropolitan menurut Friedman dan Dougless dalam Haryono, (2008:8), memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yaitu untuk menjamin tercapainya keamanan pangan, sandang, kesehatan, dan

pendidikan. Dalam pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan, tentu dibutuhkan karakteristik wilayah yang sesuai agar suatu kawasan bisa dijadikan kawasan agropolitan. Menurut Soemarno (2008:4-6) mendefinisikan ciri-ciri kawasan agropolitan sebagai berikut :

- a. Sebagian besar kegiatan masyarakat di kawasan tersebut didominasi oleh kegiatan pertanian (dalam arti luas) dan atau agribisnis dalam suatu kesisteman yang utuh dan terintegrasi mulai dari:
  - 1) Subsistem usaha tani/pertanian primer (*on farm agribusiness*) yang mencakup usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan.
  - 2) Subsistem agribisnis hulu (*up stream agribusiness*) yang mencakup mesin, peralatan pertanian pupuk, dan lain-lain.
  - 3) Subsistem agribisnis hilir (*dawn stream agribusiness*) yang meliputi industri-industri pengolahan dan pemasarannya termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor.
  - 4) Subsistem jasa-jasa penunjang (kegiatan yang menyediakan jasa bagi agribisnis) seperti perkreditan, asuransi, transportasi, penelitian dan pengembangan, pendidikan, penyuluhan, infrastruktur dan kebijakan pemerintah.
- b. Adanya keterkaitan antara kota dengan desa yang bersifat interdependensi/timbal balik dan saling membutuhkan, dimana kawasan pertanian di pedesaan mengembangkan usaha budi daya (*on farm*) dan profuk olahan sala rumah tangga (*off farm*). Sebaliknya kota menyediakan fasilitas untuk berkembangnya usha budi daya dan agribisnis seeprti penyediaan sarana pertanian dan lain sebagainya.
- c. Kegiatan sebagian besar mayarakat di kawasan tersebut didominasi oleh kegiatan pertanian atau agribisnis termasuk didalamnya usaha industri (pengolahan) pertanian, perdgangan hasil-hasil pertanian (termasuk perdagangan untuk kegiatan ekspor bila dimungkinkan), perdagangan agribisnis hulu (sarana pertanian dan permodalan), agrowisata dan jasa pelayanan.
- d. Kehidupan masyarakat di kawasan agropolitan sama dengan suasana kehidupan di perkotaan, karena prasarana dan infrastruktur yang ada di kawasan agropolitan diusahakan tidak jauh berbeda dengan kota

Setelah konsep agropolitan diterapkan di kawasan agropolitan yang mempunyai ciri-ciri sesuai karakteristik agropolitan, maka ada ciri-ciri lain berkenaan dengan kawasan agropolitan yang sudah berkembang.



Dikemukakan oleh Suwandi (2001:16) berikut ciri-ciri kawasan agropolitan yang sudah berkembang yaitu:

- a. Sebagian pendapatan masyarakat berasal dari pertanian (agribisnis).
- b. Kegiatan yang berada di kawasan tersebut didominasi oleh kegiatan pertanian/agribisnis (ada komoditi unggulan), termasuk di dalamnya usaha industri (pengolahan) pertanian, perdagangan agribisnis hulu, agrowisata dan jasa pelayanan.
- c. Hubungan kota dan desa di kawasan agropolitan bersifat interdependensi yang harmonis.
- d. Kehidupan masyarakat di kawasan agropolitan mirip dengan suasana modern.

Jadi dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri kawasan agropolitan adalah sebagian besar masyarakatnya didominasi sektor pertanian dan mempunyai produk unggulan sehingga dapat dijadikan pusat agribisnis. Mempunyai hubungan saling terkait antara desa dan kota sehingga saling menguntungkan dan suasana di desa sudah seperti kota karena prasarana dan infrastruktur lengkap. Apabila suatu kawasan agropolitan mempunyai karakteristik sesuai ciri-ciri tersebut maka kawasan agropolitan sudah berkembang dengan baik.

#### **4. Tujuan dan Strategi Pengembangan Agropolitan**

Tujuan utama Pengembangan Kawasan Agropolitan yaitu sebagai salah satu alternatif konsep pembangunan kawasan yang mampu mendorong perekonomian daerah, menciptakan sinergitas pembangunan antar wilayah yang berimbang, mampu mengatasi permasalahan pembangunan wilayah perdesaan serta meningkatkan pengelolaan pertanian berkelanjutan (Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2014:1). Menurut Departemen Pertanian (2002) Tujuan pengembangan Kawasan Agropolitan adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan

masyarakat melalui percepatan pembangunan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota. Sedangkan Haryono (2008:12) mengatakan bahwa :

”Pengembangan agropolitan di wilayah perdesaan pada dasarnya lebih ditujukan untuk meningkatkan produksi pertanian dan penjualan hasil-hasil pertanian, mendukung tumbuhnya agro-processing skala kecil menengah dan mendorong keberagaman aktivitas ekonomi dari pusat pasar. Segala aktivitas harus diorganisasikan terutama untuk membangun keterkaitan antara perusahaan di kota dengan wilayah suplai di perdesaan dan untuk menyediakan fasilitas, pelayanan, input produksi pertanian dan aksesibilitas yang mampu memfasilitasi lokasi-lokasi permukiman di perdesaan yang umumnya mempunyai tingkat kepadatan yang rendah dan lokasinya lebih menyebar. Investasi dalam bentuk jalan yang menghubungkan lokasi-lokasi pertanian dengan pasar merupakan suatu hal yang penting yang diperlukan untuk menghubungkan antara wilayah perdesaan dengan pusat kota.”

Tujuan dan sasaran Pengembangan Kawasan Agropolitan dikemukakan oleh Suwandi (2005:24-25), yaitu:

- a. Jangka Panjang (*Goal*)  
Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani dan keluarganya di kawasan agropolitan, meningkatkan ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan.
- b. Jangka Menengah (*Purpose*)  
Menumbuhkembangkan kelembagaan usaha ekonomi petani (*on farm* dan *off farm*) yang efektif, efisien dan berdaya saing.
- c. Jangka Pendek (*objective*)  
Menumbuhkembangkan sarana dan prasarana umum dan sosial yang mendukung kelancaran usaha ekonomi masyarakat. Menciptakan iklim usaha masyarakat di kawasan agropolitan.
- d. Tujuan dan sasaran program Pengembangan Kawasan Agropolitan jangka pendek (misalnya tahun 2006-2007) disusun oleh masing-masing kabupaten/kota atau provinsi sesuai dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi. Tujuan dan sasaran program Pengembangan Kawasan Agropolitan jangka panjang dan jangka menengah.

Berdasarkan dokumen pengembangan kawasan agropolitan yang tertera dalam Bappeda Provinsi Jawa Timur (2014:11). Pengembangan Kawasan Agropolitan harus melihat kesempatan yang dapat meningkatkan ekonomi

masyarakat di masa depan dan melakukan pembangunan yang berkelanjutan melalui :

- a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)  
Pengembangan SDM pertanian dapat ditempuh melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan pertanian, pengembangan kelembagaan masyarakat yang diarahkan dan terfokus untuk Pengembangan Kawasan Agropolitan dan lain sebagainya.
- b. Pengembangan Agribisnis  
Strategi Pengembangan Agribisnis yang utuh dan bertahap disetiap daerah memerlukan pendekatan berbeda untuk setiap kawasan agropolitan. Para pelaku agribisnis dan petani di kawasan agropolitan harus mampu menganalisis keuntungan usaha taninya dengan mengembangkan model usaha tani terpadu dan berkelanjutan, pengolahan produk pertanian yang mampu memiliki nilai tambah dan daya saing, dll.
- c. Pengembangan Investasi dan permodalan  
Strategi ini dapat diterapkan dengan bantuan modal dan kredit yang dilakukan dengan prinsip mendidik terstruktur, dan sistematis. Bantuan langsung dalam bentuk bergulir atau Cuma-Cuma dalam bentuk uang/modal yang diberikan haruslah berdasarkan kebutuhan yang dirasakan oleh masyarakat kawasan agropolitan dan mengarah kepada masyarakat. Untuk itu, sebelumnya harus dilakukan identifikasi dan analisis kebutuhan masyarakat . kredit ini hendaknya tidak dibatasi untuk usaha budidaya saja, tetapi bisa digunakan untuk segala macam usaha baik *on farm* maupun *off farm*.
- d. Pengembangan sarana dan Prasarana  
Pengembangan sarana dan prasarana yang perlu dikembangkan harus berwawasan lingkungan pertanian, dengan demikian perlu memperhatikan aspek kesesuaian dengan rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten. Prasarana dan sarana yang dikembangkan perlu diarahkan untuk menunjang : (1) peningkatan produktivitas pertanian (*on farm*); (2) pengolahan hasil sebagai upaya untuk mendapatkan nilai tambah atas produk hasil pertanian (*off farm*); dan (3) pemasaran hasil sebagai upaya menunjang pemasaran hasil yang dapat memperpendek mata rantai tata niaga hasil pertanian.

Menurut Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya

(2012:15) Untuk dapat melangsungkan program pengembangan Kawasan

Agropolitan/Minapolitan, dilakukan penyusunan atas strategi pengembangan yang mencakup beberapa hal berikut:

- a. Penyusunan *masterplan* pengembangan Kawasan Agropolitan/minapolitan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat yang akan menjadi acuan bagi setiap wilayah/provinsi. *Masterplan* disusun berdasarkan jangka waktu tertentu dan mencakup rencana-rencana sarana dan prasarana;
- b. Penetapan lokasi Agropolitan/Minapolitan yang diusulkan oleh Kabupaten kepada Pemerintah Provinsi. Usulan harus didahului dengan identifikasi potensi dan masalah untuk mengetahui kondisi dan potensi lokasi, antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, dan iklim usaha;
- c. Sosialisasi program pengembangan Kawasan Agropolitan/Minapolitan yang dilaksanakan seluruh stakeholder terkait di tingkat pusat maupun daerah sehingga lebih terpadu dan terintegrasi;
- d. Pendampingan pelaksanaan program oleh pemerintah, yang juga berperan sebagai fasilitator. Sedangkan, masyarakat ditempatkan sebagai pelaksana utama dalam pelaksanaan pengembangan Kawasan Agropolitan/Minapolitan;
- e. Pembiayaan program yang, pada dasarnya, dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini petani/nelayan, penyedia agro/mina, pengelola hasil, pemasar, dan penyedia jasa. Dana stimultan yang difasilitasi pemerintah bertujuan untuk membiayai prasarana dan sarana yang bersifat publik dan strategis;
- f. Usulan indikasi program/kegiatan di kawasan agro/minapolitan harus dimasukkan dalam Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan agropolitan secara umum adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani dari segi sosial dan ekonomi dengan penataan ruang kawasan agropolitan berdasarkan komoditas unggulan yang dapat diolah baik secara *on farm* dan *off farm*. Tujuan-tujuan tersebut dituangkan dalam sebuah *masterplan* atau rencana pengembangan yang berisi tentang strategi-strategi atau misi mewujudkan tujuan tersebut

## E. Komoditas Unggulan

### 1. Konsep Komoditas Unggulan

Komoditas unggulan berkaitan dengan potensi yang bisa dimanfaatkan dan bernilai ekonomi tinggi dalam sektor pertanian. Soekarwati dalam Baladina (2013:32) berpendapat bahwa komoditi unggulan adalah :

“Komoditi yang mempunyai nilai tambah dan produksi yang besar sehingga dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, komoditi yang mempunyai multiplier effect yang besar terhadap kegiatan perekonomian lain dan pengembangan kawasan sekitarnya, serta komoditi yang mempunyai permintaan pasar tinggi. Spesialisasi komoditi daerah menjadi penting untuk menjamin penyediaan bahan baku yang cukup dan berlanjut. Sedangkan diversifikasi adalah pendekatan yang digunakan untuk meningkatkan nilai tambah komoditi pertanian”.

Menurut Badan Litbang pertanian (2003), komoditas unggulan merupakan komoditas andalan yang memiliki posisi strategis untuk dikembangkan di suatu wilayah yang penetapannya didasarkan pada berbagai pertimbangan baik secara teknis (kondisi tanah dan iklim) maupun sosial ekonomi dan kelembagaan (penggunaan teknologi, kemampuan sumber daya, manusia, infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat).

Menurut Ambardi (2002:18-20) kriteria mengenai komoditas unggulan daerah, di antaranya:

- a. Komoditas unggulan harus mampu menjadi penggerak utama (*prime mover*) pembangunan perekonomian. Artinya komoditas unggulan dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan, maupun pengeluaran.
- b. Komoditas unggulan mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang (*forward and backward linkages*) yang kuat, baik sesama komoditas unggulan maupun komoditas-komoditas lainnya.
- c. Komoditas unggulan mampu bersaing (*competitiveness*) dengan produk sejenis dari wilayah lain di pasar nasional dan pasar

- internasional, baik dalam harga produk, biaya produksi, kualitas pelayanan, maupun aspek-aspek lainnya.
- d. Komoditas unggulan daerah memiliki keterkaitan dengan daerah lain (*complementarity*), baik dalam hal pasar (konsumen) maupun pemasokan bahan baku (jika bahan baku di daerah sendiri tidak mencukupi atau tidak tersedia sama sekali).
  - e. Komoditas unggulan memiliki status teknologi (*state of the art*) yang terus meningkat, terutama melalui inovasi teknologi.
  - f. Komoditas unggulan mampu menyerap tenaga kerja berkualitas secara optimal sesuai dengan skala produksinya.
  - g. Komoditas unggulan bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu, mulai dari fase kelahiran (*increasing*), pertumbuhan (*growth*), puncak (*maturity*) hingga penurunan (*decreasing*). Begitu komoditas unggulan yang satu memasuki tahap penurunan, maka komoditas unggulan lainnya harus mampu menggantikannya.
  - h. Komoditas unggulan tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal.
  - i. Pengembangan komoditas unggulan harus mendapatkan berbagai bentuk dukungan, misalkan dukungan keamanan, sosial, budaya, informasi dan peluang pasar, kelembagaan, fasilitas insentif/disinsentif, dan lain-lain.
  - j. Pengembangan komoditas unggulan berorientasi pada kelestarian sumberdaya dan lingkungan.

Salah satu metode untuk mengidentifikasi suatu komoditas unggulan adalah metode *Location Quotient* (LQ). Teknik LQ merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis yang menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi. LQ mengukur konsentrasi relatif atau derajat spesialisasi kegiatan ekonomi melalui pendekatan perbandingan besarnya peranan suatu sektor/industri di suatu daerah terhadap besarnya peranan swktor/industri tersebut secara nasional.

Tarigan (2014:83) menjelaskan bahwa menggunakan LQ sebagai petunjuk adanya keunggulan komparatif dapat digunakan bagi sekotr-sektor yang telah lama berkembang, sedangkan bagi sektor yang baru atau sedang tumbuh apalagi yang selama ini belum pernah ada, LQ tidak dapat digunakan karena

produk totalnya belum menggambarkan kapasitas riil daerah tersebut. Analisis LQ sesuai dengan rumusnya memang sangat sederhana yaitu hanya melihat apakah LQ berada diatas 1 atau tidak. Apabila  $LQ > 1$  artinya komoditas itu menjadi basis pertumbuhan, mempunyai keunggulan komparatif dan hasilnya tidak hanya untuk kebutuhan wilayah tapi juga dapat diekspor ke luar wilayah. Sedangkan bila  $LQ = 1$  maka komoditas tersebut tergolong non basis, tidak memiliki keunggulan komparatif dan produksinya cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayahnya saja. Dan bila  $LQ < 1$  maka komoditas ini termasuk non basi yang produksinya tidak mampu memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri sehingga perlu pasokan dari luar wilayah.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa komoditas unggulan adalah produk potensi suatu wilayah yang bernilai ekonomis sehingga dapat meningkatkan perekonomian wilayah tersebut. Selain itu komoditas unggulan dapat memenuhi kebutuhan wilayahnya sendiri dan masih dapat mengekspor produknya untuk wilayah luar. Penghitungan komoditas tersebut menggunakan metode *Location Quotient*.

## **2. Konsep Komoditas Bawang Merah**

Bawang merah merupakan komoditas unggulan hortikultura. Bawang merah merupakan terna rendah yang tumbuh tegak dengan tinggi dapat mencapai 15-50 cm, membentuk rumpun dan termasuk tanaman semusim. Perakarannya berupa akar serabut yang tidak panjang dan tidak terlalu dalam tertanam dalam tanah (Wibowo, 1999). Menurut Steenis (2005) Bawang merah diklasifikasikan sebagai berikut: (1) Kingdom Plantae (2) Divisio Spermatophyta (3) Subdivisio

Angiospermae (4) Kelas Monocotyledonae (5) Ordo Liliales/Liliflorae (6) Famili Liliaceae (7) Genus *Allium* (8) Species *Allium ascalonicum* L.

Tanaman bawang merah berasal dari daerah Asia Tengah, yakni sekitar Bangladesh, India, dan Pakistan. Beberapa varietas bawang merah antara lain : Bima Brebes, Medan, Keling, Maja Cipanas, Super philip, Bauji, Batu ijo dll. Umumnya bawang merah digunakan untuk bumbu masak oleh masyarakat. Pada zaman Mesir Kuno bawang merah digunakan untuk pengobatan. Umumnya bawang merah digunakan untuk bumbu masak oleh masyarakat. Pada zaman Mesir Kuno bawang merah digunakan untuk pengobatan.

Di Indonesia, hampir seluruh wilayahnya mendukung untuk ditanami bawang merah. Sentra produksi bawang merah di Indonesia diantaranya adalah di Nganjuk (Jawa Timur) dan Brebes (Jawa Tengah). Bawang merah termasuk sayuran unggulan nasional yang belum banyak keragaman varietasnya, baik varitas lokal maupun varietas unggul nasional. Berdasarkan dokumen Direktorat Perlindungan Tanaman Holtikultura (2008), syarat tumbuh tanaman bawang merah agar mendapat hasil panen yang baik adalah sebagai berikut :

#### 1. Iklim

Budidaya bawang merah pada daerah-daerah yang beriklim kering, dengan suhu udara yang cukup tinggi dan penyinaran matahari yang penuh akan dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman yang optimal. Secara umum tanaman bawang merah lebih cocok diusahakan secara agribisnis/komersial di daerah dataran rendah pada akhir musim penghujan, atau pada saat musim kemarau, dengan penyediaan air irigasi yang cukup untuk keperluan tanaman.



Pertumbuhan tanaman lebih dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti cahaya, iklim, CO<sub>2</sub> yang dapat memacu pertumbuhan tanaman. Tanaman ini membutuhkan penyinaran cahaya matahari yang maksimal (minimal 70% penyinaran), suhu udara 25<sup>0</sup> – 32<sup>0</sup>C, dan kelembaban nisbi 50–70%. Tanaman bawang merah masih dapat membentuk umbi di daerah yang suhu udaranya rata – rata 22<sup>0</sup>C tetapi hasil umbinya tidak sebaik di daerah yang suhu udara lebih panas. Bawang merah dapat ditanam di dataran rendah sampai dataran tinggi (0-900 m dpl) dengan curah hujan 300-2500 mm/th. Namun, pertumbuhan tanaman maupun umbi yang terbaik di ketinggian sampai 250 m dpl. Bawang merah masih dapat tumbuh dan berumbi di ketinggian 800-900 m dpl, tetapi umbinya lebih kecil dan warnanya juga kurang mengilap. Selain itu, umurnya lebih panjang dibanding umur tanaman di dataran rendah karena suhu di dataran tinggi lebih rendah.

## 2. Tanah

Berbagai tipe tanah dapat ditanami bawang merah, tetapi harus memenuhi syarat antara lain gembur, kandungan humus tinggi, serta drainase (tata air) dan aerasi (tata udara) baik. Tanah yang gembur dan subur akan mendorong perkembangan umbi sehingga hasilnya besar-besar. Jenis tanah yang paling baik adalah tanah lempung yang berpasir atau berdebu. Kemasaman tanah (pH) yang paling sesuai untuk bawang merah adalah agak masam sampai normal (6,0-6,8). Tanah ber-pH 5,5-7,0 masih dapat digunakan untuk penanaman bawang merah. Tanah yang terlalu asam dengan pH di bawah 5,5 banyak mengandung garam aluminium (Al). Garam ini bersifat

racun sehingga dapat menyebabkan tanaman menjadi kerdil. Di tanah yang terlalu basa dengan pH lebih dari 7, garam mangan (Mn) tidak dapat diserap oleh tanaman. Akibatnya umbi yang dihasilkan kecil dan produksi tanaman rendah.

### 3. Jenis Mulsa

Mulsa diartikan sebagai bahan atau material yang sengaja dihamparkan di permukaan tanah atau lahan pertanian. Metode pemulsaan dapat dikatakan sebagai metode hasil penemuan petani. Pemulsaan merupakan suatu cara memperbaiki tata udara tanah dan juga tersedianya air bagi tanaman (dapat diperbaiki). Selain itu pemberian mulsa dapat mempercepat pertumbuhan tanaman yang baru ditanam. Berdasarkan sumber bahan dan cara pembuatannya, bahan mulsa pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu mulsa organik, mulsa anorganik, dan mulsa kimia-sintesis. Terjadi perbedaan yang nyata antara pemberian mulsa jerami padi (M1) dengan tanpa pemberian mulsa (M0) terhadap jumlah daun per rumpun pada hasil umbi. Pemberian mulsa jerami padi dapat meningkatkan hasil umbi kering sebesar 4,49 Ku Ha-1 atau terjadi peningkatan sebesar 35,13%. Fungsi mulsa jerami adalah untuk menekan pertumbuhan gulma, mempertahankan agregat tanah dari hantaman air hujan, memperkecil erosi permukaan tanah, mencegah penguapan air, dan melindungi tanah dari terpaan sinar matahari. Juga dapat membantu memperbaiki sifat fisik tanah terutama struktur tanah sehingga memperbaiki stabilitas agregat tanah.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa bawang merah merupakan tanaman hortikultura yang menjadi salah satu komoditas unggulan. Di Indonesia bawang merah dapat dibudidayakan karena syarat tumbuh bawang merah sangat cocok dengan keadaan iklim, curah hujan, jenis tanaman di wilayah Indonesia.

## **F. Pembangunan Ekonomi Daerah**

### **1. Konsep Pembangunan Ekonomi Daerah**

Pembangunan Ekonomi adalah proses meningkatkan perekonomian rakyat melalui pembangunan berbagai sektor. Menurut Adisasmita (2008:13), pembangunan wilayah (regional) merupakan fungsi dari potensi sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan, transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan (kewiraswastaan), kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas.

Terkait Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, masalah pembangunan ekonomi juga diwenangkan ke daerah. Tarigan (2014:122) mengungkap perbedaan pertumbuhan ekonomi nasional dan ekonomi daerah adalah sebagai berikut :

“Asumsi bahwa perekonomian suatu negara berupa perekonomian tertutup yang sering kali digunakan dalam analisis pertumbuhan ekonomi nasional tidak dapat digunakan dalam analisis pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dikarenakan pada suatu daerah adanya kemungkinan masuk dan keluarnya arus perpindahan tenaga kerja dan

modal dari daerah yang satu ke daerah yang lain peluangnya sangat besar sehingga menciptakan perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi daerah adalah penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan.

Menurut Arsyad (1999 :108) Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya-sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Sedangkan menurut Adisasmita (2008:32) Pembangunan ekonomi daerah berorientasi pada proses. Suatu proses yang melibatkan pembentukan institusi baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, dan transformasi pengetahuan.

Permasalahan ekonomi daerah banyak dibahas oleh tokoh-tokoh ekonomi. Ekonomi daerah biasanya disebut ekonomi regional. Menurut Glasson dalam Tarigan (2014:146) pertumbuhan regional dapat terjadi sebagai akibat dari penentu-penentu endogen ataupun eksogen, yaitu faktor-faktor yang terdapat di dalam daerah yang bersangkutan ataupun faktor-faktor di luar daerah, atau kombinasi dari keduanya. Penentu endogen, meliputi distribusi faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal sedangkan penentu eksogen adalah tingkat permintaan dari daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Tarigan (2014:46) mengungkapkan Faktor yang

menjadi perhatian utama dalam teori pertumbuhan ekonomi regional, yaitu : (1) Keuntungan Lokasi; (2) Aglomerasi Migrasi; (3) Arus lalu lintas modal antar wilayah.

Pembangunan ekonomi daerah tentu berhubungan langsung dengan daerah. Pengertian ditinjau dari aspek ekonomi menurut Arsyad (2010) daerah mempunyai tiga pengertian yaitu:

- a. Daerah homogen adalah suatu daerah dimana kegiatan ekonomi terjadi di berbagai pelosok ruang dan terdapat sifat-sifat yang sama, baik dari segi pendapatan perkapitanya, sosial budayanya, geografinya, dan sebagainya.
- b. Daerah nodal adalah suatu daerah sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi.
- c. Daerah perencanaan atau daerah administrasi adalah suatu daerah sebagai suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu provinsi, kabupaten, kecamatan, dan sebagainya.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi adalah suatu proses mengembangkan sektor-sektor yang berpotensi ekonomis untuk mempercepat hasil sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Pembangunan ekonomi nasional adalah membangun ekonomi secara umum yang diurus oleh negara. Adanya Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menjadikan daerah-daerah di Indonesia memiliki kewenangan untuk membangun ekonominya. Pembangunan ekonomi daerah atau regional adalah pengelolaan potensi-potensi yang bernilai ekonomis di wilayahnya masing-masing.

## 2. Teori Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi adalah suatu upaya peningkatan ekonomi dengan memaksimalkan fungsi sektor-sektor potensi ekonomi. Pembangunan ekonomi tak dapat lepas dari pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya. Tolak ukur pembangunan ekonomi diantaranya adalah pendapatan nasional, produk nasional (PNB), kesempatan kerja, perekonomian yang stabil, neraca pembayaran luar negeri dan yang terakhir adalah distribusi pendapatan yang merata. Berikut ini teori-teori pembangunan ekonomi:

### a. Teori Pusat Pertumbuhan (*Growth Pole*)

Menurut Tarigan (2014:162) Pusat pertumbuhan dapat diartikan dengan dua cara, yaitu secara fungsional, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu mendorong kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun ke luar. Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*), yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi disitu dan masyarakat senang datang ke lokasi tersebut. Suatu kota dikatakan sebagai pusat pertumbuhan apabila memiliki ciri-ciri pusat pertumbuhan yaitu sebagai berikut :

- 1) Adanya hubungan intern dari berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi  
Ada keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya sehingga apabila ada satu sektor yang tumbuh akan mendorong pertumbuhan

sektor lainnya karena saling terkait. Jadi, di dalam kehidupan kota tercipta sinergi untuk saling mendukung terciptanya pertumbuhan.

2) Adanya unsur pengganda (*multiplier effect*)

Keberadaan sektor-sektor yang saling terkait dan saling mendukung akan menciptakan efek pengganda. Artinya apabila ada permintaan satu sektor dari luar wilayah, peningkatan produksi sektor tersebut akan berpengaruh pada sektor lain. Peningkatan ini akan terjadi beberapa kali putaran pertumbuhan sehingga total kenaikan produksi dapat beberapa kali lipat dibandingkan dengan kenaikan permintaan di luar untuk sektor tersebut. Unsur efek pengganda mampu membuat kota memacu pertumbuhan.

3) Adanya konsentrasi geografis.

Konsentrasi geografis dari berbagai sektor atau fasilitas, selain menciptakan efisiensi di antara sektor-sektor yang saling membutuhkan juga meningkatkan daya tarik (*attractiveness*) dari kota tersebut. Orang yang tersebut bisa mendapatkan berbagai kebutuhan pada lokasi yang berdekatan. Jadi kebutuhan dapat diperoleh dengan lebih hemat biaya, dan tenaga.

4) Bersifat mendorong pertumbuhan daerah belakangnya.

Hal ini berarti antara kota dan wilayah belakangnya terdapat hubungan yang harmonis. Kota membutuhkan bahan baku dari wilayah belakangnya dan menyediakan berbagai kebutuhan wilayah belakangnya untuk dapat mengembangkan diri.

Jadi, konsentrasi ekonomi dapat dianggap sebagai pusat pertumbuhan apabila konsentrasi atau pemusatan dapat mempengaruhi (mempercepat) pertumbuhan ekonomi baik wilayah dalam ataupun wilayah luar.

b. Teori Basis Ekspor Richardson

Teori Basis Ekspor Richardson dianjurkan pertama kali oleh Tiebout.

Teori ini membagi jenis pekerjaan yang terdapat di dalam satu wilayah menjadi dua, yaitu pekerjaan dasar (basis) dan pelayanan (non basis). Tarigan (2014:55) menjelaskan bahwa pekerjaan basis adalah kegiatan yang tidak terikat pada kondisi internal perekonomian dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya. Sedangkan pelayanan (non basis) adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri. Perbedaan teori antara

Richardson dan Tiebot adalah dari sudut pandangnya. Richardson melihat dari segi pengeluarannya sedangkan Tiebot melihat dari segi produksi.

Teori Basis Ekspor membuat asumsi pokok bahwa ekspor adalah satu-satunya unsur eksogen (*dependen*) terhadap pendapatan. Artinya semua unsur pengeluaran terikat oleh pendapatan. Peningkatan ekspor berarti meningkatkan pendapatan. dalam arti lain satu-satunya yang bisa meningkat secara bebas adalah ekspor. Asumsi kedua adalah bahwa fungsi pengeluaran dan fungsi impor bertolak dari titik nol sehingga tidak akan berpotongan.

Model teori basis sangat sederhana sehingga memiliki kelemahan.

Menurut Tarigan (2017: 57-58) kelemahan teori basis adalah sebagai berikut :

- 1) Menurut Richardson, besarnya basis ekspor adalah fungsi terbalik dari besarnya suatu daerah. Artinya, makin besar suatu daerah, ekspornya semakin kecil apabila dibandingkan dengan total pendapatan, demikian pula impornya.
- 2) Ekspor jelas bukan satu-satunya faktor yang bisa meningkatkan pendapatan daerah.
- 3) Dalam studi suatu wilayah maka multiplier basis yang diperoleh adalah rata-ratanya dan bukan perubahannya.
- 4) Beberapa pakar berpendapat bahwa apabila pengganda basis digunakan sebagai alat proyeksi maka masalah time-lag (masa tenggang) harus diperhatikan.
- 5) Ada studi lainnya yang menunjukkan bahwa ada wilayah yang tetap berkembang pesat walaupun ekspor wilayahnya relatif kecil.

#### c. Model Von Thunen

Von Thunen mengungkapkan tentang perbedaan lokasi dari berbagai kegiatan pertanian atas dasar perbedaan sewa tanah (pertimbangan ekonomi).

Asumsi model Von Thunen dalam Tarigan (2007:138) adalah sebagai berikut :

- 1) Wilayah analisis bersifat terisolir (*isolated state*) sehingga tidak terdapat pengaruh pasar dari kota lain.
- 2) Tipe permukiman adalah padat di pusat wilayah (pusat pasar) dan makin kurang padat apabila menjauh dari pusat wilayah.



- 3) Seluruh wilayah model memiliki iklim, tanah dan topografi yang seragam.
- 4) Fasilitas pengangkutan adalah primitif (sesuai pada zamannya) dan relatif seragam. Ongkos ditentukan oleh berat barang yang dibawa.
- 5) Kecuali perbedaan jarak ke pasar, semua faktor alamiah yang mempengaruhi penggunaan tanah adalah seragam dan konstan.

Perkembangan dari model Von Thunen adalah selain harga tanah tinggi di pusat kota dan akan makin menurun apabila makin menjauh dari pusat kota. Harga tanah yang tinggi terletak pada jalan-jalan utama dan makin rendah bila makin menjauhi jalan utama. Makin tinggi kelas jalan utama makin tinggi pula biaya sewanya.

Dari pemaparan teori-teori ekonomi regional diatas dapat disimpulkan bahwa ekonomi regional mencakup kawasan suatu wilayah saja. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduknya sendiri. Model pertumbuhan pusat merupakan konsep pemusatan wilayah pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi wilayah lainnya. Pendapat terbesar di wilayah diperoleh dari tingkat ekspor yang besar. Dan harga tanah di desa dan kota berbeda. Harga tanah di kota cenderung mahal terutama di jalan-jalan utama.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode berasal dari Bahasa Inggris *method* yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Agar penelitian menghasilkan tujuan dilakukan penelitian maka harus menggunakan metode penelitian. Menurut Sugiono (2011:2) menjelaskan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan pernyataan tersebut terdapat empat aspek yang perlu diperhatikan dalam metode penelitian yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian adalah suatu indikator untuk menentukan alur pikir dan langkah-langkah dalam penelitian ilmiah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang berupaya mendeskripsikan atau menggambarkan suatu fenomena yang terjadi secara konkrit, benar, komplit dan sesuatu antara fakta dan teori tanpa mencari hubungan antara pengaruh dua variabel atau lebih. Jenis penelitian deskriptif ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2007:6) pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menjelaskan dan menggambarkan fakta mengenai implementasi kebijakan agropolitan berbasis komoditas unggulan.

## **B. Fokus penelitian**

Fokus penelitian adalah pengambilan batasan masalah pokok yang menjadi bahasan yang akan diteliti dan menjadi pusat perhatian. Menurut Moleong (2007:62-63) maksud ditetapkannya fokus penelitian adalah untuk: (1) penetapan fokus dapat membatasi studi dan (2) penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria-kriteria, inklusi-eksklusi atau masukan-mengeluarkan suatu informasi yang baru diperoleh dari lapangan. Jadi dengan adanya fokus penelitian, peneliti dapat membatasi masalah yang akan dibahas agar lebih spesifik sehingga dapat mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini, fokus penelitian tentang Implementasi Kebijakan Agropolitan Bebas Komoditas Unggulan di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan agropolitan dalam pengembangan kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan di kawasan agropolitan bawang merah Kecamatan Sukomoro
  - a. Kebijakan yang diidealkan
  - b. Kelompok sasaran
  - c. Badan-badan pelaksana
  - d. Unsur- unsur lingkungan yang mempengaruhi

2. Pembangunan ekonomi sebagai dampak pengembangan kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan di kawasan agropolitan bawang merah Kecamatan Sukomoro
3. Faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan dalam membangun ekonomi daerah di kawasan agropolitan bawang merah Kecamatan Sukomoro
  - a. Faktor pendukung
  - b. Faktor penghambat

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat yang diteliti oleh peneliti untuk memperoleh data dan informasi terkait topik yang akan dibahas. Adapun lokasi penelitian berdasarkan fokus penelitian adalah di Kabupaten Nganjuk. Lokasi ini dipilih karena ditetapkan sebagai kawasan agropolitan berdasarkan Surat Keterangan Gubernur Nomor 520/127/201.2/2009. Berdasarkan Surat Keterangan tersebut, Kecamatan Sukomoro ditetapkan sebagai kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan Kabupaten Nganjuk. Ditetapkannya Kecamatan Sukomoro berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk tahun 2010-2030 bahwa Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk ditetapkan sebagai kawasan Agropolitan dengan komoditas unggulan bawang merah.

Adapun situs penelitian adalah sebagai tempat dimana penulis mengkaji fenomena penelitian. Situs penelitian utama dalam penelitian ini antara lain :

1. Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
2. Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nganjuk

3. Kantor UPTD Pertanian Kecamatan Sukomoro
4. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kecamatan Sukomoro
5. Pasar Sentra Pengembangan Agropolitan (SPA) Sukomoro

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data adalah tipe-tipe data yang diperoleh sebagai bahan pendukung penelitian. Jenis data tersebut adalah sebagai berikut :

##### **1. Data Primer**

Menurut Sugiono (2011:225) Data primer yang diperoleh dari narasumber secara langsung. Data ini bisa dikumpulkan dengan observasi dan wawancara. Data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh langsung dari orang terkait atau informan dan peristiwa.

##### **2. Data Sekunder**

Menurut Sugiono (2011:225) data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder bersifat mendukung dan memperkuat data primer. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari arsip-arsip masalah terkait serta dokumentai.

Sumber data adalah asal data yang kita gali dalam penelitian sehingga kita bisa memperoleh data baik data primer maupun sekunder. Sumber data diperoleh melalui orang/informan, peristiwa dan dokumen. Dalam penelitian ini sumber data yang dimaksud adalah sebagai berikut:

##### **1. Orang/informan**

- a. Kasubid hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk.
- b. Staf sub bidang hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk.

- c. Kepala sub bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, Bappeda Kabupaten Nganjuk.
- d. Staff Dinas PU Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk
- e. Kepala UPTD Pertanian Sukomoro.
- f. Petugas Penyuluh Lapangan Kawasan Agropolitan Bawang Merah Sukomoro.
- g. Kelompok tani (poktan) bawang merah Putra Maju Kecamatan Sukomoro.

## 2. Peristiwa

- a. Koordinasi Pokja.
- b. Koordinasi kelembagaan Agropolitan.
- c. Rapat Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Agropolitan.
- d. Kegiatan jual beli di Pasar Pengembangan sentra Agropolitan.
- e. Kegiatan petani menanam, memanen dan menjual bawang merah.
- f. Kegiatan petani mengolah bawang merah pasca panen

## 3. Dokumen

- a. *Masterplan* Agropolitan Kabupaten Nganjuk tahun 2013
- b. Laporan akhir Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) Kawasan Agropolitan Kabupaten Nganjuk Tahun 2015-2019
- c. Laporan UPTD pertanian Kecamatan Sukomoro.
- d. Perda Nomor 02 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Nganjuk tahun 2010-2030.
- e. Dokumen Bappeda tentang Pengembangan Kawasan Agropolitan

- f. Dokumen Dinas Pertanian tentang pengembangan kawasan Agropolitan

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan peneliti dalam mencari dan memperoleh data dan informasi. Menurut Sugiono (2011:225) bahwa dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi (*participant observasi*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.

Dalam pengumpulan data penelitian ini, peneliti menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :

#### **1. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung terhadap peristiwa yang terjadi. Menurut Marshall dalam Sugino (2011:226) melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Adapun obyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah situasi dan kondisi terkait implementasi kebijakan agropolitan berbasis komoditas unggulan di Kecamatan Sukomoro, serta faktor pendukung dan penghambatnya.

#### **2. Wawancara**

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data dengan berbicara langsung dengan orang yang memiliki pengetahuan lebih terhadap fokus yang diteliti. Estrberg dalam Sugiono (2011:231) mendefinisikan wawancara sebagai pertemuan dua orang untuk

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik tertentu. Adapun informan sebagai narasumber terkait implementasi kebijakan agropolitan berbasis komoditas unggulan adalah sebagai berikut :

- a. Kasubid hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk.
- b. Staf sub bidang hortikultura Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk.
- c. Kepala sub bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, Bappeda Kabupaten Nganjuk.
- d. Staff Dinas PU Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk
- e. Kepala UPTD Pertanian Sukomoro.
- f. Petugas Penyuluh Lapangan Kawasan Agropolitan Bawang Merah Sukomoro.
- g. Kelompok tani (poktan) bawang merah Putra Maju Kecamatan Sukomoro.

### 3. Dokumentasi

Pengumpulan data dari arsip-arsip yang mendukung fokus penelitian disebut dokumentasi. Moleong (2007:217) menjelaskan bahwa dokumentasi sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Data yang terkait dokumen dalam implementasi kebijakan agropolitan berbasis komoditas unggulan adalah sebagai berikut :

- a. *Masterplan* Agropolitan Kabupaten Nganjuk tahun 2013



- b. Laporan akhir Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) Kawasan Agropolitan Kabupaten Nganjuk Tahun 2015-2019
- c. Laporan UPTD pertanian Kecamatan Sukomoro.
- d. Dokumen Bappeda tentang Pengembangan Kawasan Agropolitan
- e. Dokumen Dinas Pertanian tentang pengembangan kawasan Agropolitan

## **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti untuk mendukung pengumpulan data agar pekerjaannya lebih mudah. Menurut Arikunto (2006:160) instrumen penelitian sebagai alat-alat fasilitas yang dipergunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.

Adapun instrumen yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Peneliti sendiri**

Dalam mencari data menggunakan instrumen peneliti sendiri berarti penulis sebagai instrumen pengamat melakukan penggalan data dengan menggali fenomena atau mencatat fenomena terkait masalah yang diteliti.

### **2. Pedoman wawancara (*interview guide*)**

Instrumen ini digunakan sebagai pedoman untuk melakukan wawancara dalam pengumpulan data. Menurut Moleong (2007:187) petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk secara garis besar

tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup.

### 3. Catatan lapangan (*field notes*)

Catatan lapangan adalah alat yang digunakan mencatat informasi selama penelitian berlangsung. Catatan lapangan menurut Bogdan dan Biken dalam Moleong (2007:209) adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.

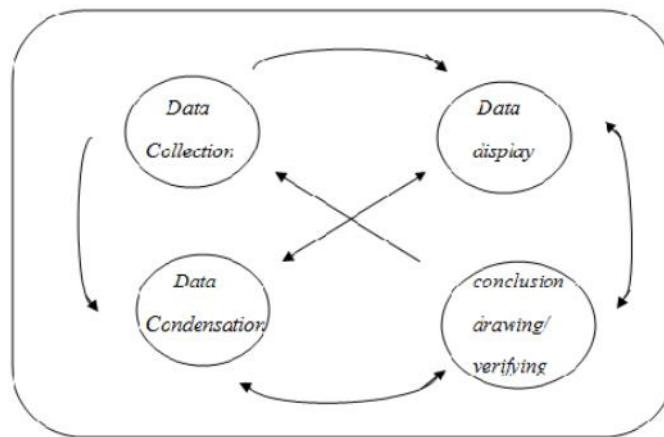
## **G. Analisis data**

Analisis data adalah proses pengolahan data dimana data-data yang diperoleh dari lapangan disusun menjadi bentuk deskriptif antara praktek dan teori sehingga bisa ditemukan titik temu permasalahan. Menurut Moleong (2007:13) bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurut data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Terkait definisi analisis data, Sugiono (2011:244) menjelaskan bahwa :

“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain”.

Dalam prinsip analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data teknik analisis yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014:14)

mencakup empat alur analisis, yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verifying*)



Gambar 4 . Komponen dalam analisis data (*interactive model*)  
 Sumber: Miles, Huberman & saldana (2014:14)

Penjelasan dari gambar diatas komponen analisis data diatas adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data (*Data collection*)

Pengumpulan Data merupakan proses mencari dan mengumpulkan data berdasarkan tehnik-tehnik yang telah dijelaskan diatas yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dari sumber-sumber data yang sesuai dengan kebutuhan data fokus penelitian. Terkait implementasi kebijakan agropolitan berbasis komoditas unggulan bentuk pengumpulan data melalui observasi, wawancara serta dokumentasi.

2. Kondensasi data (*Data condensation*)

Kondensasi data adalah proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Kondensasi

data berlangsung selama penelitian dilakukan. Kondensasi data merupakan rangkaian pemusatan pikiran terhadap tahap-tahap penelitian yang dilakukan dari data-data yang diperoleh.

### 3. Penyajian data (*Data display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, penyajiannya harus tertata secara baik. Penyajian data merupakan bagian analisis, bahkan mencakup pula penyajian data.

### 4. Penarikan kesimpulan/ verifikasi (*Conclusion drawing/verifying*)

Penarikan kesimpulan merupakan penggambaran kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan dari awal pengumpulan data di lapangan. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. Dalam tahap ini, peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkat sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelompokan data yang terbentuk dan proposisi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap dengan temuan baru yang berbeda dengan temuan yang ada.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi dan Kawasan Agropolitan**

##### **1. Gambaran umum Kabupaten Nganjuk**

###### **a. Sejarah Kabupaten Nganjuk**

Kabupaten Nganjuk adalah sebuah kabupaten yang terletak di Jawa Timur. Nganjuk adalah salah satu kabupaten tertua di Jawa Timur setelah Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri, Kota Kediri dan Kabupaten Pasuruan. Nganjuk didirikan pada tanggal 10 April 937 Masehi dengan demikian Nganjuk telah berusia 1.078 tahun pada bulan April 2015. Sejarah Kabupaten Nganjuk tidak terlepas dari prasasti Anjuk Ladang yang merupakan asal nama Nganjuk. Anjuk Ladang dalam bahasa Jawa Kuno berarti tanah kemenangan. Prasasti ini dibangun oleh Mpu Sidok pada tahun 937 Masehi sebagai penghargaan kepada penduduk Anjuk Ladang atas jasa-jasanya melawan penjajah.

Cikal bakal Kabupaten Nganjuk tidak terlepas dari perjalanan sejarah Kabupaten Berbek. Dikutip dari website Pemerintah Kabupaten Nganjuk bahwa alur Sejarah Kabupaten Nganjuk adalah berangkat dari keberadaan Kabupaten Berbek dibawah kepemimpinan Raden Toemenggoeng Sosrokoesoemo. Setelah KRT Sosrokoesoemo meninggal dunia tahun 1760 sebagai penggantinya adalah KRT Sosrodirdjo. Mendekati tahun 1811, Kabupaten Berbek pecah menjadi 2(dua), yaitu Kabupaten Berbek dan Kabupaten Godean. Bupati Godean adalah Raden Mas Toemenggoeng Sosronegoro II.

Perkembangan selanjutnya, sebagai tindak lanjut perjanjian Sepreh tahun 1830, yaitu adanya rencana penataan kembali daerah-daerah dibawah pengawasan dan kekuasaan *Nederlandsch Gouvernement*, dengan SK 31 agustus 1830, ditetapkan bahwa Kabupaten Godean, dinyatakan dicabut dan selanjutnya digabung dengan Kabupaten Berbek (yang terdekat). Begitu juga Kabupaten kertosono bergabung dengan Kabupaten Berbek. Menurut Akte Komisaris daerah-daerah Kraton yang telah diambil alih tanggal 16 Juni 1831, bahwa di Kabupaten Berbek terdapat 3 (tiga) distrik yaitu Berbek, Goden, Siwalan, di Kabupaten Nganjuk ada 2 (dua) distrik yaitu Ngandjoek, Gemenggendan Kabupaten Kertosono ada 3 (tiga) distrik yaitu Kertosono, Waroe Djajeng, Lengkong sehingga jumlah keseluruhan ada 8 (delapan) distrik. Berdasarkan akte Komisaris daerah-daerah Keraton yang telah diambil alih dan ditandatangani oleh Van Lawick Van Pabst tanggal 16 juni 1831 di Semarang, ditunjuk sebagai Bupati Berbek adalah KRT Sosrokoesoemo II.

Tanggal 27 Agustus 1852 KRT Sosrokoesoemo II meninggal dunia dan sebagai gantinya ditunjuk Raden Ngabehi Pringgodikdo, patih dari luar Kabupaten Ngrowo, yang bukan termasuk garis keturunan atau keluarga dari KRT Sosrokoesoemo II. Pengangkatan Pringgodikdo sebagai bupati yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jendral *Nederlandsch India* di Batavia, tanggal 25 November 1852. Raden Ngabehi Pringgodikdo menjabat sebagai Bupati Berbek lebih kurang 14 tahun, yaitu sampai dengan tahun 1866. Setelah itu digantikan oleh Raden Ngabehi Soemowilojo, patih dari kadipaten Blitar dengan SK Gubernur Jendral *Nederlandsch Indie* tanggal 3 September 1866

No. 10. Raden Ngabehi Soemowilojo meninggal dunia tanggal 22 Februari 1878. Untuk menduduki jabatan Bupati Berbek yang kosong tersebut telah diangkat Raden Mas Sosrokoesoemo III, Wedono dari *Nederlandsch Indie* tanggal 10 april 1878 No.9 menjadi Bupati Berbek. Masa pemerintahan Raden Toemenggoeng Sosrokoesoemo III inilah terjadi suatu peristiwa perpindahan pusat pemerintahan dari Kota Berbek menuju Kota Nganjuk. Hingga sekarang pusat pemerintahan berada di Kota Nganjuk.



Gambar 5. Pendopo Nganjuk tahun 1860  
 Sumber: [www. Ngajukkab.go.id](http://www.Ngajukkab.go.id)

#### b. Keadaan Geografi

Secara Astronomis Nganjuk terletak diantara  $7^{\circ} 20'$  -  $7^{\circ} 50'$  Lintang Selatan dan  $111^{\circ} 45'$  -  $112^{\circ} 13'$  Bujur Timur. Sedangkan secara geografis wilayah Nganjuk bagian utara dibatasi oleh Pegunungan Kendeng dengan ketinggian 60 m sampai dengan 300 m, bagian barat daya merupakan Pegunungan Wilis dengan ketinggian antara 1000 m sampai dengan 2.300 m, sedangkan daerah tengah

merupakan dataran rendah dengan ketinggian 60 m sampai 140 m diatas permukaan laut. Sedangkan Batas-batas Kabupaten Nganjuk sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Madiun, sebelah utara dengan kabupaten Bojonegoro, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kediri dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Trenggalek.

Lokasi Kabupaten Nganjuk berada di sebelah selatan khalutistiwa. Hal ini secara langsung mempengaruhi perubahan iklim. Perubahan iklim yang terjadi mengikuti perubahan iklim di daerah-daerah lain yang mengikuti perubahan putaran 2 iklim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan yang relatif tinggi terjadi pada bulan Januari dan Pebruari, sedangkan curah hujan relatif rendah terjadi pada bulan Juli (BPS 2014).

Sebagian besar kecamatan berada pada dataran rendah dengan ketinggian antara 46 – 95 m diatas permukaan laut, sedangkan tiga kecamatan lainnya berada pada daerah pegunungan Wilis yang terletak pada ketinggian 150-750 m diatas permukaan laut. Nganjuk memiliki kondisi dan struktur tanah yang cukup produktif untuk berbagai jenis tanaman, baik tanaman pangan maupun tanaman perkebunan sehingga mampu menunjang pertumbuhan ekonomi di bidang pertanian. Kabupaten Nganjuk terbagi menjadi tiga bagian lahan, yaitu 35% lahan sawah, 27% lahan kering dan 38% lahan hutan. Lahan sawah adalah lahan yang digunakan untuk bertanam padi sawah, baik terus-menerus sepanjang tahun maupun bergiliran dengan tanaman palawija, lahan kering adalah tanah yang digunakan untuk usaha pertanian membutuhkan air dalam jumlah yang



terbatas karena rendahnya curah hujan dan tlahan hutan adalah lahan yang berkembang di bawah pengaruh lingkungan hutan.

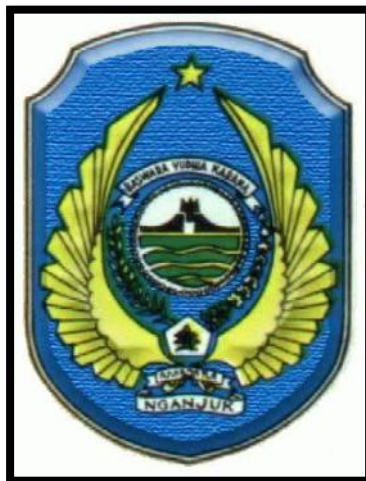
Kondisi dan struktur tanah yang produktif ditunjang adanya Sungai Widas di sebelah utara yang mengalir sepanjang 91 km melalui Kecamatan Wilangan, Bagor, Gondang, Lengkong, dan patianrowo dengan debit air  $260.871\text{m}^3/\text{detik}$  dan Sungai Brantas di sebelah Timur dengan luas daerah pengairan sebesar  $122.845\text{ km}^2$  yang mengalir sepanjang Kecamatan Pace, Prambon, Ngronggot dan Kertosono. Letak Nganjuk yang diapit dua gunung yaitu Gunung Wilis dan Gunung Kendeng serta berada antara Sungai Widas dan Sungai Brantas membuat hembusan angin yang melewati Kota Nganjuk menjadi kencang. Hal itu membuat Kabupaten Nganjuk dijuluki sebagai *Kota angin*. Kabupaten Nganjuk telah sukses dan berhasil dalam program kebersihan dan pengelolaan lingkungan perkotaan sehingga mendapat penghargaan sebagai *Kota Adipura* selama tujuh tahun berturut-turut dari tahun 2009 hingga tahun 2015. Adipura adalah suatu penghargaan untuk Kota atau Kabupaten seluruh Indonesia yang diselenggarakan dibawah koordinasi kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

#### c. Makna Lambang

Lambang daerah Kabupaten Nganjuk mengandung arti “Dengan semangat dan jiwa proklamasi 17-08-45 rakyat Nganjuk yang telah tumbuh dan berkembang sejak tahun 937 M, bersama Pemerintah daerah yang berwibawa bertekad bulat untuk berjuang terus dengan segala potensi daerahnya, sehingga tercapai cita-cita luhur, masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan

UUD 1945. Lambang Daerah Kabupaten Nganjuk terdiri atas 4 (empat) bagian, yaitu :

- 1) Dasar lambang;
- 2) Bagian atas, berisi gambar bintang bersudut lima;
- 3) Bagian tengah dan samping berisi gambar-gambar sebagai berikut:
  - a) Pita bertuliskan Motto “BASWARA YUDHIA KARANA”
  - b) Rantai berbentuk lingkaran
  - c) Gunung dan air terjun
  - d) Sawah dan sungai
  - e) Padi dan kapas
  - f) Pohon beringin dalam segilima beraturan
  - g) Sayap
- 4) Bagian bawah berisi pita bertuliskan angka jawa dan pita bertuliskan NGANJUK.



Gambar 6. Logo Kabupaten Nganjuk  
*Sumber: [www.Nganjukkab.go.id](http://www.Nganjukkab.go.id)*

Secara garis besar, makna lambang daerah kabupaten Nganjuk tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Perisai bersudut lima berdasar biru dan bertepi putih melambangkan jiwa kerakyatan, kesetiaan dan kesucian masyarakat Nganjuk yang selalu siaga daam menghadapi segala tantangan. Bintang bersudut lima berwarna emas melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa, cita-cita luhur dan suci sebagai edoman perujangan untuk mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur. Motto “BASWARA YUDHIA KARANA” artinya “cemerlang karena perjuangan”.
- 2) Rantai berbentuk lingkaran melambangkan kebulatan tekad rakyat Nganjuk, yang dilandasi semangat perjuangan dan persatuan. Tiga puncak gunung berwarna hitam memiliki arti filosofis Tri Dharma Amerta dan secara historis menunjukkan Jaman Kejayaan Nasional, jaman Penjajahan dan jaman Kemerdekaan. Gunung melambangkan sumber kekayaan alam air terjun Sedudo sebagai air suci pemberian Tuhan Yang Maha esa, yang merupakan rahmat untuk dinikmati oleh umat-Nya. Sawah mengandung makna kemakmuran dan sungai bermakna kesuburan. Gunung berpuncak tiga, sawah dan sungai digambarkan dalam rantai yang berbentuk lingkaran yang bermakna: Dengan tekad yang bulat dan kekayaan alam yang melimpah memberikan keyakinan kepada masyarakat Nganjuk untuk berjuang mewujudkan tercapainya masyarakat adil dan makmur.

3) Padi dan kapas melambangkan pangan dan sandng yang menjadi kebutuhan pokok rakyat sehari-hari. Padi berjumlah 17 butir, kapas 8 buah, daun padi 4 helai, daun kapas 5 helai mencerminkan semangat dan jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Pohon beringin berdaun lima kelompok dalam segi lima beraturan bermakna pengayman, perlindungan dan perdamaian, serta juga menggambarkan adanya lima wilayah kerja pembantu bupati. Sayap dengan 20 helai bulu berwarna emas mlambangkan wilayah daerah terdiri dari 20 kecamatan. Pita bertuliskan angka jawa yang mengikat dua pangkat sayap mewujudkan angka 937 M yang merupakan tahun hari jadi Nganjuk.

#### d. Pembagian Administratif

Berdasarkan Nganjuk Dalam Angka Tahun 2014 bahwa jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2013 adalah 1.033.597 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Nganjuk tahun 2013 adalah 844 jiwa/km<sup>2</sup> dengan luas daratan total adalah 1.224,33 km<sup>2</sup> (BPS, 2014). Secara Administratif Kabupaten Nganjuk dibagi atas 284 desa dan kelurahan serta 20 kecamatan, yaitu :

- 1) Kecamatan Rejoso
- 2) Kecamatan Ngluyu
- 3) Kecamatan Gondang
- 4) Kecamatan Lengkong
- 5) Kecamatan Jatikalen
- 6) Kecamatan Patianrowo

- 7) Kecamatan Baron
- 8) Kecamatan Kertosono
- 9) Kecamatan Tanjunganom
- 10) Kecamatan Ngronggot
- 11) Kecamatan Prambon
- 12) Kecamatan Pace
- 13) Kecamatan Loceret
- 14) Kecamatan Berbek
- 15) Kecamatan Ngetos
- 16) Kecamatan Sawahan
- 17) Kecamatan Nganjuk
- 18) Kecamatan Sukomoro
- 19) Kecamatan Bagor
- 20) Kecamatan Wilangan

Penduduk Kabupaten Nganjuk 99% memeluk agama islam, sisanya memeluk agama Kristen Protestan 0,6%, Katolik 0,2%, Hindu 0,04%, Budha 0,03%, Konghuchu 0,001% dan lainnya sebesar 0,003% (BPS 2014). Tempat-tempat ibadah tersebar di seluruh daerah di Kabupaten Nganjuk. Masjid dan gereja terdapat di seluruh kecamatan, Sedangkan Pura terletak di Kecamatan Loceret dan Klenteng terdapat di Kecamatan Kertosono dan Sukomoro. Bangunan tempat ibadah yang bersejarah di Kabupaten Nganjuk adalah Masjid AL-Mubarak di Kecamatan Berbek yang didirikan oleh KRT Sosrokoesoemo (Kandjeng Jimat) bupati pertama Kabuaten Nganjuk pada Tahun 1758 Masehi.

Bahasa sehari-hari masyarakat Nganjuk adalah Bahasa Jawa dengan logat “medhok”. Nganjuk dikenal memiliki dialek khas Jawa yang ditekan untuk menunjukkan sesuatu yang sangat misalnya, kata “adoh” yang berarti jauh diucapkan “uadoh” yang berarti sangat jauh, “adem” yang berarti dingin diucapkan “uadem” yang berarti sangat dingin dan contoh lain. Selain itu kata “he’eh” yang berarti iya menjadi salah satu khas bahasa masyarakat Nganjuk.

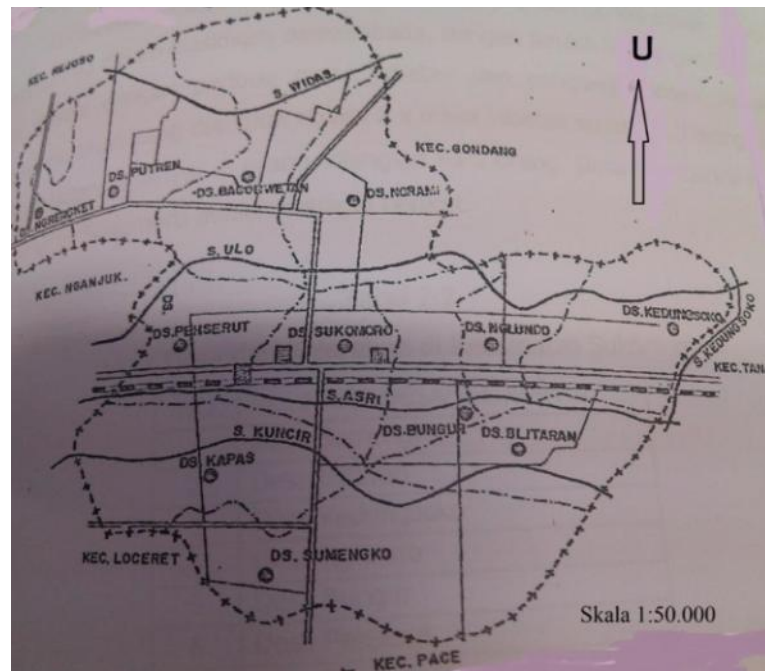
## **2. Gambaran Umum kawasan Agropolitan Kecamatan Sukomoro**

### **a. Kondisi Geografis**

Kecamatan Sukomoro mempunyai luas 25,38 Km<sup>2</sup> dengan batas sebelah utara Kecamatan Gondang, sebelah timur Kecamatan Tanjunganom, sebelah selatan Kecamatan Loceret dan sebelah barat Kecamatan Nganjuk. Dilihat dari Topografi Kecamatan Sukomoro berada pada ketinggian rata-rata 54 m diatas permukaan air laut. Luas lahan sebesar 3.186,31 Ha. Luas lahan ini dikelompokkan menjadi dua yaitu lahan sawah dengan luas 2.646,30 Ha dan lahan kering 540,01 Ha.

Jenis tanah yang ada di Kecamatan Sukomoro adalah tanah Aluvial dan Regosol. Tingkat curah hujan selama tahun 2014 rata-rata sebesar 1.205 mm dan haru hujan rata-rata sebanyak 53 hari (BPS, 2014). Lokasi Sukomoro sangat potensial untuk dikembangkan menjadi Kawasan Agropolitan. Salah satu keunggulan Sukomoro adalah lokasinya yang strategis berada di jalur utama transportasi lintas provinsi dan merupakan jalan nasional sepanjang 114 km.

b. Pembagian Administratif



Gambar 7. Peta Administratif Kecamatan Sukomoro

*Sumber: Dokumentasi Penulis*

Kecamatan Sukomoro terdiri atas 10 desa dan 2 kelurahan yang semuanya dalam klasifikasi swasembada. Jumlah lingkungan sebanyak 88 Rukun Warga (RW). Desa dan kelurahan di Kecamatan Sukomoro adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Nama Desa dan Kelurahan di Kecamatan Sukomoro

No.	NAMA DESA/KELURAHAN	No.	NAMA DESA/KELURAHAN
1.	Desa Sumengko	7.	Desa Ngrami
2.	Desa Blitaran	8.	Kelurahan Sukomoro
3.	Desa Kedugsoko	9.	Kelurahan Kapas
4.	Desa Nglundo	10.	Desa Bagorwetan
5.	Desa Bungur	11.	Desa Putrean
6.	Desa Pehserut	12.	Desa Ngrenget

*Sumber: Nganjuk dalam Angka (2014)*

Jumlah penduduk di Kecamatan Sukomoro pada tahun 2013 adalah 42.194 jiwa dengan kepadatan 1.192 jiwa/km<sup>2</sup>. Jumlah laki-laki sebanyak 21.156 jiwa dan perempuan 21.038 jiwa dengan *sex ratio* 100,56. Kontribusi penduduk di Kecamatan Sukomoro adalah 4,08% dari jumlah penduduk Kabupaten Nganjuk.

### 3. Profil Komoditas Unggulan

Kecamatan Sukomoro memiliki tanah sawah seluas 4.124 Ha. Sesuai dengan jenis pengairan yang dipergunakan luas sawah tersebut terbagi atas sawah teknis dan sawah sederhana/tadah hujan atau tidak diusahakan. Terkait pengembangan kawasan Agropolitan berbasis komoditas unggulan, maka terdapat beberapa komoditas pertanian yang menjadi komoditas unggulan. Penentuan komoditas unggulan dihitung menggunakan Model analisa *Location Quotient* (LQ).



Gambar 8. Lahan Bawang Merah Desa Kapas Kecamatan Sukomoro  
*Sumber : Dokumentasi Penulis*

LQ mengukur konsentrasi relatif atau derajat spesialisasi kegiatan ekonomi melalui pendekatan perbandingan besarnya peranan suatu sektor/industri di suatu



daerah terhadap besarnya peranan sektor/industri dengan nilai satu. Dari hasil perhitungan hasil panen bawang merah pada tahun 2014 didapat bahwa LQ bawang merah =1,05, dengan demikian bawang merah menjadi basis komoditas unggulan. Penilaian basis bawang merah sebagai komoditas unggulan adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Penilaian Basis Komoditas Unggulan Bawang Merah Kecamatan Sukomoro

<b>Nama Desa</b>	<b>Produk bawang merah (kw)</b>	<b>Proporsi kecamatan</b>	<b>Score</b>
Sumengko	0	0.000%	0
Blitaran	1840	1.063%	0.0026579
Kedungsongko	3220	1.861%	0.00465132
Nglundo	11938	6.898%	0.01724457
Bungur	31008	17.917%	0.04479138
Pahserut	21875	12.639%	0.03159867
Ngrami	46426	26.825%	0.06706285
Sukomoro	24650	14.243%	0.03560719
Kapas	4114	2.377%	0.00594272
Bagor wetan	13490	7.795%	0.01948645
Putrean	14508	8.383%	0.02095696
Ngrengket	0	0.000%	0

*Sumber: Masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Nganjuk 2013*

#### **4. Profil Kebijakan Agropolitan**

##### **a. Latar Belakang**

Era globalisasi yang mengakibatkan perubahan lingkungan yang menuntut peningkatan daya saing agar mampu berkompetisi secara global. Karena persaingan yang semakin ketat maka masyarakat baik individu ataupun

organisasi harus memiliki daya saing yang berkelanjutan. Daya saing yang tinggi dapat diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Apabila masyarakat memiliki kualitas yang baik serta memiliki daya saing yang berkelanjutan maka masyarakat dapat mengembangkan potensi daerahnya sehingga mampu bersaing secara global.

Pengembangan dan pembangunan potensi daerah dilakukan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Setiap daerah memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai kondisi masing-masing sehingga pengembangan dan pembangunan setiap daerah tidak sama. Perbedaan potensi pembangunan daerah tersebut mengakibatkan pembangunan yang tidak merata sehingga terjadi ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi. Ketidakmerataan pembangunan dapat dilihat pada pembangunan perkotaan dan perdesaan yang memiliki tingkat perekonomian yang berbeda. Pada perkotaan pertumbuhan ekonomi cenderung tinggi karena didukung infrastuktur-infrasturktur di berbagai sektor sedangkan pertumbuhan ekonomi di perdesaan cenderung rendah karena hanya memiliki potensi pertanian dengan fasilitas-fasilitas yang kurang mendukung sehingga masyarakat perdesaan kurang sejahtera.

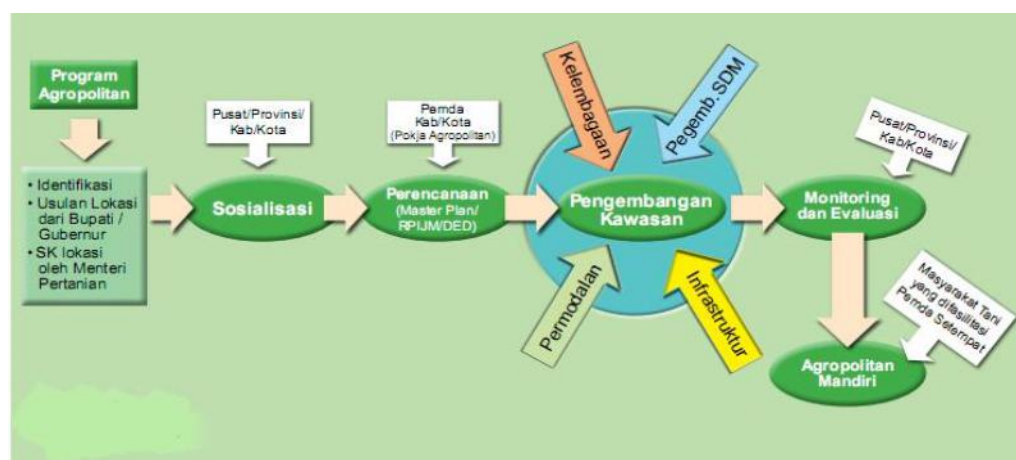
Sektor pertanian merupakan fundamental ekonomi di Indonesia karena merupakan penyumbang terbanyak angkatan kerja. Data BPS (2013) menunjukkan bahwa pekerja sektor pertanian mencapai 39,96 juta orang atau 35,05% dari seluruh jumlah angkatan kerja. Namun pembangunan sektor pertanian kurang diperhatikan sehingga ketidakseimbangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan masih terjadi. Hal tersebut mengakibatkan

munculnya berbagai masalah pembangunan pertanian, diantaranya adalah tingginya alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian, kepemilikan lahan pertanian yang semakin menyempit, kurangnya infrastruktur perdesaan, rendahnya daya saing produk dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat perdesaan.

Ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi antara wilayah perkotaan dan perdesaan tersebut mendorong pemerintah untuk mengupayakan pemerataan dan keberimbangan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan desentralisasi ekonomi. Asas tersebut memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensi-potensi wilayah dengan baik sehingga wilayah perdesaan dapat meningkatkan ekonomi dan mampu memberikan kehidupan lebih baik bagi mayoritas masyarakat perdesaan. Upaya-upaya untuk meningkatkan ekonomi perdesaan dilakukan dengan penguatan sektor pertanian dengan mewujudkan kemandirian pembangunan perdesaan yang didasarkan pada potensi wilayah desa itu sendiri.

Pengembangan kawasan potensial dengan basis perdesaan sebagai pusat pertumbuhan akan mengubah perdesaan menjadi kota pertanian yang disebut agropolitan. Agropolitan menjadi alternatif pembangunan pertanian yang mampu mendorong perekonomian daerah pada tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi yang berbasis pada potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Secara internal, Kawasan Agropolitan terdiri dari kota-kota pertanian dan desa-desa sentra produksi pertanian. Kawasan ini tidak dibatasi oleh batasan administratif pemerintahan (desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota).

Melainkan, disesuaikan dengan memperhatikan skala ekonomi kawasannya sehingga dirasakan lebih fleksibel. Dengan demikian, bentuk dan luasan Kawasan Agropolitan dapat meliputi satu desa/kelurahan, kecamatan, atau beberapa kecamatan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota. Kawasan ini dapat pula meliputi wilayah yang menembus wilayah Kabupaten/Kota lain yang berbatasan. Dari sisi eksternal, Kawasan Agropolitan harus memiliki aksesibilitas dengan kota-kota berjenjang lebih tinggi di sekitarnya untuk menciptakan sebuah sistem pemasaran yang terpadu. Pada dasarnya, perdesaan yang menjadi sasaran lokasi pengembangan Kawasan Agropolitan adalah yang memiliki komoditi unggulan pertanian, seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Mekanisme pengajuan usulan agropolitan adalah sebagai berikut :



Gambar 9. Mekanisme Penyelenggaraan Agropolitan

Sumber : Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur

Sejak efektif dilaksanakan pada tahun 2002, pengembangan Kawasan Agropolitan telah berhasil memfasilitasi tak kurang dari 382 kawasan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan komoditas-komoditas unggulannya, baik kawasan baru maupun lanjutan. Pengembangan dilaksanakan melalui

penyediaan infrastruktur desa yang memadai dan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Pengadaan infrastruktur juga ditujukan bagi peningkatan produktivitas, pengolahan, serta pemasaran hasil pertanian.

b. Sejarah Agropolitan Kabupaten Nganjuk

Pengembangan kawasan Agropolitan Kabupaten Nganjuk dimulai sejak turunnya Surat Keterangan Gubernur Nomor 188 tentang penetapan Kabupaten Nganjuk sebagai lokasi agropolitan oleh Gubernur Jawa Timur. Setelah itu disusun roadmap agropolitan dengan menilai (*scoring*) produk untuk penetapan komoditas serta identifikasi kawasan. Hasilnya didapat komoditas sebagai berikut :

- 1) Padi
- 2) Bawang merah
- 3) Ikan air tawar
- 4) Sapi
- 5) Itik

Serta kawasan terpilih adalah kecamatan Sukomoro dan Kecamatan Nganjuk. Setelah menentukan kawasan dan komoditas, pada tanggal 29 Januari 2009 gubernur mengeluarkan surat keputusan penetapan lokasi yaitu SK. Gubernur Nomor 520/127/201.2/2009 tentang penetapan lokasi. Selanjutnya dibentuk kelompok kerja (pokja) serta penyusunan *masterplan* program pengembangan kawasan agropolitan Kabupaten Nganjuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188/122/K/411.013/2009.

Pengembangan Kawasan Agropolitan diperkuat dengan penyusunan *Masterplan* tahun 2009. Selanjutnya pada tahun 2013 dilakukan master review komoditas serta kawasan. Dilakukan identifikasi serta *scoring* produk hingga didapat komoditas unggulan bawang merah serta komoditas pendukung padi, kedelai, jagung, sapi potong, kambing dan domba dan ayam buras. Kawasan agropolitan diperluas menjadi empat kecamatan, yaitu kecamatan Sukomoro, Kecamatan Bagor, Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Gondang. Selanjutnya disusun *masterplan* kawasan agropolitan tahun 2013 dengan mengacu *masterplan* tahun 2009. *Masterplan* tersebut menjadi acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kawasan Agropolitan Kabupaten Nganjuk Tahun 2015-2019.

c. Kawasan dan Komoditas Agropolitan Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan *masterplan* kawasan agropolitan tahun 2013, kawasan agropolitan Kabupaten Nganjuk berada di empat kecamatan, yaitu kecamatan Sukomoro, Kecamatan Rejoso, Kecamatan Bagor dan Kecamatan Gondang.



Gambar 10. Kawasan Agropolitan Kabupaten Nganjuk  
 Sumber: *Masterplan Kawasan Agropolitan Kabupaten Nganjuk Tahun 2013*.

Berdasarkan dokumen Rencana tata Ruang dan rencana Tata Wilayah Kabupaten Nganjuk, serta *Masterplan* pengembangan Wilayah Agropolitan Jawa Timur maka komoditas pertanian utama Kabupaten Nganjuk yang menjadi fokus pengembangan Agropolitan dapat dilihat pada berikut:

Tabel 5. Komoditas Pertanian Unggulan (Utama dan Pendamping) Pengembangan Agropolitan Kabupaten Nganjuk

No.	Komoditas	Subsektor	Keterangan
1.	Bawang Merah	Tanaman pangan hortikultura	Kab. Nganjuk merupakan daerah penghasil terbesar ke-2 Nasional
2.	Padi	Tanaman pangan & palawija	Sektor basis di tingkat provinsi
3.	Kedelai	Tanaman pangan & palawija	Sektor basis di tingkat provinsi
4.	Sapi Potong	Peternakan	Sektor basis di tingkat provinsi
5.	Kambing& Domba	Peternakan	Sektor basis di tingkat provinsi
6.	Ayam Buras	Peternakan	Sektor basis di tingkat provinsi
7.	Jagung	Tanaman pangan & palawija	Komoditas penting yang akan dikembangkan di Kab. Nganjuk

Sumber: BPS 2012

#### d. Visi dan Misi Pengembangan Kawasan Agropolitan

##### 1) Visi

Visi dari gerakan pengembangan kawasan Agropolitan Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

**“Terwujudnya kawasan pertanian modern sebagai penggerak perekonomian perdesaan yang mampu mensejahterakan masyarakat”**

## 2) Misi

Misi dari gerakan pengembangan kawasan agropolitan adalah sebagai berikut :

- a) Menumbuh kembangkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian;
- b) Membuka lapangan pekerjaan baru khusus bagi masyarakat perdesaan sehingga dapat mengurangi urbanisasi;
- c) Meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan;
- d) Mewujudkan tataruang ideal antara perkotaan dan perdesaan yang saling mendukung, melengkapi dan memperkuat.

## e. Tujuan Agropolitan

Secara umum tujuan agropolitan adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing berbasis kerakyatan, berkelanjutan (tidak merusak lingkungan) dan wewenwng berada di pemerintah daerah dan masyarakat pada kawasan Agropolitan. Secara khusus kebijakan Agropolitan bertujuan untuk :

- 1) Mengurangi kesenjangan kesejahteraan antar wilayah;
- 2) Mengurangi kesenjangan antara kota dan desa;
- 3) Mengurangi kesenjangan pendapatan antar masyarakat;
- 4) Mengurangi kemiskinan;
- 5) Mencegah terjadinya urbanisasi tenaga produktif;
- 6) Meningkatkan pendapatan asli daerah.



f. Landasan Hukum

Pembentukan Agropolitan diatur dalam beberapa perundangan dan peraturan hukum, yaitu :

- 1) Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 4) Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Nasional;
- 5) Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta bentuk dan tatacara peran serta masyarakat dalam penataan ruang;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1998 tentang tata cara peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata rruang daerah;
- 9) Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 144/OT.210/A/V/2002 tentang pengembangan kawasan agropolitan;

- 10) Pedoman umum pengembangan kawasan agroplitan dan pedoman operasional pengembangan kawasan agropolitam Departemen pertanian Tahun 2002.
- 11) Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/56/K/411.101.03/2008 Tanggal 5 Mei 2008 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) dan Sekretariat Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008;
- 12) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030;
- 13) Rencana pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018;
- 14) Pedoman Agropolitan Provinsi Jawa Timur tahun 2013.

g. Agropolitan dan komoditas unggulan dalam meningkatkan ekonomi daerah

Melalui kebijakan Agropolitan yang terkait komoditas unggulan, maka arah kebijakan program harus memperhatikan hal-hal berikut :

- 1) Agropolitan harus menjadi sarana untuk mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan kewilayahan terpadu berbasis komoditas unggulan dengan pendekatan konsep pengembangan agribisnis;
- 2) Agropolitan harus meningkatkan pengembangan komoditas unggulan daerah melalui bantuan saprodi kepada petani;
- 3) Agropolitan harus meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan secara berkelanjutan serta meningkatkan produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan;

- 4) Agropolitan harus dapat melestarikan dan mengembangkan keragaman kekayaan budaya dengan meningkatkan apresiasi dan peran serta komunitas budaya lokal.
- 5) Agropolitan harus mampu mengembangkan UMKM yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja;
- 6) Agropolitan dapat membangun koperasi dengan membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi;
- 7) Agropolitan dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui perbaikan sistem pelatihan tenaga kerja;

## **B. Penyajian Data dan Fokus Penelitian**

### **1. Implementasi kebijakan agropolitan dalam pengembangan kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan di kawasan agropolitan bawang merah Kecamatan Sukomoro**

Implementasi kebijakan Agropolitan merupakan proses pelaksanaan kebijakan berdasarkan *masterplan* Kawasan Agropolitan Kabupaten Nganjuk tahun 2013 yang dilaksanakan sejak tahun 2013 hingga sekarang. Tujuan kebijakan agropolitan ini adalah upaya untuk mengembangkan kawasan agropolitan dengan membangun kawasan desa pertanian menjadi kota tani sehingga akan menciptakan pembangunan ekonomi untuk petani bawang merah di kawasan agropolitan Kecamatan Sukomoro. Implementasi Kebijakan Agropolitan merupakan praktek kolaborasi antara pihak-pihak terkait yang tergabung dalam kelompok kerja (pokja) pengembangan kawasan agropolitan. Berikut ini

adalah penyajian data berdasarkan fokus implementasi kebijakan agropolitan di kawasan agropolitan bawang merah Kecamatan Sukomoro:

a. Kebijakan yang diidealkan

Kebijakan yang diidealkan merupakan penjabaran pola interaksi kegiatan berdasarkan program umum kebijakan. Pola interaksi dalam implementasi kebijakan terjadi antar pelaksana kebijakan serta antar pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran. Pola interaksi dalam kebijakan yang diidealkan agar kebijakan dapat dilaksanakan berdasarkan program-program yang telah ditentukan.

Arah kebijakan Agropolitan berbasis komoditas unggulan adalah pengembangan kawasan Agropolitan bawang merah Kecamatan Sukomoro. Pelaksanaan kegiatan kebijakan agropolitan merupakan kerjasama antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tergabung dalam kelompok kerja (pokja). Pengembangan kawasan agropolitan merupakan kerja tim, sehingga koordinasi antar tim tersebut selalu dilakukan. Hasil wawancara dengan Bapak Baidowi kepala sub bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, Bappeda Kabupaten Nganjuk pada tanggal 31 Desember 2015 di Kantor Bappeda Kabupaten Nganjuk, adalah sebagai berikut :

“....agropolitan itu adalah kebijakan pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan oleh SKPD terkait yang terbentuk dalam kelompok kerja (pokja). SKPD-SKPD itu mempunyai tugas dan fungsi masing-masing yang disusun dalam satu struktur kelompok kerja itu. Jadi kerja agropolitan itu tidak ditangani satu instansi saja. Kerja agropolitan itu bentuk kerjasama dan kordinaasi dari pokja-pokja itu.

Jadi dalam struktur pokja ada pelindung, penanggung jawab, ketua, dan pelaksana teknisnya”.

Kegiatan pertama yang dilakukan oleh pokja dalam implementasi kebijakan agropolitan adalah koordinasi dengan pokja serta *stakeholder* terkait dalam bentuk konsultasi, asistensi dan penyerapan masukan sesuai dengan tugas dan otoritas yang dimiliki pihak-pihak terkait. *Stakeholder* tersebut adalah :

1. Pemberdaya masyarakat desa;
2. PDAM;
3. Telkom;
4. PLN;
5. Kantor Kecamatan;
6. Kantor kelurahan;
7. Pengelola Kegiatan Pendukung kawasan;
8. Masyarakat;
9. Lembaga swasta yang mempunyai interst dengan wilayah pengembangan agropolitan;
10. Perguruan tinggi dan
11. DPRD.

Koordinasi dilakukan berkenaan dengan pembekalan tentang perumusan kebijakan yang mendukung agropolitan. Selain itu untuk lebih optimalnya hasil rencana. Perumusan kebijakan agropolitan menghasilkan 6 (enam) program umum yaitu pengembangan Sumber Daya manusia (SDM) petani, Penguatan kelembagaan petani, pengembangan sarana dan prasarana,

pengembangan agrobisnis, Pengembangan Investasi dan Permodalan serta revitalisasi terminal agribisnis. Selanjutnya sosialisasi program pengembangan kawasan agropolitan dilaksanakan secara *massif* kepada masyarakat, khususnya petani bawang merah di kawasan agropolitan. Hasil wawancara dengan Bapak Baidowi kepala sub bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, Bappeda Kabupaten Nganjuk pada tanggal 31 Desember 2015 di Kantor Bappeda Kabupaten Nganjuk, adalah sebagai berikut :

“....dalam pelaksanaan program pengembangan kawasan ini dilakukan sosialisasi kepada masyarakat di Sukomoro, khususnya petani bawang merah. Sosialisasi ini agar masyarakat tahu, mengerti dan memahami apa yang akan dilakukan pemerintah sehingga mereka mendukung program pemerintah ini. Kita memberikan arahan kepada masyarakat tentang program agropolitan bahwa program agropolitan ini adalah program pembangunan pertanian dengan memfasilitasi petani bawang merah dari pembibitan, penanaman, pemanenan, pemasaran serta pengolahan pasca panen. Karena terkadang pemerintah antusias melaksanakan suatu program tapi masyarakatnya tidak mengerti ya tidak jalan. Untuk itu sosialisasi ini dilaksanakan”.

Dengan adanya sosialisasi ini masyarakat mengetahui tentang program pengembangan kawasan agropolitan. Dari observasi penulis bahwa masyarakat di kawasan agropolitan telah mengetahui tentang program pengembangan agropolitan ini. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Eko selaku ketua kelompok tani Putra Maju WKPP Sukomoro I pada tanggal 28 Januari di Dsn. Ngrandu Ds. Pehserut adalah sebagai berikut :

“.....kita sudah tahu tentang program agropolitan ini sekitar tahun 2013. Karena dulu pernah diadakan sosialisasi tentang program ini. Sepengetahuan saya agropolitan itu program untuk mempermudah petani dalam memproduksi bawang merah. dari kelembagaan petani, terus saran prasarana dan pengembangan agribisnisnya itu diatur lewat program agropolitan ini”.

Berikut adalah pemaparan pelaksanaan program umum kebijakan agropolitan :

#### 1) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Petani

Pengembangan Sumber Daya manusia (SDM) petani merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan petani dalam menghasilkan produktivitas komoditas unggulan. Peningkatan kemampuan petani dalam menghasilkan produktivitas bawang merah yang berkualitas tinggi merupakan tujuan pengembangan kawasan Agropolitan Kecamatan Sukomoro. Pokja yang bertanggung jawab dalam pengembangan SDM petani adalah Dinas Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Daerah Kabupaten Nganjuk serta pelaksana teknisnya adalah Bidang Holtikultura pada Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk, Bidang Ekonomi dan Kesra Bappeda Kabupaten Nganjuk, Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk dan Staf Bappeda Kabupaten Nganjuk. Pengembangan SDM Petani bawang merah dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu pelatihan peningkatan mutu dan produktivitas komoditas unggulan, pengenalan teknologi budidaya mutakhir komoditas unggulan yang ramah lingkungan, serta pembentukan petugas penyuluh pertanian (PPL). Pelatihan peningkatan mutu dan produktivitas komoditas unggulan bawang merah dilaksanakan bersamaan dengan pengenalan budidaya mutakhir komoditas unggulan yang ramah lingkungan. Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan

petani bawang merah yang mampu menghasilkan produktivitas bawang merah yang berkualitas tinggi. Produktivitas bawang merah yang berkualitas tinggi akan mampu meningkatkan daya saing bawang merah sehingga dapat meningkatkan jumlah konsumen bawang merah. Pelatihan peningkatan mutu dan produktivitas komoditas unggulan serta pengenalan teknologi budidaya mutakhir komoditas unggulan yang ramah lingkungan dilaksanakan oleh Dinas pertanian bidang Holtikultura. Dari hasil wawancara dengan bapak Achmad Zakin, Kepala Bidang Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, pada tanggal 28 Januari 2016 di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut:

“Pelatihan peningkatan mutu dan produktivitas bawang merah itu juga sekaligus pengenalan teknologi budidaya mutakhir komoditas unggulan yang ramah lingkungan dengan tujuan agar petani itu pintar, mampu menghasilkan bawang merah dengan teknologi yang ramah lingkungan yang dilaksanakan dengan sosialisasi kepada perwakilan kelompok tani bawang merah”.

Pelaksanaan pelatihan peningkatan mutu dan produktivitas komoditas unggulan bawang merah dilaksanakan melalui pelatihan dan pembinaan petani pelaku agribisnis Holtikultura melalui Sekolah Lapang *Good Agriculture Practice* (SL\_GAP) dan pengenalan teknologi budidaya mutakhir komoditas unggulan yang ramah lingkungan. pelatihan tersebut ditujukan kepada seluruh kelompok tani yang setiap kelompok tani ada 2 (dua) perwakilan. Dengan sosialisasi ini diharap perwakilan setiap kelompok mampu menyampaikan hasil pelatihan kepada anggota kelompoknya sehingga dapat diterapkan. Pelaksanaan pelatihan dan pengenalan teknologi budidaya mutakhir komoditas unggulan bawang merah berdasarkan Data Dinas Pertanian tahun 2013 adalah:



Tabel 6. Pelatihan dan Pembinaan Petani Pelaku Agribisnis Holtikultura

Waktu Pelaksanaan	: 28 Maret 2013 s/d 31 Desember 2013
Tempat	: Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk
Alokasi Dana	: Rp. 45.000.0000,-
Sumber Dana	: APBD
Peserta	: 2 (dua) orang perwakilan dari setiap kelompok Tani Kawasan Agropolitan Sukomoro
Tujuan	: Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan petani dalam mengembangkan produktivitas bawang merah
Materi Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengelolaan tanaman Terpadu dan implementasinya</li> <li>b. Penerapan berfikir sistemik dalam pemahaman situasi problematik mengenai agribisnis bawang merah</li> <li>c. Pembibitan bawang merah</li> <li>d. Budidaya tanaman bawang merah dengan kultur teknis</li> <li>e. Pengenalan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) bawang merah dan pengendaliannya</li> <li>f. Pengendalian Hama terpadu (PHT) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengendalian secara kultur teknis: pemupukan berimbang, penggunaan varietas tahan.</li> <li>- Penggunaan musuh alami (parasitoid, predator dan patogen serangga).</li> <li>- Pengendalian secara mekanik : pembutitan, penggunaan jaring kelambu.</li> <li>- Penggunaan berbagai jenis perangkap (feromonoid seks, perangkap kuning, perangkap lampu dll).</li> <li>- Pemanfaatan bio-pestisida untuk pengendalian OPT bawang merah</li> </ul> </li> <li>g. Analisis usahatani bawang merah</li> </ul>

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Tahun 2013

Kegiatan selanjutnya adalah Pembentukan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan

produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya. Penyuluhan pertanian dilaksanakan oleh Petugas Penyuluh Lapangan. Perekrutan PPL dilaksanakan oleh Bappeda bidang Ekonomi dan Kesra. Berdasarkan Dokumen Bappeda Kabupaten Nganjuk syarat calon Petugas Penyuluh Pertanian (PPL) adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan minimal S1 Pertanian (semua jurusan);
2. Diutamakan yang mempunyai pengalaman di bidang pendampingan selama 1 (satu) tahun;
3. Bertempat tinggal di sekitar lokasi kawasan agropolitan Kabupaten Nganjuk;
4. Bukan CPNS/PNS, tenaga honorer dan perangkat desa;
5. Mampu berkomunikasi dengan baik;
6. Dapat mengoperasikan omputer (Ms. Word, Excel, Powerpoint);
7. Mampu bekerja secara *teamwork*.

Selanjutnya, mekanisme perekrutan Pendamping penyuluh Lapangan (PPL) adalah sebagai berikut :

1. Calon mengajukan permohonan lamaran ke Bappeda (ketua Pokja) yang dilampiri fotokopi ijazah, fotokopi KTP dan Biodata;
2. Bappeda bersama Tim Tenaga ahli Manajemen PKA melakukan seleksi/wawancara terhadap calon PPL;
3. Keputusan hasil seleksi akan disampaikan secara tertulis/situs resmi oleh Bappeda.

Perekrutan PPL dilaksanakan pada Tahun 2013 dengan masa kerja selama 5 tahun. Setiap PPL mendampingi satu wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP). Pada kawasan Agropolitan Sukomoro terdapat 5 (lima) WKPP. Berikut ini data PPL Tahun anggaran 2013-2017 Kawasan Agropolitan Sukomoro dari data Dinas Pertanian Tahun 2013, yaitu :

Tabel 7. PPL Kawasan Agropolitan Sukomoro Tahun Anggaran 2013-2017

No.	Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian	Pendamping Penyuluh Lapangan
1.	Sukomoro I	Teguh Irwanto, SP.
2.	Sukomoro II	Dian Purwanti, SP.
3.	Sukomoro III	Soekiran, SP
4.	Sukomoro IV	Umi Hidayati, SP.
5.	Sukomoro V	Wirawan Rubu Permana, SP.

*Sumber: Dokumen Dinas Pertanian Tahun 2013*

PPL memiliki tugas dan fungsi dalam mendampingi kelompok tani untuk menguatkan kelembagaan tidak hanya dengan meningkatkan produktivitas bawang merah namun juga meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial dan kewirausahaan serta organisasi petani. Berdasarkan dokumen Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk tahun 2014 tentang Tugas PPL adalah sebagai berikut:

1. Monitoring kegiatan Pengembangan Kawasan Agropolitan dan memberikan pendampingan kepada petani.
2. Menghimpun data, informasi kelompok tani serta dokumentasi setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pokja.
3. Menghimpun permasalahan-permasalahan yang dialami petani serta melaporkan kepada pokja.
4. Menyusun agenda kelompok tani.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Teguh Irwanto selaku PPL WKPP Sukomoro I di Kantor UPTD Pertanian Sukomoro pada tanggal 18 Januari 2016 adalah sebagai berikut :

“Pendamping penyuluh itu tugasnya dalam penguatan kelompok tani sangat berperan mbak. Dengan adanya PPL kelompok tani ada yang mendampingi dan membina dalam meningkatkan keorganisasiannya. Jadi percuma kan kalau petani bisa menghasilkan bibit bawang merah yang berkualitas serta hasil panen yang bagus tapi kalau tidak terorganisir. Jadi tugas dan fungsi ppl itu utamanya memfasilitasi pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong serta mengorganisir kelompoknya dan mengakses informasi pasar, permodalan, kayak gitu. Semua itu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas efisiensi usaha dan pendapatan serta kesejahteraan petani.”

Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Eko selaku ketua kelompok tani Putra Maju WKPP Sukomoro I pada tanggal 28 Januari di Dsn. Ngrandu Ds. Pehserut adalah sebagai berikut :

“PPL ini sangat membantu petani dalam bertani bawang merah. Disaat kita memiliki masalah tentang pembibitan, penanaman, pemanenan, penjualan, kita lapornya ke PPL. Jadi PPL ini pendamping bagi kita dan juga penghubung kita ke pemerintah”.

Hasil wawancara dengan Bapak Baidowi, kepala sub bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, Bappeda Kabupaten Nganjuk pada tanggal 31 Desember 2015 di Kantor Bappeda Kabupaten Nganjuk, adalah sebagai berikut :

“Pembentukan PPL ini dilakukan agar PPL ini menjadi wadah curhat bagi petani sehingga kalau ada permasalahan bisa langsung disampaikan ke pemerintah”.

Pembentukan PPL harus didukung dengan penyediaan fasilitas Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang berfungsi sebagai klinik konsultasi agribisnis

(KKA) yakni sebagai sumber informasi agribisnis, tempat percontohan usaha agribisnis, dan pusat pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha agribisnis yang lebih efisien dan menguntungkan. Dalam pengembangan kawasan agropolitan ini BPP perlu diarahkan menjadi Balai Penyuluhan Pembangunan Terpadu dimana BPP ini merupakan basis penyuluhan bagi para penyuluh dan petugas yang terkait dengan pengembangan kawasan agropolitan dan penyuluh swakarsa seperti kontak tani atau petani maju, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Berikut ini alokasi dana pengadaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Sukomoro:

Tabel 8. Alokasi Dana Pengadaan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Sukomoro

No.	Nama Paket pengadaan	Kegiatan	Jenis Belanja	Jenis pengadaan	Alokasi dana	Volume	Sumber Dana	Pelaksanaan
1.	Perencanaan teknis pembangunan BPP	Penyediaan Fisik Prasarana Penyuluhan di BPP (DAK)	Belanja lain-lain	Jasa konsultasi	8.200.000	1 Paket	APBD	01/01/2013
2.	Pengawasan Teknis Pembangunan BPP	Penyediaan Fisik Prasarana Penyuluhan di BPP (DAK)	Belanja lain-lain	Jasa konsultasi	4.600.000	1 paket	APBD	02/04/2013
3.	Pembangunan BPP Sukomoro	Penyediaan Fisik Prasarana Penyuluhan di BPP (DAK)	Belanja modal	Pekerjaan kontruksi	308.637.000	1 paket	APBD	30/07/2013
4.	Pengadaan Sepeda Motor	Penyediaan Sarana Kelembagaan Penyuluhan (DAK)	Belanja modal	Barang	496.000.000	32 unit	APBD	01/03/2013

5.	Pengadaan LCD Proyektor	Penyediaan Sarana Kelembagaan Penyuluhan (DAK)	Belanja modal	Barang	94.500.000	10 unit	APBD	01/04/2013
6.	Pengadaan Laptop dan Printer	Penyediaan Sarana Kelembagaan Penyuluhan (DAK)	Belanja modal	Barang	98.000.000	10 Paket	APBD	01/04/2013
7.	Pengadaan Wireless Sound System	Penyediaan Sarana Kelembagaan Penyuluhan (DAK)	Belanja modal	Barang	125.000.000	10 unit	APBD	01/04/2013

*Sumber: Laporan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015-2018.*

Berdasarkan observasi penulis, pembentukan PPL ini sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat khususnya petani bawang merah. dalam melaksanakan tugasnya PPL melakukan pendampingan terhadap kelompok tani dari kegiatan memproduksi bawang merah ataupun dalam penguatan kelembagaan pertanian. Selain itu membantu petani dalam mengorganisir kegiatan-kegiatan pertanian.

## 2) Penguatan kelembagaan Tani

Penguatan kelembagaan tani dilakukan melalui pemberdayaan petani untuk merubah pola pikir petani agar mampu meningkatkan usaha tani dan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam melaksanakan fungsinya. Pemberdayaan petani dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok. Kegiatan penyuluhan melalui pendekatan kelompok dimaksudkan untuk mendorong terbentuknya kelembagaan petani yang mampu membangun sinergi antar petani dan antar poktan dalam rangka mencapai efisiensi usaha. Dengan demikian penguatan kelembagaan tani dilakukan dengan pembentukan kelompok tani (poktan) serta pembentukan forum antar poktan melalui Gabungan Kelompok tani (Gapoktan). Pokja pelaksana penguatan kelembagaan tani dikoordinatori oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nganjuk serta pelaksana teknisnya adalah bidang Sosial Ekonomi Bappeda Kabupaten Nganjuk, subbidang Pendidikan dan Kesehatan Bappeda Kabupaten Nganjuk Serta Staf Bappeda Kabupaten Nganjuk.



Pembentukan poktan bawang merah Sukomoro sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 tentang Pedoman pembinaan Kelompok tani dan gabungan kelompok tani tahun 2013 sehingga memperhatikan karakteristik berdasarkan ciri dan unsur pengikat. Berikut adalah ciri-ciri yang diperhatikan dalam pembentukan poktan bawang merah Sukomoro :

1. Saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama anggota;
2. Mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam mengembangkan komoditas unggulan bawang merah sehingga dapat membangun ekonomi daerah.
3. Memiliki kesamaan dalam tradisi dan pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi dan sosial, budaya atau kultur, adat istiadat, bahasa serta ekologi.

Sedangkan unsur pengikat poktan bawang merah adalah sebagai berikut :

1. Adanya kawasan usaha tani yang menjadi tanggungjawab bersama di antara para anggotanya;
2. Adanya kader tani (ketua) yang berdedikasi tinggi untuk menggerakkan para petani dengan kepemimpinan yang diterima oleh sesama petani lainnya;
3. Adanya kegiatan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh sebagian besar anggotanya;
4. Adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menunjang program yang telah ditetapkan.

5. Adanya pembagian tugas dan tanggungjawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama.

Kelompok tani bawang merah pada kawasan agropolitan Sukomoro sudah terbentuk sebelum kebijakan agropolitan dilaksanakan. Pembentukan Poktan pertama kali pada tahun 1980 yaitu kelompok tani Putra Maju. Sampai sekarang terdapat 53 kelompok tani. Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Eko selaku ketua kelompok tani Putra Maju WKPP Sukomoro I pada tanggal 28 Januari di Dsn. Ngrandu Ds. Pehserut adalah sebagai berikut :

“Kelompok Tani Putra Maju ini sudah ada sejak tahun 1980 dan merupakan kelompok tani bawang merah yang pertama dan tertua di Sukomoro ini mbak. Lalu tahun-tahun selanjutnya terbentuk juga kelompok-kelompok lain. Sampai yang terakhir pada tahun 2009 yaitu Kelompok Tani Mitro Sejati. Hingga sekarang ada 53 poktan yang tersebar di seluruh kecamatan di Sukomoro”.

Kelompok-kelompok Tani dibagi kedalam kelas-kelas. Pembagian kelas-kelas tersebut berdasarkan ketentuan *score* kemampuan poktan. Berikut ini Pembagian Kelas poktan berdasarkan Data dari Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Tahun 2014, yaitu :

1. Kelas pemula (P), merupakan kelas terbawah dan terendah dengan *score* 0-250 dimana piagam ditandatangani oleh kepala Desa. Terdapat 8 kelompok tani kelas pemula pada kawasan agropolitan Sukomoro.
2. Kelas lanjutan (L), merupakan kelas dengan *score* 251-500 sehingga kelompok tani sudah memiliki kegiatan perencanaan dengan piagam yang ditandatangani oleh camat. Terdapat 32 kelompok tani kelas lanjutan pada kawasan agropolitan Sukomoro.

3. Kelas madya (M) merupakan kelas yang memiliki score 501-750 dengan piagam yang ditandatangani Bupati. Terdapat 12 kelompok tani kelas madya pada kawasan agropolitan Sukomoro.
4. Kelas utama (U) merupakan kelas dimana kelompok tani mampu berdiri sendiri atas dasar prakarsa dan swadaya sendiri dan memiliki nilai kemampuan diatas 750. Piagam kelas utama ditandatangani oleh Gubernur. Terdapat 1 kelompok tani kelas pemula pada kawasan agrpolitan Sukomoro.

Penguatan kelembagaan tani dilaksanakan dengan membentuk forum komunikasi antar poktan dengan membentuk gabungan kelompok tani (gapoktan). Keberadaan gabungan kelompok tani juga akan memudahkan dalam mensosialisasikan, menerapkan teknologi dan mengakses pembiayaan, dengan demikian skala usaha menjadi lebih besar dan ekonomis. Pemberdayaan kelompok tani dan Gapoktan diarahkan pada peningkatan kemampuan agribisnis secara keseluruhan, sehingga tidak terfokus pada aspek budidaya saja. Gapoktan menjadi unit usaha sarana dan prasarana produksi bawang merah di Kecamatan Sukomoro. Hasil wawancara dengan Bapak Baidowi, kepala sub bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, Bappeda Kabupaten Nganjuk pada tanggal 31 Desember 2015 di Kantor Bappeda Kabupaten Nganjuk, adalah sebagai berikut :

“Pembentukan gapoktan bertujuan untuk menumbuh kembangkan kemitraan langsung antara tokoh agribisnis dengan poktan. Jadi gapoktan memperkuat kerjasama dengan pedagang dengan poktan”.

Pembentukan gapoktan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian. Pembentukan gapoktan pada kawasan agropolitan Sukomoro berdasarkan lokasinya. Hasil wawancara dengan ibu Dian Purwanti, SP. selaku PPL WKPP Sukomoro II di Kantor UPTD Pertanian Sukomoro pada tanggal 18 Januari 2016 adalah sebagai berikut :

“Pembentukan Gapoktan ini ditujukan untuk seluruh poktan bawang merah yang ada di Sukomoro. Jadi semua poktan yang sudah terdata yang jumlahnya ada 53 poktan itu semua tergabung dalam gapoktan. Jadi pembentukan poktan sesuai dengan identifikasi wilayah dan kelas poktan. Itu untuk menentukan WKPP nya mereka”.

Sedangkan Bapak Suwelo, Kepala UPTD Pertanian Sukomoro pada tanggal 22 Januari 2016, hasil wawancara di Kantor UPTD Pertanian Sukomoro sebagai berikut :

“Jadi dinas pertanian ini mendata kelompok-kelompok tani berdasarkan komoditasnya, lokasinya serta kelasnya dan dibagi kedalam Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) ini. Nah nantinya WKPP ini menjadi Gabungan Kelompok Tani atau Gapoktan. Di Sukomoro sendiri petani-petan penghasil bawang merah ada sekitar 50 kelompok tani yang dibagi menjadi lima WKPP. Ada WKPP Sukomoro I sampai WKPP Sukomoro V. WKPP ini ditentukan sesuai lokasi mbak”

Dari data Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 berikut ini Gapoktan kawasan agropolitan Sukomoro adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Gapoktan Kawasan Agropolitan Sukomoro

No.	WKPP	Desa	Poktan	Jumlah poktan	PPL
1.	Sukomoro I	Pehserut	4	13	Teguh Irwanto, SP.
		Ngregket	3		
		Putren	6		
2.	Sukomoro II	Sukomoro	5	10	Dian Purwanti, SP.
		Ngrami	5		
3.	Sukomoro III	Kapas	4	14	Soekiran, SP
		Sumengko	6		
		Blitaran	4		
4.	Sukomoro IV	Kedungsuko	4	11	Umi Hidayati, SP.
		Nglundo	3		
		Bungur	4		
5.	Sukomoro V	Bagorwetan	6	6	Wirawan Rubu Permana, SP.

*Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk tahun 2014 (diolah)*

Selanjutnya forum gapoktan dilaksanakan dengan mengadakan pertemuan antar poktan dalam gapoktan. Pertemuan ini didampingi oleh PPL. Jadwal pertemuan ditentukan oleh PPL. Pertemuan tersebut dilakukan setiap satu bulan sekali. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas masalah-masalah yang timbul antara lain mengidentifikasi potensi dan masalah dalam pengembangan usahatani, merencanakan kegiatan poktan lainnya, misalnya gerakan perbaikan irigasi, pemberantasan OPT, pemupukan modal, serta mengorganisasikan dan menyusun pembagian kerja Hasil wawancara dengan ibu Dian Purwanti, SP. selaku PPL WKPP Sukomoro II di Kantor UPTD Pertanian Sukomoro pada tanggal 18 Januari 2016 adalah sebagai berikut :

“Pertemuan Gapoktan Sukomoro II dilakukan di kantor Desa Sukomoro setiap hari Sabtu pada minggu kedua. Pada pertemuan tersebut membahas masalah-masalah yang terjadi atau sebagai sarana sharing antar kelompok tani. Semua anggota kelompok tani boleh menghadiri pertemuan ini. Namun biasanya setiap kelompok tani dihadiri 5-6 orang.”

Selain pertemuan antar poktan dan gapoktan, penguatan kelembagaan selanjutnya dilakukan dengan pembinaan Petani bawang merah di kawasan sentra produksi bawang merah di kawasan Agropolitan dan pendampingan petani atau penyuluhan petani. Dari hasil wawancara dengan Bapak Teguh Irwanto selaku PPL WKPP Sukomoro I di Kantor UPTD Pertanian Sukomoro pada tanggal 18 Januari 2016 adalah sebagai berikut :

“....kegiatan itu dilakukan dengan pembinaan kepada petani pada sentra produksi bawang merah serta dilakukan pendampingan atau penyuluhan kepada petani. dengan pembinaan ini petani akan lebih memahami adanya kelembagaan tani”.

Dari hasil observasi penulis bahwa dengan adanya poktan dan gapoktan ini, kelembagaan petani makin terstruktur. Fungsi dari poktan dan gapoktan adalah sebagai kelas belajar untuk petani sehingga mereka dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam memproduksi bawang merah yang berkualitas tinggi, fungsi selanjutnya adalah sebagai wahana kerjasama antara sesama petani dalam poktan dan antar poktan maupun pihak lain dalam kegiatan produksi bawang merah. kerjasama yang terlihat jelas adalah saat penjualan hasil panen bawang merah kepada pedagang. Unit usaha pemasaran hasil pertanian

anggotanya baik dalam bentuk pengembangan jejaring dan kemitraan dengan pihak lain maupun pemasaran langsung difasilitasi oleh poktan dan gapoktan. Adanya poktan dan gapoktan tersebut memberikan pelayanan informasi harga komoditas. Fungsi yang terakhir adalah sebagai unit produksi bawang merah yang dikembangkan untuk mencapai skala ekonomis usaha dengan menjaga kualitas, kuantitas maupun kontinuitas. Dengan demikian poktan dan gapoktan ini merupakan wahana interaksi antar petani.

### 3) Pengembangan Sarana dan prasarana

Pengembangan kawasan agropolitan selanjutnya dilaksanakan dengan pengembangan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana tersebut akan mendukung aktifitas pertanian para petani dalam meningkatkan produktivitas bawang merah. Selain itu ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai akan membantu mengembangkan aktivitas agribisnis. Pengembangan sarana dan prasarana diketuai oleh Dinas PU Cipta Karya dan tata Ruang Daerah kabupaten Nganjuk serta pelaksana teknisnya adalah Dinas PU Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk, bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang Dinas PU Cipta Karya Daerah Kabupaten Nganjuk, seksi pembangunan Jalan Dinas PU Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk dan staff Bappeda. Sarana dan prasana yang dikembangkan antara lain: penyediaan jaringan jalan, penyediaan jaringan irigasi, penyediaan jaringan air bersih, penyediaan jaringan telekomunikasi, penyediaan jaringan listrik, penyediaan jaringan drainase dan sanitasi, dan penyediaan jaringan persampahan. Sarana dan prasana tersebut dikembangkan diseluruh wilayah kawasan agropolitan Sukomoro.

Penyediaan jaringan jalan dilaksanakan dengan membangun jalan kolektor sebagai jalur penghubung antar kecamatan maupun jalan lokal penghubung antar desa. Pokja pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam penyediaan jaringan jalan adalah Dinas PU dan Cipta Karya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh peneliti pada Kawasan Kecamatan Sukomoro, saat ini daya dukung prasarana pertanian berupa jaringan jalan kolektor secara umum telah memadai.

Namun saat ini masih dilakukan perbaikan-perbaikan jalan yang berlubang pada baik pada jalan kolektor maupun jalan lokal. Selain itu pengaspalan jalan pada jalan makadam yang menghubungkan antar sawah sedang dilakukan. Hasil wawancara dengan Bapak Baidowi, kepala sub bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, Bappeda Kabupaten Nganjuk pada tanggal 31 Desember 2015 di Kantor Bappeda Kabupaten Nganjuk, adalah sebagai berikut :

“Pengaspalan pada jalan-jalan makadam dilokasi persawahan masih dilakukan. Terutama di Desa Pehserut yang kondisi jalan di persawahan masih banyak yang makadam. Selain itu perbaikan jalan-jalan aspal yang berlubang juga dilakukan.”



Berikut ini alokasi dana pengadaan jaringan jalan pada kawasan Agropolitan berdasarkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dinas Pertanian Tahun 2013:

Tabel 10. Alokasi Dana Pengadaan Jaringan Jalan

No.	Nama Pengadaan	Kegiatan	Alokasi dana	Sumber	Waktu Pelaksanaan
1.	Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	Pembangunan Jalan Usaha Tani (DAK)	Rp. 13.400.000,-	APBD	01/03/2013
2.	Pengawasan Teknis Pembangunan JUT	Pembangunan Jalan Usaha Tani (DAK)	Rp. 12.600.000,-	APBD	02/04/2013
3.	Peningkatan JUT Kecamatan Sukomoro	Pembangunan Jalan Usaha Tani (DAK)	Rp. 90.000.000,-	APBD	02/04/2013

*Sumber: Laporan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015-2018.*

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa daya dukung prasarana berupa ketersediaan jaringan jalan secara umum di kawasan agropolitan Sukomoro telah memadai. Namun masih diperlukan kebutuhan pengembangan ke depan berupa peningkatan kualitas/standar jalan yang telah disesuaikan dengan peningkatan frekuensi dan tonase kendaraan angkutan hasil pertanian. Peningkatan kualitas jalan ini akan berpengaruh terhadap aspek efektivitas dan efisiensi kegiatan pertanian.

Pengembangan sarana dan prasarana selanjutnya adalah penyediaan jaringan irigasi. Pokja yang bertanggung jawab dalam pemenuhan jaringan irigasi

adalah Dinas PU Pengairan Daerah Irigasi pertanian bawang merah dilakukan dengan jaringan irigasi desa (Jides), jaringan irigasi tingkat usahatani (Jitut) dan sumur pompa air tanah untuk menaikkan indeks pertanaman. Selain itu untuk menaikkan efisiensi irigasi dilakukan dengan pada tahun 2014 meliputi operasi dan pemeliharaan rutin jaringan irigasi. Hasil wawancara dengan Bapak Sulistyio selaku staff Dinas PU Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

“.....upaya yang dilakukan dalam pengembangan jaringan irigasi adalah melakukann perbaikan jaringan irigasi desa (Jides), jaringan irigasi tingkat usahatani (Jitut) dan sumur pompa air tanah dengan penggantian dan pemeliharaan pompa dan mesin penggeraknya.”

Berikut ini alokasi dana pengadaan jaringan irigasi pada kawasan Agropolitan berdasarkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dinas Pertanian Tahun 2013:

Tabel 11. Alokasi Dana Pengadaan Jaringan Irigasi

No.	Nama Pengadaan	Kegiatan	Alokasi dana	Sumber	Waktu Pelaksanaan
1.	Pembangunan Jides Kecamatan Sukomoro	Pembangunan Jaringan Irigasi Desa (Jides) DAK	Rp. 74.300.000,-	APBD	02/04/2013
2.	Pembangunan Jitut Kecamatan Sukomoro	Pembangunan Jaringan Irigasi Tingkat Usahatani (Jitut) DAK	Rp.49.000.000,-	APBD	02/04/2013
3.	Pengadaan Pompa Air	Pengadaan Pompa Air (DAK)	Rp.186.420.000,-	APBD	30/04/2013

*Sumber: Laporan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015-2018.*

Dari hasil observasi peneliti bahwa komoditas unggulan bawang merah diproduksi secara monokultur. Dengan Sitem monokultur tersebut, pada saat musim kemarau ataupun musim penghujan petani tetap menanam bawang merah. Dengan demikian sistem irigasi modern yang mampu memenuhi kebutuhan air dengan volume tertentu saat musim hujan ataupun kemarau.

Selanjutnya adalah pengembangan sistem pemenuhan jaringan air bersih. Pengembangan sistem pemenuhan jaringan air di kawasan agropolitan dikembangkan melalui swadaya masyarakat dalam bentuk pembuatan dan pengelolaan sumur-sumur bor (sumber air artetis). Pemenuhan air bersih di Kecamatan Sukomoro tidak memprioritaskan jasa PDAM. Berikut adalah data sandar kebutuhan air bersih Kecamatan Sukomoro :

Tabel 12. Data Standar Kebutuhan Air Bersih Kecamatan Sukomoro

1.	Rumah Tangga kawasan Desa	60 Ltr/org/hr
2.	Rumah tangga KTU	120 ltr/org/hr
3.	Fasilitas sosial (perkantoran, sekolah,dll)	1/6 kebutuhan rumah tangga
4.	Komersial	1/6 kebutuhan rumah tangga
5.	Cadangan kebocoran	20% kebutuhan total
6.	Pemadam Kebakaran	20%kebutuhan total

*Sumber : Laporan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015-2018*

Pengembangan sarana dan prasarana selanjutnya adalah dengan pengembangan jaringan telepon. Distribusi jaringan telepon sebagai pengembangan jaringan telekomunikasi dikembangkan oleh PT. Telkom. Dari dara RPJM Kawasan Agropolitan Kabupaten Nganjuk Tahun 2015-2019 PT.

Telkom menetapkan beberapa standar berkaitan dengan jaringan komunikasi kawasan agropolitan adalah sebagai berikut :

1. Standar perhitungan jumlah satuan sambungan telepon dihitung berdasarkan klasifikasi Kawasan Agropolitan bangunan dan faktor penetrasi;
2. 1 titik distribusi point (DP) dapat melayani 10-20 Line unit (LU)/ satuan Telepon (ST);
3. 1 rumah kabel (RK) elayani 200-1200 DP;
4. 1 Sentral Telepon Otomatis (STO) dapat melayani 1.000-35.000 SS.

Berdasarkan standar P.Telkom dan peningkatan populasi penduduk pada tahun 2013-2018, maka kebutuhan jaringan komunikasi masyarakat kawasan agropolitan sukumoro sebanyak 102 STO. Selain itu penyediaan telepon umum, wartel, kiostel disediakan pada masing-masing pusat Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP).

Pengembangan selanjutnya adalah pengembangan pelayanan jaringan listrik. Pelayanan jaringan listrik di kawasan agropolitan Sukumoro menggunakan standar sebagai berikut :

- |                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Fasilitas komersial   | : 1300-3000 watt/unit gedung  |
| 2. Perumahan skala besar | : 1300 watt/unit rumah        |
| 3. Perumahan sederhana   | : 900 wat/unit rumah          |
| 4. Perumahan kecil       | : 400 wat/unit rumah          |
| 5. Penerangan jalan      | : 100 watt/50 m panjang jalan |

Dari data yang diperoleh dari RPJM Kawasan Agropolitan Kabupaten Nganjuk Tahun 2015-2018 bahwa pelayanan jaringan listrik telah terealisasi

Jaringan drainase merupakan saluran untuk menanggulangi banjir dan genangan air atau air hujan. Sedangkan jaringan sanitase adalah saluran air limbah yang akan disalurkan ke pembuangan air. Sebagian masyarakat kawasan agropolitan Sukomoro menggunakan sistem drainase dan sanitas *on site*. *On site* adalah pengadaaan air limbah secara sederhana biasanya menggunakan *septic tank*.

Jaringan persampahan di kawasan agropolitan sukomoro dilakukan dengan dua sistem yaitu sistem bakar (*On site*) dan sistem tanam (*off site*). Sampah-sampah anorganik diolah dengan dibakar. Sedangkan sampah organik dikubur. Selain itu belum ada upaya penetapan TPS dan TPA pada kawasan agropolitan Sukomoro.

#### 4) Pengembangan Agrobisnis

Arah kebijakan pengembangan kawasan Aropopolitan adalah dengan pengembangan agrobisnis. pengembangan agrobisnis dilakukan untuk menyeimbangkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan agrobisnis kawasan agropolitan Sukomoro dilaksanakan melalui *event festival* Bawang merah, pengembangan agroindustri dan peningkatan pasar Sentra Pengembangan Agropolitan (SPA). Pengembangan agrobisnis ini diketuai oleh Dinas Pertanian Daerah kabupaten Nganjuk serta pelaksana teknisnya adalah Bidang Holtikultura pada Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Nganjuk, Bidang

Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi daerah Kabupaten Nganjuk serta Staf Bappeda Kabupaten Nganjuk.

Even festival bawang merah merupakan suatu cara untuk mempromosikan potensi unggulan Kabupaten Nganjuk. Event festival bawang merah dilaksanakan setiap HUT Kota Nganjuk dengan mengadakan Lomba Cipta Replika Bawang Merah. tujuan dilakasnakan acara ini adalah untuk mengangkat citra bawang merah sebagai potensi asli Kabupaten Nganjuk dan mendorong transaksi antar petani dan penjualan ke luar daerah. Hasil wawancara dengan Bapak Suwelo, Kepala UPTD Pertanian Sukomoro pada tanggal 22 Januari 2016, hasil wawancara di Kantor UPTD Pertanian Sukomoro sebagai berikut :

“.....event festival bawang merah diadakan dengan kegiatan LCR bawang merah dengan tujuan mempromosikan u unggulan bawang merah. dengan begini bisa menarik perhatian orang-orang baik orang nganjuk sendiri ataupun luar Nganjuk sehingga mereka makin gertarik dengan produk bawang merah kita. Kalau bawang merah Kabupaten Nganjuk makin terkenal kan penjualan akan semakin lancar dan petani akan untung”.



Gambar 11. Replika Bawang Merah LCR Kabupaten Nganjuk tahun 2015

*Sumber: [www.Nganjukkab.go.id](http://www.Nganjukkab.go.id)*

Dari hasil observasi penulis bahwa Lomba Cipta Replika (LCR) ini sangat efektif dalam menarik perhatian masyarakat akan potensi bawang merah kabupaten Nganjuk. Tidak hanya menarik perhatian masyarakat, LCR yang pertama kali dilakukan pada HUT Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2009 ini bahkan dihadiri Dirjen Pemasaran dan Pengolahan Hasil Pertanian, Departemen Pertanian RI. Hal ini membuktikan bahwa festival ini merupakan ajang untuk memamerkan produk bawang merah kepada masyarakat luas.

Pasar SPA Sukomoro sebagai ruang pameran dan pasar lelang komoditas bawang merah. Pengembangan pasar (SPA) Sukomoro diharapkan mampu mendukung kegiatan agribisnis terutama kegiatan jual beli produksi hasil pertanian, selain menjadi tempat penyimpanan dan pengolahan hasil pertanian. Pasar SPA Sukomoro terletak di jalan provinsi Surabaya-Nganjuk Desa Bungur Kecamatan Sukomoro. Rencana Pengembangan Pasar SPA dilakukan dengan pengadaan fasilitas pendukung pasar SPA berupa sarana dan prasarana produksi pertanian (saprota) berupa kios-kios pertanian, gudang, lahan parkir bongkar muat barang. Dari hasil wawancara dengan Kabur TU UPTD SPA Bapak Priyono pada tanggal 9 Februari di Kantor UPTD Pertanian Sukomoro sebagai berikut :

“Luas lahan Pasar (SPA) secara keseluruhan adalah 15.000 m<sup>2</sup>. Luas lahan yang digunakan untuk bangunan fisik Sentra Pengembangan Agribisnis (SPA) yaitu berupa gudang, penyimpanan alat mesin pertanian, gudang sarana produksi pertanian, gudang bawang merah, alat pengering bawang merah tenaga surya, balai pertemuan, kantor, tempat istirahat, WC, pos keamanan, kios, dan halaman parkir seluas 5.500 m<sup>2</sup>. Sisa lahan yang tidak digunakan bangunan 4.500 m<sup>2</sup> direncanakan untuk miniature tanaman yang mencerminkan kegiatan budidaya tanaman yang ada di Kabupaten

Nganjuk. Penambahan lahan seluas 5000 m<sup>2</sup> di sebelah timur SPA direncanakan untuk penambahan fasilitas berupa rest area”.

Namun pengembangan Pasar SPA belum berjalan dengan maksimal.

Hal ini dapat dilihat dari kondisi fasilitas sarana dan prasarana belum seluruhnya didirikan. Sampai sekarang, di lokasi Pasar SPA hanya terdapat satu gedung Aula, kantor UPT Pertanian Sukomoro, beberapa kios yang digunakan untuk warung kopi, serta beberapa gudang penyimpanan. Belum ada kegiatan jual beli hasil produksi seperti pasar. Pengembangan pasar SPA belum dilaksanakan karena masalah biaya yang belum cair hingga sekarang. Hasil wawancara dengan Bapak Baidowi, kepala sub bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, Bappeda Kabupaten Nganjuk pada tanggal 31 Desember 2015 di Kantor Bappeda Kabupaten Nganjuk, adalah sebagai berikut :

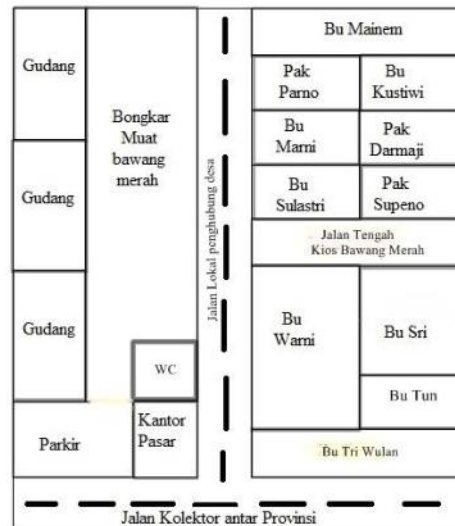
“Pengembangan Pasar SPA Sukomoro ini masih menunggu bantuan dana dari Provinsi karena alokasi dana daerah untuk pengembangan Pasar SPA ini sampai sekarang ya hanya mampu mewujudkan pasar Sentra seperti itu. Untuk itu pokja agropolitan ini mengupayakan bantuan dana dari tingkat provinsi”.

Pasar bawang merah sebagai sarana jual beli bawang merah masih terletak di Jalan Provinsi Surabaya-Nganjuk Desa Sukomoro Kecamatan Sukomoro. Hasil wawancara dengan Bapak Suwelo, Kepala UPTD Pertanian Sukomoro pada tanggal 22 Januari 2016, hasil wawancara di Kantor UPTD Pertanian Sukomoro sebagai berikut :

“...sampai sekarang kegiatan jual beli bawang merah masih dilakukan di pasar bawang merah sukomoro karena belum ada tindak lanjut tentang pengembangan SPA ini.”



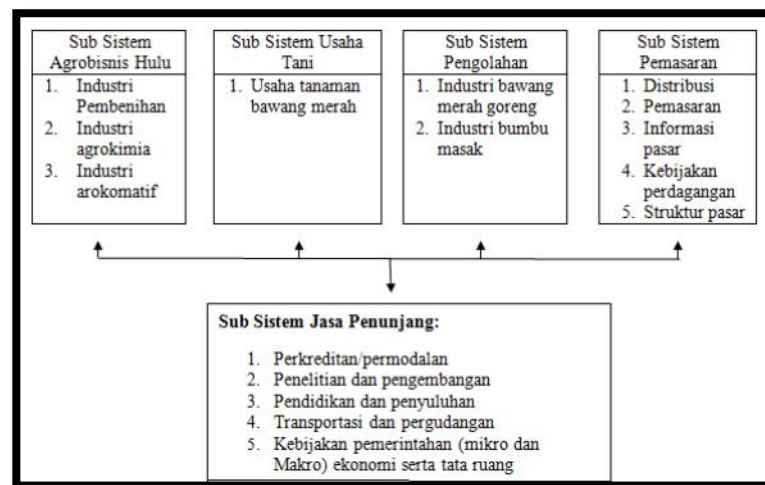
Kondisi pasar bawang merah Sukomoro juga masih sangat sederhana. Berikut ini denah pasar bawang merah Sukomoro:



Gambar 12. Denah Pasar Bawang Merah Sukomoro

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2016

Pengembangan agrobisnis selanjutnya adalah dengan mengembangkan agroindustri agropolitan. Rencana pengembangan agrobisnis merupakan program pembangunan yang akan mempunyai dampak yang signifikan terhadap masyarakat atau petani bawang merah kawasan agropolitan Sukomoro. Lingkup pengembangan agroindustri di kawasan agropolitan Kecamatan Sukomoro adalah sebagai berikut:



Gambar 13 . Lingkup Pengembangan AgroIndustri Kabupaten Nganjuk  
 Sumber: Laporan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015-2018.

Pengembangan agroindustri bertujuan untuk menambah nilai jual produk bawang merah. Pengembangan agroindustri ini mengacu pada empat lingkup sub sistem dengan pengembangan produk bawang merah dengan pengolahan bawang merah pasca panen (*off farm*) sehingga dapat meningkatkan nilai jual bawang merah tersebut. dengan peningkatan jual beli tersebut, diharap pengembangan agroindustri dapat memberdayakan masyarakat petani karena petani tidak hanya menanam saja. Selain itu akses manfaat lain dari adanya pengolahan hasil produksi pertanian dengan konsep agroindustri adalah adanya penyerapan tenaga guna mengurangi tingkat pengangguran.

Pengembangan agroindutri bawang merah di kawasan agropolitan Sukomoro sampai saat ini dilakukan dengan pengolahan bawang merah menjadi bawang goreng kemasan. Namun petani belum mampu menghasilkan jumlah degan skala besar sehingga masih perlu dikembangkan. Dari hasil wawan Hasil

wawancara dengan Bapak Baidowi, kepala sub bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, Bappeda Kabupaten Nganjuk pada tanggal 31 Desember 2015 di Kantor Bappeda Kabupaten Nganjuk, adalah sebagai berikut :

“....pengolahan *off farm* bawang merah sekarang ini dilakukan dengan pengolahan bawang goreng kemasan.sekarang ini hanya beberapa rumah tangga petani di Sukomoro yang mau melakukan ini jadi masih sangat perlu dikembangkan untuk skala besarnya. Padahal saya lihat pengolahan bawang goreng kemasan ini merupakan kesempatan bagi petani untuk meningkatkan pendapatannya. Tapi ya tetap masih perlu dikembangkan lagi.”

Selain itu, pengembangan agroindustri dilakukan melalui sistem kemitraan. Yaitu petani bermitra dengan perusahaan yang memerlukan bahan baku bawang merah. Petani menjadi pemasok bahan baku tersebut. hal ini dilakukan karena melihat kemampuan petani yang belum cukup tinggi untuk mengembangkan olahan bawang merah pasca panen secara mandiri. Selain itu sarana dan prasarana pengolahan juga dibutuhkan untuk mengembangkan potensi petani untuk pengolahan bawang merah pasca panen (*off farm*). Dari hasil wawancara dengan bapak Achmad Zakin, Kepala Bidang Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, pada tanggal 28 Januari 2016 di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut:

“..kalau petani mau mengolah bawang goreng dengan jumlah besar ya mereka perlu saran dan prasarana pengolahan tersebut, seperti wajannya, kmpornya, lalu alat pengemasnya, dan itu masih menjadi rencana pengembangan kedepan. Untuk itu kita mengadakan hubungan kerjasama dengan perusahaan besar yang butuh bawang merah dengan siste kemitraan itu. Sampai saat ini kita sudah bermitra dengan perusahaan indofood dan mie sedap. Jadi petani jadi pemasok kebutuhan perusahaan tersebut.”

Selain sub sistem agribisnis diatas, terdapat subsistem penunjang yang sangat penting dalam pengembangan agribisnis di kawasan agropolitan kecamatan Sukomoro yang meliputi:

1. Permodalan atau perkreditan, permodalan merupakan faktor pening dalam pengembangan usaha agribisnis. Petani membutuhkan akses permodalan yag bisa digunakan dalam usaha tani. Selain itu akses permodalan yang mudah kepadaa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bisa menjadi embrio pengembangan industri pertanian terutama industri pasca panen produk-produk bawang merah,
2. Penelitian dan pengembangan, dibutuhkan untuk mencipkatan bbit unggulan bawang merah, teknik budidaya tanaman bawang merah yang baik sehingga dapat meningkatkan produktifitas produksi bawang merah.
3. Pendidikan dan penyuluhan merupakan unsur yang sangat penting dalam memberikan pendampingan baik kepada petani maupun sektor industri pertanian, pendidikan dan penyuluhan kepada petani mauun sektor industri pertanian, pendidikan dan penyuluhan kepada petani berupa transformasi ilmu dan pengetahuan tentang budidaya tanaman bawang merah serta memberikan pendampingan kepada petani dalam proses budidaya tanaman. Pendidikan dan penyuluhan terhadap industri pasca panen yang berbentuk industri mikro dan kecil memberikan manfaat kepada usaha kecil tentan pengetahuan terhadap produk baik dari proses pengolahan, *packaging* dan diversifikasi pengolahan produk pertanian.

4. Transportasi dan pergudangan, sarana transportasi merupakan masalah yang krusial dalam pengembangan agribisnis di Kawasan Agropolitan. transportasi yang baik bisa mengurangi biaya distribusi yang dikeluarkan petani dalam mengangkut produk pertanian ke pasar, hal ini bisa meningkatkan daya saing produk pertanian di tingkat petani.
5. Kebijakan pemerintah, merupakan payung hukum dalam pengembangan agribisnis Kabupaten Nganjuk, yaitu kebijakan yang bersifat makro maupun mikro antara lain membantu promosi produk unggulan bawang merah melalui event-event pameran produk unggulan daerah memberikan subsidi petani, sebagai fasilitator dan mediator antara petani, UMKM dengan pihak swasta dalam pengembangan produk pertanian dan industri pasca panen, serta dapat membuat inkubasi bagi usaha industri kecil yang berbasis produk pertanian.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diidealkan merupakan pola komunikasi pokja sebagai pelaku implementasi agropolitan dalam melaksanakan program pengembangan kawasan agropolitan. Pola komunikasi tersebut berupa koordinasi antar pokja serta sosialisasi kepada *stakeholder* terkait. Pola koordinasi dilakukan karena pelaksanaan pengembangan kegiatan agropolitan merupakan kerjasama dari SKPD-SKPD yang tergabung dalam pokja serta.

Berikut ini Program umum Kebijakan Agropolitan berbasis komoditas

Unggulan:

Tabel 13. Program umum Kebijakan Agropolitan berbasis komoditas Unggulan

No.	Program Umum	Kegiatan
1.	Pengembangan SDM Petani	Pelatihan peningkatan mutu dan produktivitas komoditas unggulan
		pengenalan teknologi budidaya mutakhir komoditas unggulan yang ramah lingkungan
		pembentukan petugas penyuluh pertanian (PPL).
2.	Penguatan kelembagaan tani	Membentuk dan mengaktifkan forum kelompok tani (Poktan) dan Gabungan kelompok Tani
3.	Pengembangan Sarana dan prasarana	penyediaan jaringan jalan
		penyediaan jaringan irigasi
		penyediaan jaringan air bersih
		penyediaan jaringan telekomunikasi
		penyediaan jaringan listrik
		penyediaan jaringan drainase dan sanitasi
4.	Pengembangan Agrobisnis	penyediaan jaringan persampahan
		Menciptakan Event Festival Bawang Nganjuk
		pengembangan agroindustri
		peningkatan pasar Sentra Pengembangan Agropolitan (SPA).

Sumber : olahan penulis

#### b. Kelompok sasaran

Kelompok sasaran merupakan sekelompok orang-orang yang keadaannya dipengaruhi oleh kebijakan yang bersangkutan. Kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan agropolitan adalah petani bawang merah yang ada di kawasan agropolitan Sukomoro. Data Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 tercatat ada 3.595 petani bawang merah.

Petani bawang merah menjadi kelompok sasaran agropolitan karena kebijakan agropolitan ini berbasis komoditas unggulan bawang merah. Selain itu karena mayoritas mata pencaharian masyarakat Sukomoro adalah sebagai petani bawang merah. Hasil wawancara dengan Bapak Baidowi, kepala sub bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, Bappeda Kabupaten Nganjuk pada tanggal 31 Desember 2015 di Kantor Bappeda Kabupaten Nganjuk, adalah sebagai berikut:

“Kebijakan agropolitan ini tujuannya meningkatkan kesejahteraan petani dengan membangun kota tani. Nah mayoritas penduduk Sukomoro itu bekerja di bidang pertanian khususnya petani bawang merah. Jadi kalau agropolitan ini berjalan tepat sasaran bisa meningkatkan kesejahteraan mayoritas penduduk dan dampaknya bisa meningkatkan ekonomi daerah”.

Kesejahteraan petani bawang merah merupakan tujuan dari kebijakan agropolitan dalam mengembangkan kawasan agropolitan. Program-program yang dilaksanakan adalah untuk memperlancar kegiatan petani dalam menghasilkan bawang merah sehingga memberikan dampak perubahan hidup petani bawang merah ke arah yang lebih baik. Tanggapan petani terhadap kebijakan agropolitan juga mempengaruhi implementasi kebijakan agropolitan.

Program pengembangan SDM Petani yang dilaksanakan oleh tim pokja pengembangan kawasan agropolitan dengan pelatihan peningkatan mutu dan produktivitas komoditas unggulan bawang merah dilaksanakan melalui sosialisasi peningkatan mutu dan produktivitas komoditas unggulan bawang merah dan pengenalan teknologi budidaya mutakhir komoditas unggulan yang ramah lingkungan. Dengan adanya program tersebut petani mampu menghasilkan

produktivitas bawang merah dengan kualitas tinggi dan dengan jumlah yang besar. Hal ini didukung juga dengan keahlian dasar petani dalam menghasilkan varietas bawang merah. Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Eko selaku ketua kelompok tani Putra Maju WKPP Sukomoro I pada tanggal 28 Januari di Dsn. Ngrandu Ds. Pehserut adalah sebagai berikut :

“Jenis-jenis varietas bawang merah yang selama ini dikembangkan oleh petani adalah Bauji, Apitan, Tailan, labuhan serta yang baru-baru ini dikembangkan adalah jenis Tajuk. Setiap jenis varietas memiliki perbedaan umur pembibitan. Semakin tinggi umur semakin baik kualitasnya. Selain itu musim juga mempengaruhi penanaman bawang merah. Saat musim hujan, Bauji menjadi andalan para petani, sedangkan saat kemarau, tajuk adalah andalan saat musim kemarau”.

Sedangkan hasil wawancara dengan bapak Achmad Zakin, Kepala Bidang Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, pada tanggal 28 Januari 2016 di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, sebagai berikut:

“Di Nganjuk, petani tidak hanya menanam bawang merah 2 kali setahun. Namun ada juga yang 3 sampai 4 kali. Ini artinya banyak yang menerapkan monokultur dengan demikian petani bawang merah mampu menghasilkan produk bawang merah dengan jumlah besar.”

Petani bawang merah kawasan agropolitan Sukomoro juga mampu menerapkan teknologi budidaya yang ramah lingkungan dalam memberantas organisme pengganggu tumbuhan (OPT). Untuk mengatasi masalah OPT petani menerapkan *solar cell* disekitar ladang untuk menarik perhatian serangga sehingga menekan penggunaan pestisida. Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Eko selaku ketua kelompok tani Putra Maju WKPP Sukomoro I pada tanggal 28 Januari di Dsn. Ngrandu Ds. Pehserut adalah sebagai berikut :

“Saat masa tanam, petani sengaja memasang *solar cell* di sekitar ladang, guna menarik serangga, sehingga mampu menekan



penggunaan pestisida. Penggunaan alat ini mampu menekan sampai 80%. Kami hanya gunakan fungisida untuk pengendali jamur”.

Selain itu petani bawang merah kawasan agropolitan Sukomoro telah mampu menerapkan sistem tanam kultur teknis secara monokultur. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Achmad Zakin, Kepala Bidang Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk bahwa petani bawang merah di Sukomoro tidak hanya menanam bawang merah 2 kali setahun namun juga 3 sampai 4 kali secara monokultur. Dengan demikian petani bawang merah telah mampu menghasilkan bawang merah dengan kualitas tinggi serta dengan jumlah besar yang berwawasan teknologi budidaya ramah lingkungan (hasil wawancara pada tanggal 28 Januari 2016 di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk).

Daya tanggap petani dalam program penguatan kelembagaan petani terlihat dari keikutsertaan seluruh petani yang tergabung dalam kelompok tani (poktan) dalam gabungan kelompok tani (gapoktan). Selain itu petani bawang merah aktif dalam forum komunikasi gapoktan dengan keikutsertaan petani dalam rapat gapoktan yang dilakukan setiap bulannya. Keaktifan petani dalam meningkatkan forum komunikasi gapoktan terlihat kemauan petani mengadukan segala permasalahannya dalam memproduksi bawang merah kepada Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) untuk mendapatkan jalan keluar. Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Eko selaku ketua kelompok tani Putra Maju WKPP Sukomoro I pada tanggal 28 Januari di Dsn. Ngrandu Ds. Pehserut adalah sebagai berikut :

“kita antusias bergabung dalam gapoktan ini karena dengan begini kegiatan pertanian khususnya dalam kepentingan memproduksi

bawang merah lebih terorganisir jadi petani mempunyai tujuan jelas. Selain itu dengan adanya gapoktan ini hubungan antar petani lebih baik, lebih terjaga. Hubungan kemitraan dengan pedagang juga lebih mudah dengan adanya gapoktan ini.”

Penggunaan sarana dan prasarana yang dikembangkan oleh tim pokja agropolitan dimanfaatkan dengan baik oleh petani bawang merah seperti jaringan jalan, irigasi, telekomunikasi, listrik, drainase dan sanitasi serta persampahan. Namun masih perlu pengembangan sarana dan prasarana pada jaringan air bersih karena petani memenuhi kebutuhan air bersih dengan swadaya masyarakat. Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Eko selaku ketua kelompok tani Putra Maju WKPP Sukomoro I pada tanggal 28 Januari di Dsn. Ngrandu Ds. Pehserut adalah sebagai berikut :

“Sarana dan prasarana seperti jalan, listrik, telekomunikasi, irigasi sudah sangat membantu para petani namun untuk memenuhi air bersih petani masih menyediakan secara mandiri dengan sanyo. Biasanya air sanyo bau besi seperti itu. Kalau mau pakai PDAM mahal. Dengan demikian pemerintah menyediakan kebutuhan air bersih dari PDAM seperti itu.”

Petani bawang merah kawasan agropolitan Sukomoro sangat mengharapkan pemerintah segera mengembangkan fungsi pasar SPA. Selain itu petani juga mengharapkan mengembangkan agroindustri segera dilaksanakan. petani yakin dengan pengembangan agroindustri bawang merah dimaksimalkan akan membantu meningkatkan ekonomi petani serta dapat membuka lapangan kerja baru. Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Eko selaku ketua kelompok tani Putra Maju WKPP Sukomoro I pada tanggal 28 Januari di Dsn. Ngrandu Ds. Pehserut adalah sebagai berikut :

“petani sangat mengharapkan pemerintah membantu mengembangkan agroindustri pengolahan bawang merah pasca panen agar bisa dikelola rumah tangga petani sehingga dapat menjadi rumah tangga industri bawang goreng”.

Dapat disimpulkan bahwa kelompok sasaran merupakan kelompok yang akan dipengaruhi keadaannya yaitu pengaruh menjadi lebih baik dengan kebijakan yang ada. Tanggapan kelompok sasaran terhadap pelaksanaan kebijakan mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan agropolitan adalah petani bawang merah di kawasan agropolitan Sukomoro.

#### c. Badan-badan Pelaksana

Badan-badan pelaksana adalah pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan publik. Dalam kebijakan agropolitan, badan-badan pelaksana tergabung kedalam kelompok kerja (pokja). Pokja tersebut terdiri dari SKPD-SKPD terkait arah kebijakan pengembangan kawasan. Telah dijelaskan bahwa implementasi Kebijakan Agropolitan merupakan praktek kolaborasi antara pihak-pihak terkait yang tergabung dalam kelompok kerja (pokja) pengembangan kawasan agropolitan. Berikut adalah susunan pokja agropolitan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188/122/K/411.013/2009.

Susunan keanggotaan pokja agropolitan Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja (POKJA) Program Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Nganjuk

No.	Kedudukan Dalam Pokja	Jabatan Dalam Instansi
1.	Pelindung I	Bupati Nganjuk
2.	Pelindung II	Wakil Bupati Nganjuk
3.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
4.	Ketua	Kepala Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Sekretaris Badan Perencanaan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Nganjuk
6.	Seksi-seksi	
	a. Seksi Pengembangan SDM	
	Koordinator	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi
	Pelaksana Teknis	1. Kepala Bidang Holtikultura Dinas Pertanian 2. Kasubid Ekonomi dan Kesra Bappeda 3. Kepala Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 4. Staff Bappeda
	b. Seksi Pengatan kelembagaan	
	Koordinator	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan
	Pelaksanaa teknis	1. Kepala bidang Sosial Ekonomi Badan perencanaan 2. Kepala Sub bidang Pendidikan dan Kesehatan Bappeda 3. Staff Bappeda
	c. Seksi Pengembangan Saran dan Prasarana	
	Koordinator	Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang
	Pelaksanaa teknis	1. Kepala Dinas PU Pengairan 2. Kepala bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang Dinas PU Cipta Karya 3. Kepala seksi pembangunan Jalan Dinas PU Bina Marga 4. Staff Bappeda
	d. Seksi Pengembangan Agribisnis	
	Koordinator	Kepala Dinas Pertanian Daerah kabupaten Nganjuk
	Pelaksanaa teknis	1. Kepala Bidang Holtikultra Dinas Pertanian 2. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi 3. Staff Bappeda

Sumber: Masterplan Kawasan Agropolitan Kabupaten Nganjuk Tahun 201

Dari hasil observasi penulis bahwa pokja sebagai organisasi pemerintahan yang bertanggung jawab melakukan perencanaan pembangunan daerah. Organisasi tersebut berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam bidang perencanaan dan bertanggung jawab atas hasilnya sebagai wujud dari pelaksanaan pembangunan pengembangan kawasan agropolitan. Analisa kebijakan agropolitan dengan pengembangan kawasan agropolitan dilakukan dengan kajian potensi dan masalah fisik kawasan. Untuk itu pelaksana pengembangan kawasan disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan potensi dan masalah fisik wilayah tersebut. Hal ini dapat dilihat pada seksi-seksi program kegiatan sesuai dengan tanggung jawab pokja.

#### d. Unsur-Unsur lingkungan yang mempengaruhi

Unsur-unsur lingkungan pada suatu kawasan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan. Lingkungan yang kondusif akan mendorong implementasi kebijakan. Sedangkan lingkungan yang tidak kondusif akan menjadi sumber kegagalan implementasi kebijakan. Unsur lingkungan sosial, ekonomi dan politik pada kawasan agropolitan Sukomoro menjadi unsur lingkungan yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan agropolitan.

Lingkungan sosial adalah tempat dimana masyarakat saling berinteraksi dan melakukan sesuatu secara bersama-sama antar sesama maupun dengan lingkungannya. Masyarakat kawasan agropolitan mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu mereka juga tergabung dalam poktan dan gapoktan. Dengan persamaan tersebut proses interaksi antar masyarakat berjalan

dengan baik. Proses interaksi tersebut dapat dilihat dari kekompakan serta kerukunan masyarakat. Selain itu keinginan untuk saling membantu sangat tinggi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Wahyu Eko selaku ketua kelompok tani Putra Maju WKPP Sukomoro I bahwa dengan adanya poktan dan gapoktan bawang merah menjadikan hubungan baik yang lebih terjaga antar masyarakat (hasil wawancara pada tanggal 28 Januari di Dsn. Ngrandu Ds. Pehserut).

Unsur lingkungan yang berpengaruh selanjutnya adalah lingkungan ekonomi. lingkungan ekonomi adalah kondisi ekonomi pada suatu wilayah dimana kebijakan itu diimplementasikan. Kondisi ekonomi memiliki dampak yang kuat terhadap implementasi kebijakan tersebut. Kondisi ekonomi petani bawang merah Kawasan Agropolitan Sukomoro secara keseluruhan masih dalam keadaan yang belum stabil. Hal ini terlihat dari harga bawang merah yang memiliki fluktuasi yang tinggi. Seringkali ketika musim panen harga bawang merah di pasar turun sehingga harga dirtinggat petani menjadi rendah. Hal itu menyebabkan pendapatan petani dari hasil penjualan produk bawang merah tidak tentu. Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Eko selaku ketua kelompok tani Putra Maju WKPP Sukomoro I pada tanggal 28 Januari di Dsn. Ngrandu Ds. Pehserut adalah sebagai berikut :

“Ketidakmampuan petani dalam menentukan harga bawang merah sering membuat petani merugi karena harga ditentukan oleh kondisi pasar, selain itu isu ekspor dan impor juga menjadi pengaruh harga bawang merah. Ketika masa panen datang, bawang merah di petani berlimpah, harga turun anjlok. Kalau tidak segera dijual petani tidak bisa membeli bibit lagi untuk penanaman selanjutnya”.

Unsur lingkungan terakhir yang mempengaruhi kebijakan adalah lingkungan politik. Kondisi politik menunjukkan kekuatan kelompok-kelompok yang berwenang dalam mempengaruhi implementasi kebijakan baik dari perumusan kebijakan hingga pelaksanaannya. Dalam kebijakan agropolitan, kelompok yang berwenang merumuskan kebijakan adalah Bappeda kabupaten Nganjuk dimana kebijakan tersebut dituangkan kedalam *masterplan* Kawasan Agropolitan tahun 2013. Perumusan kebijakan agropolitan ini berorientasi pada kepentingan masyarakat, yaitu pengembangan kawasan agropolitan. Selain itu, kelompok-kelompok lain yang berpengaruh seperti perangkat desa juga mendukung kebijakan agropolitan ini. Hasil wawancara Bapak Baidowi, kepala sub bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, Bappeda Kabupaten Nganjuk pada tanggal 31 Desember 2015 di Kantor Bappeda Kabupaten Nganjuk, adalah sebagai berikut :

“Kebijakan agropolitan dirumuskan untuk kepentingan masyarakat khususnya petani. Tidak ada kepentingan kelompok-kelompok lain”.

Selain itu Bapak Wahyu Eko selaku ketua kelompok tani Putra Maju WKPP Sukomoro I pada tanggal 28 Januari di Dsn. Ngrandu Ds. Pehserut adalah sebagai berikut :

“Tidak ada kelompok-kelompok yang memanfaatkan kebijakan agropolitan untuk kepentingan mereka. Kita sebagai petani merasa kebijakan ini untuk kepentingan petani bawang merah”.

Selain itu dukungan pengembangan kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan bawang merah didukung penuh oleh Bupati Nganjuk, Taufiqurahman. Dukungan bupati terlihat dari antusias bupati dalam membangun infrastruktur pertanian. Hasil wawancara Bapak Baidowi, kepala sub bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, Bappeda Kabupaten Nganjuk pada tanggal 31 Desember 2015 di Kantor Bappeda Kabupaten Nganjuk, adalah sebagai berikut :

“Dukungan dari Bupati untuk meningkatkan pertanian, bupati membangun jaringan irigasi pedesaan (jides) dan jaringan irigasi tingkat usaha tani (jitut) di 20 Kecamatan untuk seluruh kelompok tani. Dengan demikian diharap mempermudah kegiatan pertanian dan hasil produksi pertanian meningkat”.

Dari observasi penulis bahwa bantuan dari Bupati tentu mempermudah petani dalam memproduksi hasil pertanian. Walaupun tidak dikhususkan untuk program pengembangan kawasan, bantuan tersebut juga dirasakan oleh poktan bawang merah pada kawasan agropolitan Sukomoro. Seperti yang kita ketahui bahwa Bupati Nganjuk juga merupakan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Nganjuk. Dengan demikian secara tidak langsung bahwa bantuan tersebut merupakan faktor politik yang mempengaruhi petani bawang merah di kawasan agropolitan Sukomoro. Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Eko selaku ketua kelompok tani Putra Maju WKPP Sukomoro I pada tanggal 28 Januari di Dsn. Ngrandu Ds. Pehserut adalah sebagai berikut :

“.....ya kita senang kalau ada pemimpin yang peduli dengan rakyat. Yang peduli sama kepentingan rakyat. Kalau pemimpinnya peduli sama kita berarti kita gak salah sudah memilih”.



Jadi dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur lingkungan yang mempengaruhi kebijakan agropolitan adalah lingkungan sosial, lingkungan ekonomi serta lingkungan politik. Hubungan sosial masyarakat kawasan agropolitan berjalan baik didukung dengan keterlibatan petani bawang merah ke dalam poktan dan gapoktan. Kondisi ekonomi petani bawang merah kawasan agropolitan sukumoro masih belum stabil dikarenakan harga jual bawang merah yang memiliki fluktuasi tinggi. Sedangkan kondisi politik di kawasan agropolitan sukumoro sangat mendukung kepentingan petani.

## **2. Pembangunan ekonomi sebagai dampak pengembangan kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan di kawasan agropolitan bawang merah Kecamatan Sukumoro**

Pembangunan ekonomi adalah proses yang menyebabkan perubahan karakteristik penting suatu masyarakat. Perubahan karakteristik tersebut mengarah pada perubahan struktur ekonomi. Pembangunan ekonomi daerah berarti perubahan karakteristik struktur ekonomi di suatu wilayah yang berdampak pada daerah tersebut. Pusat pertumbuhan (*growth pole*) adalah suatu lokasi yang memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik yang menyebabkan berbagai macam usaha yang memiliki nilai ekonomi dengan demikian akan ada peningkatan ekonomi.

Arah kebijakan agropolitan adalah pengembangan kawasan agropolitan. Pengembangan kawasan agropolitan dilaksanakan sesuai dengan arahan pola ruang dan struktur ruang dimana kawasan agropolitan Sukumoro

menjadi wilayah pembangunan ekonomi. Arahkan pola ruang dan struktur ruang kawasan agropolitan Sukomoro menjadi wilayah pembangunan ekonomi karena diharap mampu merubah karakteristik ekonomi masyarakat di kawasan agropolitan Sukomoro. Tinjauan struktur tata ruang kawasan dititikberatkan pada pusat-pusat kawasan sebagai pusat-pusat ekonomi kawasan dan sistem sarana dan prasarana yang menghubungkan antara pusat-pusat kawasan. Tinjauan struktur tata ruang kawasan agropolitan Sukomoro tidak terlepas dari kajian makro dalam upaya untuk mengakomodasi segala perubahan yang mungkin telah terjadi pada konteks makro yang akan berimbas pada kawasan yang sedang ditangani.

Tinjauan struktur tata ruang menghasilkan *output* sebagai berikut :

1. Tinjauan ini akan berdampak pada perubahan struktur wilayah (kabupaten) yang telah ditentukan dalam RTRW Kabupaten Nganjuk.
2. Tinjauan ini akan menghasilkan produk struktur wilayah yang baru dengan penentuan lokasi pusat-pusat pertumbuhan (*growth pole*) yang disesuaikan dengan masing-masing wilayah mengembangkannya. Dimana dalam penentuan *growth pole* dan wilayah pengaruhnya tersebut akan ditentukan oleh poin-poin sebagai berikut:
  - a. Skala pengaruh masing-masing *growth pole* pada wilayahnya;
  - b. Jenis kegiatan dominan pada tiap *growth pole*;
  - c. Jenis komoditas bawang merah pada kawasan agropolitan;
  - d. Tingkat aksesibilitas masing-masing *growth pole*;
  - e. Interaksi antara *growth pole* dengan sub-sub pusat pertumbuhan yang berada di dalamnya;

- f. Kebijakan yang terdapat pada tiap wilayah dimana *growth pole* tersebut berada baik berupa kebijakan emerintahan Kabupaten maupun propinsi yang bersifat gradual bahkan sektoral.

Tinjauan Tata ruang Wilayah (RTRW) dilakukan agar pengembangan kawasan agropolitan yang dilakukan sesuai dengan arahan pola ruang dan struktur ruang Kecamatan Sukomoro. Hasil wawancara dengan Bapak Baidowi, kepala sub bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, Bappeda Kabupaten Nganjuk pada tanggal 31 Desember 2015 di Kantor Bappeda Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

“Pengembangan kawasan agropolitan tidak hanya pengembangan saran dan prasarana pertanian ataupun kelembagaan pertanian. Namun pengembangan kawasan juga dilakukan dengan meninjau arah pola ruang dan struktur ruang. Tinjauan ini dilakukan untuk menentukan fungsi-fungsi wilayahnya sehingga ada pusat pertumbuhan. Dengan adanya pusat pertumbuhan itu diharap ada pertumbuhan ekonomi petani juga.”

Penjabaran dari Rencana Tata Rang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030 adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan pusat pelayanan

Kecamatan Sukomoro yang notabene sebagai sentra penghasil bawang merah terbesar, dipromosikan menjadi wilayah yang menjadi pusat kegiatan lokal.

2. Beberapa desa di kecamatan Sukomoro memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan lokal (PPL) yang memiliki peran vital dalam melayani kegiatan dalam skala antar desa.

Selanjutnya dilakukan peninjauan kawasan strategis Agropolitan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk. Berdasarkan karakteristik Sukomoro yang memiliki potensi komoditas unggulan bawang merah kemudian dikembangkan struktur kawasan agropolitan. struktur kawasan agropolitan adalah sistem wilayah kawasan agropolitan yang mengatur elemen-elemen spasial kawasan sebagai berikut:

1. Sistem kepusatan
2. Skala kegiatan
3. Fungsi kegiatan tiap pusat kegiatan
4. Interaksi antar pusat kegiatan didalam wilayah tersebut.

Penyusunan pola dan stuktur kawasan ini dimulai dengan penentuan titik-titik lokasi sentra komoditas, kemudian diklasifikasikan berdasarkan kapasitas pada produk dan daya dukung lain. Dari klasifikasi tersebut didapat sistem hirarki pusat ordo I sebagai Kota Tani Utama (KTU), pusat ordo II sebagai Pusat Distrik Agropolitan (PDA) dan Pusat Ordo III sebagai Pusat Satuan Kawasan Pemukiman (PSKP). Berikut adalah pola Ruang Kecamatan Sukomoro :

Tabel 15. Pola ruang kecamatan Sukomoro

<b>Pola kawasan</b>	<b>Desa Utama</b>	<b>Desa Pendukung-1</b>	<b>Desa Pendukung-2</b>
Pusat Ordo I (KTU)	Putrean Ngrami Sumengko	Kapas Bungur Pahserut Bagorwetan	Sukomoro Nglundo Ngrenget kedungsuko
Pusat Ordo II (PDA)	Sukomoro	-	-
Pusat Ordo III (PSKP)	Putrean Ngrami Sumengko	Kapas Bungur Pahserut Bagorwetan	Sukomoro Nglundo Ngrenget kedungsuko

*Sumber : Laporan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015-2018.*

Penentuan struktur kawasan Pusat Ordo I sebagai KTU (Kota Tani utama) memiliki fungsi kegiatan sebagai berikut :

1. Pusat perdagangan
2. Pusat berbagi kegiatan final manufaktur
3. Pusat kegiatan jasa asuransi pertanian dan lembaga keuangan
4. *General Agro Industri Service*

Pusat Ordo II sebagai PDA (Pusat Distrik Agropolitan) memiliki fungsi kegiatan sebagai berikut :

1. Pusat perdagangan wilayah (grosir/gudang)
2. Pusat pengelolaan barang jadi dan setengah jadi
3. *Spesial agro industri service*

Pusat Ordo III sebagai PSKP (Pusat Satuan Kawasan Permukiman) memiliki fungsi kegiatan sebagai berikut :

1. Pusat perdagangan lokal
2. Pusat koleksi komoditas lokal
3. Pusat penelitian
4. Pusat pelayanan bagi sub kawasan
5. Pasar harian

Struktur agropolitan Sukomoro sebagaimana terdapat pada tabel diatas, berdasarkan kapasitas produksi diketahui bahwa desa Putren, Ngrami dan Sumengko merupakan Desa Utama (DU). Akan tetapi lokasi ketiga desa tersebut

kurang ideal untuk dijadikan sebagai pusat Ordo-I maupun Ordo-II karena ada desa yang lebih memenuhi syarat untuk disajikan sebagai pusat Ordo. Dengan demikian desa Sukomoro ditetapkan sebagai Pusat ordo-I atau Kota Tani Utama (KTU) sehingga desa utama dan pendukung 1 maupun 2 memiliki jalur distribusi langsung ke Desa Sukomoro sebagai KTU. Hasil wawancara dengan Bapak Baidowi, kepala sub bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, Bappeda Kabupaten Nganjuk pada tanggal 31 Desember 2015 di Kantor Bappeda Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

“Desa Sukomoro adalah kota tani utama dalam penetapan struktur agropolitan. dengan demikian Sukomoro berfungsi sebagai pusat perdagangan. Maka pasar bawang merah Sukomoro adalah pusat perdagangan bawang merah”.

Dari observasi yang dilakukan peneliti, fungsi struktur kawasan belum dilaksanakan dengan optimal. Pada struktur kawasan Pusat Ordo I sebagai KTU (Kota Tani utama) fungsi-fungsi kawasan dipusatkan pada pasar SPA. Namun sampai sekarang pengembangan pasar SPA belum dijalankan dengan maksimal. Pada pasar SPA tersebut belum ada pusat perdagangan, pusat perdagangan, pusat berbagi kegiatan final manufaktur, pusat kegiatan jasa asuransi pertanian dan lembaga keuangan serta *General Agro Industri Service*. Pada struktur kawasan Pusat Ordo II sebagai PDA (Pusat Distrik Agropolitan), fungsi sudah terlaksana dengan baik. Pusat perdagangan wilayah (grosir/gudang) terdapat di pasar bawang merah Sukomoro, pusat pengelolaan barang jadi dan setengah jadi, yaitu pengolahan bawang merah goreng kemasan yang masih dikembangkan. Namun belum ada pusat *Spesial agro industri service*. Struktur kawasan Pusat Ordo III sebagai PSKP (Pusat Satuan Kawasan Permukiman) sudah berjalan dengan baik.

Hal ini terlihat dari sudah tersedianya pusat perdagangan lokal bawang merah di desa Sukomoro, pusat perdagangan lokal di setiap desa, pusat koleksi komoditas lokal diseluruh desa, pusat penelitian sebagai kawasan pengembang varietas bawang merah di desa Sumengko, pusat pelayanan bagi sub kawasan di desa Bungur serta Pasar harian di seluruh desa.

Selain penyusunan pola dan stuktur kawasan agropolitan sebagai pusat pertumbuhan (*growthpole*), pembangunan ekonomi dilihat dari laju pertumbuhan berdasarkan besarnya peningkatan ekspor dari suatu wilayah. Ekspor bawang merah di Kabupaten Nganjuk khususnya bawang merah pada kawasan agropolitan Kecamatan Sukomoro didominasi pada ekspor bibit bawang merah. Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Eko selaku ketua kelompok tani Putra Maju WKPP Sukomoro I pada tanggal 28 Januari di Dsn. Ngrandu Ds. Pehserut adalah sebagai berikut :

“...bibit bawang merah dari Nganjuk ini sangat unggul sehingga diminati oleh luar Nganjuk. Banyak permintaan dari daerah Pare, magetan, Ponorogo, Ngawi, Bojonegoro dan juga daerah luar Jawa”.

Banyaknya permintaan bawang merah dari luar daerah Kabupaten Nganjuk menjadikan penjualan bawang merah berjalan dengan lancar sehingga menciptakan nilai tambah dan mendorong berbagai sektor lain untuk berkembang. Kabupaten Nganjuk memasok 20% Kebutuhan bawang merah nasional. Hasil wawancara dengan bapak Achmad Zakin, Kepala Bidang Holtikultura Dinas

Pertanian Kabupaten Nganjuk, pada tanggal 28 Januari 2016 di Kantor Dinas

Pertanian Kabupaten Nganjuk,:

“....kabupaten Nganjuk sebagai sentra produksi bawang merah kedua setelah Brebes memasok sekitar 20% kebutuhan bawang merah nasional dan pemasok terbesar terhadap kontribusi produksi bawang merah di Jawa Timur.”

Berikut ini Data kontribusi Kabupaten Nganjuk terhadap produksi bawang

merah nasional tahun 2010-2013:

Tabel 16. Kontribusi Kabupaten Nganjuk terhadap Produksi Bawang Merah Nasional Tahun 2010-2013

Uraian	Produksi (Ton)			
	2010	2011	2012	2013
<b>Kabupaten Nganjuk</b>	<b>109.590</b>	<b>114.461</b>	<b>123.463</b>	<b>119.660</b>
Jawa Timur	203.739	198.388	222.863	243.087
Pulau Jawa	846.793	686.745	733.657	789.521
Indonesia	1.048.934	893.124	964.221	1.010.773
<b>Kontribusi Kabupaten Nganjuk:</b>				
Jawa Timur (%)	53,79	57,70	55,40	49,23
Pulau Jawa (%)	12,94	16,67	16,83	15,16
Produksi Nasional (%)	10,45	12,82	12,80	11,84

*Sumber : Dinas Pertanian Kab. Nganjuk (2014) dan BPS (2014), diolah*

Dengan melihat data kontribusi bawang merah Kabupaten Nganjuk terhadap produksi nasional maupun provinsi permintaan bawang merah dari Kabupaten Nganjuk besar. Permintaan bawang merah yang sangat tinggi biasanya menjelang hari raya idul fitri, Idul Adha dan Natal. Jika dilihat dari sisi permintaan, usaha tani bawang merah sangat menjanjikan. Karena jumlah produksi dalam negeri tidak bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri. Prospek pasar bawang merah pada masa mendatang akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya konsumsi masyarakat dan berkembangnya industry makanan di Indonesia. Kabupaten Nganjuk sebagai sentra penghasil bawang merah



mempunyai peluang yang sangat besar untuk mendominasi pasar bawang merah di Indonesia. Dengan demikian produktivitas bawang merah yang tinggi diperlukan oleh petani kawasan agropolitan Sukomoro untuk memenuhi permintaan pasar bawang merah.

Berikut ini data kontribusi Kecamatan Sukomoro terhadap produksi bawang merah Kabupaten Nganjuk:

Tabel 17. Kontribusi Sukomoro terhadap produksi Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2013

Uraian	Produksi (ton)		
	2012	2013	2014
Kabupaten Nganjuk	114.461	123.463	119.660
Kecamatan Sukomoro	97.881	80.635	80.868
Presentase	85,5 %	65,3%	67,6%

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Nganjuk (2014) dan BPS (2014), diolah

Dari hasil observasi penulis bahwa ekspor bawang merah telah mampu menekan impor bawang merah. dari data BPS realisasi ekspor bawang merah Januari-November 2015 sebesar 8.323 ton naik 93% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini didukung dengan pernyataan Bapak Achmad Zakin, Kepala Bidang Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, hasil wawancara pada tanggal 28 Januari 2016 di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk:

“Dengan adanya peningkatan produksi, impor bawang merah secara dapat ditekan menjadi 17.429 ton atau turun 74%. Ekspornya kan naik jadi kebutuhan bawang merah dalam negeri sendiri tepenuhi maka gak ada impor. Hal ini karena produksi domestik bawang merah. peningkatan ini juga berkat bawang merah Kabupaten Nganjuk. Ya alhamdulillah petani makin sejahtera”.

Dampak dari produktivitas bawang merah terhadap perekonomian daerah Kabupaten Nganjuk juga sangat tinggi. Dari data BPS Tahun 2014 bahwa

sektor pertanian di bidang hortikultura mampu menyumbang pendapatan daerah. Pendapatan daerah tersebut dihitung menggunakan statistik Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp. 2.539.153.690,00 pada tahun 2014.

Selain itu bentuk pembangunan ekonomi dapat terjadi bila ada nilai tambah (*value added*) dari produk bawang merah. nilai tambah tersebut menanggulangi harga bawang merah yang fluktuatif. Harga bawang merah ditentukan oleh mekanisme pasar yaitu keseimbangan penawaran dan permintaan. Fluktuasi harga sering terjadi pada komoditas bawang merah yang disebabkan oleh naik turunnya jumlah bawang merah yang ditawarkan di pasar domestik. Hal ini yang masih menjadi kendala bagi petani. Sependapat dengan Bapak Wahyu Eko selaku ketua kelompok tani Putra Maju WKPP Sukomoro I dari hasil wawancara pada tanggal 28 Januari di Dsn. Ngrandu Ds. Pehserut adalah sebagai berikut :

“.....ketidakmampuan petani dalam menentukan harga masih jadi kendala. Pas harga naik kita gak ada dagangan ya gak ada yang dijual nanti pas panen melimpah harga turun. Kalau misal harga bawang merah tetap di harga Rp. 20.000,- petani pasti merdeka.”

Perkembangan harga bawang merah mempunyai pola tertentu dimana pada saat panen raya harga bawang merah turun dan sebaliknya.

Berikut ini data perkembangan harga bawang merah di tingkat konsumen bawang merah tahun 2013-2015:

Tabel 18. Perkembangan Harga Bawang Merah di Tingkat Konsumen Bawang Merah Tahun 2013-2015

No.	Bulan	Harga		
		2012	2013	2014
1.	Januari	14910,00	13093,00	8200,00
2.	Februari	14182,00	13632,00	13400,00
3.	Maret	14888,00	14423,00	25900,00
4.	April	15022,00	14198,00	25500,00
5.	Mei	15842,00	13976,00	20000,00
6.	Juni	15936,00	13591,00	13210,00
7.	Juli	15514,00	14523,00	31600,00
8.	Agustus	14781,00	15634,00	35666,67
9.	September	14123,00	14426,00	16083,33
10.	Oktober	13781,00	13741,00	15900,00
11.	November	13430,00	13926,00	16960,00
12.	Desember	13609,00	14035,00	17800,00
13.	Rata-rata	14668,17	14049,00	20018,33

Sumber: *Nganjuk dalam Angka Tahun 2014*

\*) Panen Raya

Harga bawang merah yang bersifat fluktuatif itu menjadikan pemerintah perlu melakukan sinergi strategis. Dengan demikian upaya peningkatan produksi dengan mengarah pada penambahan nilai (*value added*) produksi bawang merah. Upaya itu dilakukan dengan pengembangan Agribisnis hulu hingga hilir Produk Utama Bawang Merah pada Kawasan Agropolitan.



Gambar 14. Bagan Konsep pengembangan Agribisnis Hulu hingga Hilir Produk Utama Bawang Merah pada Kawasan Agropolitan

*Sumber: Dokumentasi Penulis*

Rantai produksi komoditas unggulan dikembangkan dari hulu ke hilir dengan konsep *manufacturing*. Konsep pengolahan sektor dan sub sektor pertanian yang terpadu dari hulu diperlukan diversifikasi dan intensifikasi yang proporsional guna menunjang jumlah kebutuhan konsumsi akhir produk di daerah atau kawasan. Di samping itu sarana penunjang produksi hulu yang memadai dan tepat juga menjadi faktor penentu keberhasilan *manufacturing* dalam konsep agroindustri.

Pada tahanan *off farm* adalah tahap awal dari proses produksi hilir (dalam arti awal pengolahan produk). Produk unggulan diolah agar memiliki nilai tambah. Nilai tambah akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat daerah yang menikmati nilai tambah tersebut. Semakin luas distribusi dan pengembangan pengolahan komoditas unggulan bawang merah maka semakin tinggi manfaat yang dirasakan. Sistem pengolahan yang dimulai dari oleh Industri Kecil Rumah tangga

(IKRT) juga berdampak pada perluasan manfaat. Pengembangan pengolahan komoditas unggulan IKRT akan memunculkan pola kemitraan. Adanya pola distribusi dan pengolahan yang terstruktur dan terlembaga akan memperkecil resiko dan menambah manfaat. Hasil wawancara dengan Bapak Achmad Zakin, Kepala Bidang Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, pada tanggal 28 Januari 2016 di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk:

“.....pengolahan bawang merah pasca panen (*off farm*) diarahkan khususnya untuk rumah tangga petani yang nantinya jadi industri kecil. Dengan munculnya industri-industri kecil rumah tangga itu akan memunculkan pola kemitraan. Dengan pengembangan ini diharapkan jadi peluang untuk menambah nilai ekonomi masyarakat. Kalau bawang merah dioalah maka nilai jualnya juga akan bertambah”.

Tahap agroindustri skala sedang dan besar akan menggeser sektor pertanian kepada sektor industri dengan tujuan memperbesar nilai tambah (*value added*). Hal ini bukan berarti meninggalkan kegiatan pertanian primer tetapi mengembangkan pertanian primer sebagai kegiatan hulu secara modern agar dapat menghasilkan produk yang baik dan pasokan yang cukup. Proses diversifikasi yang menyeimbangkan juga perlu diperhatikan. Hal ini dibutuhkan untuk menstabilkan harga pasar. Pengembangan rantai produksi komoditas unggulan bawang merah dilakukan dengan konsep agroindustri adalah:

1. Meningkatkan nilai tambah (*value added*) hasil panen bawang merah Kecamatan Sukomoro, baik konsumsi langsung maupun untuk bahan baku industri kecil rumah tangga (IKRT), menengah hingga besar;
2. Memberikan jaminan mutu dan standar produk;
3. Stabilisasi harga;

4. Mengembangkan diversifikasi produk sebagai upaya penanggulan kelebihan produksi atau kelangkaan permintaan pada periode tertentu;
5. Sebagai wahana pengenalan, penguasaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna dan sekaligus sebagai wahana peran seta masyarakat dalam sistem agribisnis.

Agroindtri pengembangan kearah hilir dikawasan agropolitan bawang merah Sukomoro pada tipe IKRT lebih diarahkan untuk:

1. Meningkatkan nilai tambah hasil panen di kawasan agropolitan Kecamatan Sukomoro;
2. Meningkatkan mutu dan kuantitas produksi sesuai dengan kebutuhan pasar domestik;
3. Mendrong agroindustri di pedesaan (Rumah tangga.Kcil) untuk tumbuh menjadi agroindustri menengah dalam wadah koperasi agroindutri;
4. Mendukung agroindustri menengah/besar untuk mengantisipasi perkembangan pasar global akan penawaran dan permintaan;
5. Sebagai wahana dalam ahli teknomologi dan penerapan teknologi nasional serta wahana pemantapan struktur indutri nasinal.

Sedangkan agroindustri pada industri skala menengah atau besar lebih diarahkan untuk kebutuhan nasional dan ekspor yang akan berdampak pada:

1. Meningkatkan daya saing produk guna penetrasi pasar global;
2. Perbaiki mutu produksi yang sejalan dngan globalisasi perdagangan;

3. Mendorong penyebaran agroindustri menengah dan kecil ke berbagai daerah yang prospektif;
4. Meningkatkan produktivitas dan efisiensi agroindustri nasional;
5. Mengembangkan iklim usaha yang kondusif dan atraktif guna menarik minat investor nasional maupun asing di bidang agroindustri.

Berikut ini data potensi nilai tambah *Off farm* dan Potensi kemitraan untuk pengembangan produk unggulan bawang merah kawasan agropolitan Kecamatan Sukomoro:

Tabel 19. Potensi Nilai Tambah *Off Farm* dan Potensi Kemitraan Pengembangan Produk Unggulan Bawang merah

Potensi <i>Value Added</i> ( <i>Off Farm</i> )	Potensi kemitraan dengan industri hilir	Arah pengembangan
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bawang Goreng (VA=250-300%)*1</li> <li>- Pasta Bawang Merah (VA=150-250%)*1</li> <li>- Pickless bawang Merah (VA=150-250%)*1</li> <li>- Minyak Atsiri</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan makanan dalam bentuk penyediaan suply bawang merah segar sebagai bahan baku produk-produknya</li> <li>2. Industri makanan berbahan baku bawang merah</li> <li>3. Dengan industri pengguna minyak atsiri (misal industri kosmetik/parfum)</li> <li>4. Jaringan distribusi produk olahan bawang merah nasional (<i>ritel modern</i>)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan ADM melalui pelatihan pembuatan produk olahan bawang merah</li> <li>2. Bantuan peralatan produksi <i>off farm</i></li> <li>3. Membangun jejaring kemitraan dan pemasaran</li> <li>4. Pengembangan kelembagaan petani yang mengarah kepada terpenuhinya <i>economies of scale</i> khususnya pada proses <i>off farm</i></li> </ol>

Sumber: Masterplan Kawasan Agropolitan Kabupaten Nganjuk Tahun 2013

Jadi dapat disimpulkan bahwa Pengembangan kawasan agropolitan dilaksanakan sesuai dengan arahan pola Ruang dan struktur ruang dimana Kecamatan Sukomoro menjadi wilayah pembangunan ekonomi. Pengembangan tata pola ruang tersebut diklasifikasikan sesuai dengan sistem hirarki ruang. Selain itu pembangunan ekonomi daerah dapat dilihat dari basic ekspor yang dilakukan Kecamatan Sukomoro atas produk bawang merah terhadap kontribusi Nasional. Dengan demikian terdapat pembagian wilayah sesuai dengan fungsi kegiatan dari sistem hirarki ruang tersebut. Namun pengoptimalan fungsi kegiatan sistem hirarki ruang kawasan agropolitan Sukomoro belum dilaksanakan dengan maksimal. Selanjutnya pembangunan ekonomi daerah dilihat dari upaya menambahkan nilai (*value added*) produk unggulan bawang merah pasca panen *off farm*.

### **3. Faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan dalam membangun ekonomi daerah di kawasan agropolitan bawang merah kecamatan Sukomoro**

Proses implementasi kebijakan agropolitan berbasis komoditas unggulan di kawasan agropolitan Sukomoro tentunya mengalami dukungan dan hambatan sebagai indikator pencapaian keberhasilan dan kegagalan kegiatan yang dilakukan.

#### **a. Faktor pendukung**

Pemaparan Bapak Baidowi, kepala sub bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, Bappeda Kabupaten Nganjuk pada tanggal 31 Desember



2015 di Kantor Bappeda Kabupaten Nganjuk mengenai faktor pendukung implementasi kebijakan agropolitan :

“....*masterplan* pengembangan kawasan agropolitan tahun 2009 direview menjadi masterplan kawasan agropolitan tahun 2013 yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan agropolitan sekarang ini, hingga diterbitkan RPJM kawasan agropolitan Tahun 2015-2019. Pemerintah itu konsisten dan memiliki komitmen tinggi untuk terus mengembangkan kawasan agropolitan ini. Kenapa kok pemerintah melakukan ini, kan kita tahu kalau mayoritas masyarakat di Sukomoro, di kawasan agropolitan itu mayoritasnya bekerja sebagai petani, khususnya petani bawang merah jadi itu menjadi dasar pengembangan kawasannya. Dengan kondisi geografis Sukomoro yang sangat mendukung produktivitas bawang merah di musim apapun, lalu dengan sebagian masyarakatnya bekerja sebagai petani bawang merah, kalau kita sebagai pemerintah memfasilitasi kegiatan itu, berarti kita mendukung dan nanti dampaknya peningkatan ekonomi di masyarakat itu. Kalau ekonomi meningkat masyarakat pasti sejahtera. Tidak hanya pada masyarakatnya, daerah nanti juga semakin maju”.

Adapun faktor pendukung dari implementasi kebijakan agropolitan berbasis komoditas unggulan yaitu :

#### 1. Komitmen pemerintah yang tinggi

Masterplan pengembangan agropolitan kabupaten Nganjuk pertama kali pada Tahun 2009. Untuk meningkatkan komitmen implementasi kebijakan agropolitan, selanjutnya dilakukan review pada tahun 2013. Hal ini sesuai dengan pemaparan bapak Baidowi, kepala sub bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, bahwa masterplan pengembangan kawasan agropolitan tahun 2009 direview menjadi masterplan kawasan agropolitan tahun 2013 yang menjadi dasar pelaksanaan kebijakan agropolitan sekarang ini, hingga diterbitkan RPJM kawasan agropolitan Tahun 2015-2019.

Penyusunan kembali *masterplan* pengembangan kawasan agropolitan Kabupaten Nganjuk dilakukan karena terjadi perubahan mendasar pada pola pertumbuhan kawasan. Dengan demikian penyusunan kembali *masterplan* agropolitan disesuaikan dengan aspek spasial, komoditas unggulan kawasan, daya dukung agroindustri serta kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk tahun 2010-2030. Hasil wawancara dengan Bapak Baidowi, kepala sub bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, Bappeda Kabupaten Nganjuk pada tanggal 31 Desember 2015 di Kantor Bappeda Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

“Maksud penyusunan masterplan Kawasan agropolitan Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 ini sebagai petunjuk pelaksanaan instansi terkait sebagai pengambil kebijakan dan stakeholder serta dunia usaha. Dalam masterplan ini tujuannya adalah mengidentifikasi keunggulan potensi komoditas lokal beserta daya dukungnya yaitu SDM, sarana dan prasarananya. Untuk itu penetapan kawasan berdasarkan komoditas unggulan”.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa review masterplan yang dilakukan merupakan etuk dari komitmen pemerintah yang tinggi untuk merumuskan kebijakan sesuai dengan pengembangan kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan. Dengan komitmen tersebut dihasilkan masterplan pengembangan kawasan agropolitan dengan mengembangkan komoditas unggulan bawang merah pada kawasan agropolitan Sukomoro. Dengan demikian peningkatan ekonomi petani dengan produktivitas bawang merah semakin terkelola.

## 2. Dukungan dan partisipasi yang besar dari masyarakat

Dukungan dan partisipasi yang besar dari masyarakat khususnya petani bawang merah yang terlibat langsung dalam poktan dan gapoktan sebagai kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan agropolitan. Bentuk dukungan poktan dan gapoktan terlihat dari keterlibatan mereka dalam setiap program kebijakan agropolitan. Tidak hanya dukungan juga dilihat dari kemampuan petani bawang merah dalam memproduksi bawang merah dengan kualitas tinggi. Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Eko selaku ketua kelompok tani Putra Maju WKPP Sukomoro I pada tanggal 28 Januari di Dsn. Ngrandu Ds. Pehserut adalah sebagai berikut :

“.....petani kita mampu menghasilkan variets-varietas bawang merah yang bagus. Tidak hanya itu petani bawang merah disini juga selalu mengembangkan untuk menemukan varietas yang lebih baik lagi. Kan Nganjuk tidak hanya terkenal bawang merahnya banyak tapi juga bagus-bagus kualitasnya”.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa dukungan dan partisipasi yang besar dari masyarakat khususnya petani bawang merah menjadi pendukung implementasi kebijakan agropolitan. dukungan tersebut terlihat dari keterlibatan petani dalam kegiatan program pengembangan kawasan agropolitan. selain itu kemampuan petani dalam menghasilkan produk bawang merah yang berkualitas tinggi juga menjadi dukungan implementasi kebijakan agropolitan.

### b. Faktor penghambat

Selain faktor pendukung, dalam implementasi kebijakan agropolitan berbasis komoditas unggulan juga ditemui fakto-faktor penghambat yang

mempengaruhi keberhasilan implementasi tersebut. Meningkatkan kemampuan masyarakat pada kawasan agropolitan dalam pengelolaan usaha pertanian tidak hanya terbatas pada aspek pengelolaan usaha pertanian dan tidak hanya terbatas pada aspek produksi (budidaya) tetapi juga aspek agribisnis secara keseluruhan. Pengembangan agribisnis mengacu pada empat lingkup pengembangan agroindustri yaitu :

1. Sub sistem agribisnis hulu

Meliputi pembenihan bawang merah, produksi pupuk serta industri alat-alat pertanian tepat guna.

2. Sub sistem usaha tani

Meliputi proses pembudidayaan tanaman yang meliputi teknik tanam, pemupukan serta proses *intensifikasi* dan *ekstensifikasi* pertanian guna meningkatkan produktivitas pertanian bawang merah.

3. Sub sistem pengolahan

Meliputi pengolahan produk pertanian pasca panen yaitu pengembangan industri rumah tangga dan UMKM yang berbasis pada hasil panen bawang merah.

4. Sub sistem pemasaran

Meliputi saluran distribusi produk pertanian, pemasaran, informasi pasar, perdagangan dan struktur pasar produk pertanian bawang merah.

Selain empat subsistem diatas terdapat sub sistem penunjang, yaitu Permodalan/perkreditan yang merupakan faktor penting dalam pengembangan usaha agribisnis seperti yang kita ketahui bahwa petani membutuhkan akses

permodalan yang bisa digunakan dalam usaha tani baik dalam usaha *on farm* maupun *off farm*. Hasil wawancara dengan bapak Achmad Zakin, Kepala Bidang Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, pada tanggal 28 Januari 2016 di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, terkait faktor penghambat implementasi kebijakan agropolitan:

“.....terkait produksi bawang merah, petani sudah menggunakan benih mandiri, benih diambil dengan menyisakan hasil panen. Bila 80% dijual, maka sisanya 20 disimpan untuk benih. Masalah modal untuk produksi bawang merah itu petani bisa mengatasi sendiri. Yang menjadi masalah itu belum adanya permodalan untuk usaha tani pengolahan bawang merah pasca panen (*off farm*). Sebenarnya potensi ini sangat besar. Lemahnya ya di permodalan ini, selain itu saat ini petani belum mampu mengolah bawang merah pasca panen sendiri karena terbatasnya sarana prasarana pengolahan. Kalau petani mau mengolah bawang goreng dengan jumlah besar ya mereka perlu sarana dan prasarana pengolahan tersebut, seperti wajannya, kompornya, lalu alat pengemasnya, dan itu masih menjadi rencana pengembangan kedepan. Selain itu juga yang menjadi masalah belum optimalnya pengembangan Pasar SPA Sukomoro kan rencananya di SPA itu nanti ada gudang sarana produksi, pusat perdagangan, pusat pembenihan, pokoknya SPA itu jadi pusat kegiatan seperti tata ruang agropolitan. Kalau SPA ini berhasil, berfungsi, tentu kegiatan pertanian lebih terakomodir dan pasti ada peningkatan ekonomi. karena SPA ini gambaran pembangunan ekonomi. Tapi ya sekarang fungsinya belum dioptimalkan”.

Adapun faktor pendukung dari implementasi kebijakan agropolitan berbasis komoditas unggulan yaitu :

1. Rendahnya permodalan petani untuk pengembangan pengolahan bawang merah pasca panen (*off farm*).
2. Terbatasnya sarana pengolahan bawang merah pasca panen (*off farm*).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peningkatan agrobisnis melalui 4 (empat) sub sistem dan 1 (satu) sub sistem penunjang yaitu

permodalan. Permodalan yang kurang maksimal menjadi penghambat pengembangan pengolahan bawang merah pasca panen (*off farm*). Selain itu keterbatasan sarana dan prasana pengolahan juga menjadi penghambat pengolahan bawang merah.

### **C. Analis Data**

#### **1. Implementasi kebijakan agropolitan dalam pengembangan kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan di kawasan agropolitan bawang merah Kecamatan Sukomoro**

Menurut pernyataan yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam Agustinus (2006:139) bahwa pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan, lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang akan dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasi. Pernyataan ini sesuai dengan implementasi kebijakan agropolitan, bahwa kebijakan agropolitan diatur dalam *masterplan* Kawasan Agropolitan Kabupaten Nganjuk tahun 2013. Dalam masterplan ini memuat masalah yang ingin diatasi terkait pengembangan kawasan agropolitan serta menyebutkan secara tegas tujuan dari pengembangan kawasan agropolitan yaitu terwujudnya kawasan pertanian modern sebagai penggerak perekonomian perdesaan yang mampu mensejahterakan masyarakat.

Mazmanian dan Sabatier sebagaimana dikutip dalam Wahab (2008:65) menyatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Hal ini sesuai dengan implementasi kebijakan agropolitan yang dilaksanakan setelah diterbitkannya *masterplan* pengembangan kawasan agropolitan tahun 2013 dengan kegiatan-kegiatan berdasarkan program-program dari arah pengembangan kawasan agropolitan Sukomoro.

Menurut pandangan Smith dalam Tachjan (2006:37) proses implementasi ada empat variabel yang perlu diperhatikan. Keempat variabel tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, oleh karena itu terjadi ketegangan-ketegangan (*tensions*) yang bisa menyebabkan timbulnya protes-protes, bahkan aksi fisik, dimana hal ini menghendaki penegakan institusi-institusi baru untuk mewujudkan sasaran kebijakan tersebut. Ketegangan-ketegangan itu bisa juga menyebabkan perubahan-perubahan dalam institusi-institusi lini. Implementasi kebijakan agropolitan berbasis komoditas unggulan sejalan dengan penuturan Thomas B. Smith mengenai 4 variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan agropolitan berbasis komoditas unggulan yaitu:

a) Kebijakan yang diidealkan

Rumusan kebijakan Agropolitan tertuang dalam masterplan Kawasan Agropolitan tahun 2013. Arah kebijakan agropolitan adalah pengembangan kawasan pertanian menjadi kota tani. Berdasarkan arah kebijakan agropolitan, kebijakan agropolitan dituangkan kedalam 4 (empat) program umum yang selanjutnya program umum tersebut dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan. Sebagaimana diungkapkan oleh Dye (1978) dikutip oleh Islamy (2009:18) bahwa kebijakan merupakan pilihan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dan juga pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu harus ada tujuannya dan kebijakan publik harus melalui semua tindakan pemerintah. Lebih lanjut Nugroho, (2006:141) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara supaya kebijakan bisa mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikannya, terdapat dua pilihan langkah yang ada, yakni langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Implementasi kebijakan agropolitan merupakan praktek kolaborasi antara Pihak-pihak pelaksana, yaitu SKPD-SKPD yang tergabung dalam kelompok Kerja (pokja) agropolitan dengan demikian implementasi kebijakan agropolitan berbasis komoditas unggulan dilaksanakan dengan metode komunikasi melalui koordinasi dan koordinasi. Hal ini sesuai dengan pandangan Smith dalam Islamy (2001) bahwa kebijakan yang diidealkan oleh perumus mendorong kelompok sasaran atau *target group* untuk melaksanakan kebijakan



perlu memperhatikan pola interaksi yang digunakan. Unsur penting dalam pola interaksi yang diidealkan ini adalah komunikasi.

Metode komunikasi melalui koordinasi dalam implementasi kebijakan agropolitan berbasis komoditas unggulan dilaksanakan oleh kelompok kerja (pokja) dalam melaksanakan program-program kegiatan kebijakan agropolitan. Koordinasi ini dilakukan dalam penyampaian tugas dan fungsi pokja sesuai program-program kebijakan. Tugas dan fungsi pokja tersusun dalam susunan keanggotaan pokja program pengembangan kawasan Agropolitan sesuai dengan SK. Bupati Nomor 188/122/K/411.013/2009. Hal ini sependapat dengan Smith dalam Islamy (2001) bahwa koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Selanjutnya Edward II dalam Widodo (2010:97) bahwa kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Dalam implementasi kebijakan Agropolitan, penyampaian kebijakan dilakukan dengan koordinasi antara pokja dan *stakeholder* terkait dalam bentuk konsultasi, asistensi dan penyerapan masukan sesuai dengan tugas dan otoritas yang dimiliki pihak-pihak terkait. Selanjutnya penyampaian kebijakan dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat khususnya petani bawang merah sebagai kelompok sasaran agar mengetahui program-program yang akan dilakukan dalam implementasi kebijakan agropolitan.

Koordinasi dilaksanakan oleh pokja-pokja dalam mengidealkan program pengembangan sarana dan prasarana kawasan Agropolitan serta pengembangan agrobisnis. Koordinasi pengembangan sarana dan prasarana dilaksanakan antar pokja-pokja yang bertanggung jawab dalam penyediaan jaringan jalan, penyediaan jaringan irigasi, penyediaan jaringan air bersih, penyediaan jaringan telekomunikasi, penyediaan jaringan listrik, penyediaan jaringan drainase dan sanitasi, dan penyediaan jaringan persampahan. Selain penyediaan sarana dan prasarana tersebut, koordinasi juga dilakukan dalam perbaikan serta perawatan sarana dan prasarana kawasan agropolitan tersebut. pelaksanaan program ini telah menjawab tujuan kebijakan agropolitan dalam menunjang kegiatan produksi bawang merah. Hal ini sesuai dengan pendapat Suwandi (2005:23-24) bahwa dengan meningkatkan sarana dan prasarana diperlukan untuk memajukan usaha pertanian yang sesuai kebutuhan masyarakat. Fasilitas dari pemerintah diarahkan pada pembangunan dan sarana publik, yang harus dilakukan dengan pendekatan kawasan, dengan memperhatikan hasil identifikasi sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan sumberdaya manusia dan tingkat perkembangan kawasan agropolitan.

Selain kegiatan program pengembangan sarana dan prasarana, koordinasi antar pokja juga dilakukan dalam melaksanakan program pengembangan agrobisnis. Namun, karena terbatasnya sumberdaya dana, pengembangan agrobisnis pada kawasan Agropolitan terhambat. Menurut Van Meter dan Horn dalam Winarno (2001:110) bahwa Sumber-sumber layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan.

Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Menghadapi keadaan ini koordinasi antar pokja dalam program pengembangan agrobisnis tetap berjalan. Sesuai dengan pernyataan Bapak Baidowi, kepala sub bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, Bappeda Kabupaten Nganjuk bahwa pokja tetap mengupayakan bantuan dana untuk pengembangan agrobisnis. diharapkan dengan adanya hambatan ini, koordinasi antar pokja semakin ditingkatkan.

Kebijakan agropolitan berbasis komoditas unggulan selanjutnya diidealkan menggunakan metode komunikasi melalui pelatihan peningkatan mutu dan produktivitas komoditas unggulan bawang merah dan pengenalan teknologi budidaya mutakhir komoditas unggulan yang ramah lingkungan kepada kelompok sasaran. Selain ditujukan untuk kelompok sasaran, pelatihan juga ditujukan kepada pihak-pihak yang mendukung implementasi kebijakan agropolitan. Tujuan dari pelatihan dan pengenalan teknologi ini adalah meningkatkan kemampuan petani dalam menghasilkan produk bawang merah yang berkualitas tinggi dan jumlah besar. Dengan meningkatnya kemampuan petani ini maka SDM petani telah berkembang sesuai dengan tujuan program pengembangan Kualitas SDM petani. Dengan demikian pola interaksi dalam kebijakan yang ideal telah mampu meningkatkan kualitas SDM petani sehingga implementasi kebijakan Agropolitan dikatakan berhasil dilaksanakan dalam program pengembangan kualitas SDM petani.

Selain itu pembentukan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) adalah suatu cara yang dilakukan sebagai penghubung antara petani bawang merah dan

pemerintah. Dengan demikian komunikasi antara pemerintah dan petani bawang merah sebagai kelompok sasaran dapat terjaga dengan baik. Sesuai dengan pendapat Edward III dalam Widodo (2010:95) bahwa komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembentukan PPL sebagai penghubung antara petani dan pemerintah merupakan bentuk dari konsistensi komunikasi. Apabila komunikasi dilakukan secara konsisten maka informasi akan diterima dengan baik oleh kelompok sasaran. Apabila kelompok sasaran menerima dengan baik informasi terkait program dalam arah kebijakan pengembangan kawasan, dapat dikatakan implementasi kebijakan agropolitan telah berhasil.

Selain itu, komunikasi dalam kebijakan yang diidealkan dilaksanakan dalam program penguatan kelembagaan tani. Penguatan kelembagaan tani ditujukan agar bisa menciptakan keberdayaan kelompok tani, gabungan kelompok tani dan juga masyarakat petani sehingga mampu mengembangkan potensi bawang merah secara berkelanjutan. Dengan demikian pemberdayaan petani dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan dengan pendekatan kelompok. Kegiatan penyuluhan melalui pendekatan kelompok dimaksudkan

untuk mendorong terbentuknya kelembagaan petani yang mampu membangun sinergi antar petani dan antar poktan dalam rangka mencapai efisiensi usaha dimana pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan penghasilan petani di kawasan agropolitan Sukomoro. Hal ini sependapat dengan Suwandi (2005:23-24) bahwa dengan meningkatkan kualitas petani dan pengembangan kelembagaan petani serta kelembagaan perdesaan yang berperan dalam pembangunan ekonomi wilayah.

Komunikasi yang dilakukan dalam penguatan kelembagaan petani adalah pembinaan petani yang tergabung dalam poktan dan gapoktan. Pembinaan tersebut bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan petani sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM. Hal ini sesuai dengan langkah pengembangan Kawasan Agropolitan harus melihat kesempatan yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat di masa depan dan melakukan pembangunan yang berkelanjutan yang termuat dalam Bappeda Provinsi Jawa Timur (2011;11) melalui pengembangan SDM pertanian dapat ditempuh melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan pertanian, pengembangan kelembagaan masyarakat yang diarahkan dan terfokus untuk Pengembangan Kawasan Agropolitan dan lain sebagainya. Dengan meningkatnya SDM melalui kelembagaan petani maka pemberdayaan petani dalam merubah pola pikir petani agar mampu meningkatkan usaha tani dan meningkatkan kemampuan petani dalam melaksanakan fungsinya telah berhasil.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan agropolitan diidealkan dengan pola interaksi komunikasi. Komunikasi dilaksanakan dengan baik, yaitu melalui

koordinasi, sosialisasi, pelatihan dan pembinaan. Dengan pola-pola komunikasi tersebut terlihat bahwa pola interaksi dalam implementasi kebijakan agropolitan dilaksanakan dengan jelas dan konsisten. Hal ini sesuai dengan pendapat Edward III dalam Widodo (2010:97) bahwa agar informasi mengenai kebijakan diterima oleh komunikan maka harus memiliki dimensi transmisi (*trasmision*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*). Dengan demikian pola interaksi implementasi kebijakan agropolitan dalam mengidealkan kebijakan telah mampu diterima dan dilaksanakan.

#### b) Kelompok sasaran

Implementasi kebijakan agropolitan berbasis komoditas unggulan pada Kabupaten Nganjuk dalam pengimplementasiannya yang menjadi kelompok sasaran adalah petani bawang merah di kawasan agropolitan Sukomoro. Kelompok sasaran tersebut merupakan unsur yang diperhatikan dalam implementasi kebijakan agropolitan berbasis komoditas unggulan. Kelompok sasaran menjadi indikator keberhasilan implementasi kebijakan agropolitan berbasis komoditas unggulan dalam membangun ekonomi. Apabila kondisi perekonomian kelompok sasaran meningkat dari implementasi kebijakan agropolitan ini, maka implementasi kebijakan agropolitan ini dikatakan mampu membangun perekonomian masyarakat.

Menurut pandangan Grindle dalam Subarsono (2011:93) keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel terkait kelompok sasaran yaitu Sejauhmana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan dan

jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran. Berdasarkan Visi pengembangan kawasan agropolitan yang termuat dalam *masterplan* pengembangan kawasan agropolitan adalah terwujudnya kawasan pertanian modern sebagai penggerak perekonomian perdesaan yang mampu mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan agropolitan secara keseluruhan adalah untuk kepentingan kelompok sasaran yaitu petani bawang merah. Sedangkan manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran atas implementasi kebijakan agropolitan terlihat dari dampak-dampak program yang dilakukan. Dalam program pengembangan SDM manfaat yang diterima petani adalah meningkatnya kemampuan petani bawang merah dalam memproduksi bawang merah yang berkualitas tinggi dan dalam jumlah yang besar. Selain itu kemampuan petani akan penggunaan teknologi budidaya bawang merah ramah lingkungan sangat bermanfaat bagi petani dalam menekan penggunaan pestisida kimia untuk memerangi Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT). dengan demikian kegiatan memproduksi bawang merah semakin ramah lingkungan.

Grindle dalam Wibawa (1994:22) juga memandang bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan dengan konteks kepatuhan dan daya tanggap kelompok sasaran. sependapat dengan Smith dalam Islamy (2001) bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dilihat dari bagaimana respon atau daya tanggap kelompok sasaran. jika kelompok sasarannya berlapang hati untuk menerima dan menjalankan kebijakan yang ditetapkan tanpa ada yang mengeluh maka kebijakan tersebut akan berhasil. Daya tanggap

kelompok sasaran terhadap implementasi kebijakan agropolitan berbasis komoditas unggulan dalam program pengembangan SDM petani terlihat pada kemampuan petani menghasilkan produktivitas bawang merah dengan kualitas tinggi dan dengan jumlah yang besar. Daya tanggap positif terhadap program pengembangan SDM ini didukung dengan dengan keahlian dasar petani dalam menghasilkan produktivitas bawang merah.

Selanjutnya daya tanggap petani dalam program penguatan kelembagaan petani terlihat dari keikutsertaan seluruh petani yang tergabung dalam kelompok tani (poktan) dalam gabungan kelompok tani (gapoktan). Dengan keikutsertaan petani kedalam poktan dan gapoktan merupakan bentuk dari penguatan kelembagaan tani dilakukan melalui pemberdayaan petani untuk merubah pola pikir petani agar mampu meningkatkan usaha tani dan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam melaksanakan fungsinya. Daya tanggap kelompok sasaran terhadap program pengembangan sarana dan prasarana terlihat dari penggunaan sarana dan prasarana yang dikembangkan oleh tim pokja agropolitan dimanfaatkan dengan baik oleh petani bawang merah seperti jaringan jalan, irigasi, telekomunikasi, listrik, drainase dan sanitasi serta persampahan. Daya tanggap terhadap program pengembangan agrobisnis belum dapat dianalisa karena pengembangan agrobisnis ini belum berjalan dengan baik. Namun, daya tanggap terhadap pengembangan agroindustri dimana petani bermitra dengan perusahaan PT. Indofood Sukses Makmur serta PT. Prakarsa Alam Aji (Mie Sedap) ditanggapi dengan baik oleh petani.



Menurut Smith dalam Islamy (2001) Adapun yang mempengaruhi kelompok sasaran untuk dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diimplementasikan bergantung kepada (1) kesesuaian isi kebijakan dengan harapan mereka; (2) karakteristik oleh masing-masing kelompok sasaran, seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, pengalaman, usia, dan keadaan sosial ekonomi. Dalam implementasi kebijakan agropolitan telah dipaparkan diatas bahwa tujuan dari kebijakan agropolitan ini dalah agar terwujudnya kawasan pertanian modern sebagai penggerak perekonomian perdesaan yang mampu mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan agropolitan secara keseluruhan adalah untuk kepentingan kelompok sasaran yaitu petani bawang merah. Kelompok sasaran implementasi kebijakan agropolitan adalah petani bawang merah yang tergabung dalam poktan dan gapoktan. Pembentukan Poktan sesuai dengan karakteristik berdasarkan ciri dan unsur pengikat sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 tentang Pedoman pembinaan Kelompok tani dan gabungan kelompok tani tahun 2013, yaitu :

1. Saling mengenal, akrab dan saling percaya di antara sesama anggota;
2. Mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama dalam mengembangkan komoditas unggulan bawang merah sehingga dapat membangun ekonomi daerah.
3. Memiliki kesamaan dalam tradisi dan pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi dan sosial, budaya atau kultur, adat istiadat, bahasa serta ekologi.

Selanjutnya pembentukan gapoktan berdasarkan lokasi petani bawang merah kawasan agropolitan Sukomoro. Hal ini sesuai dengan pernyataan dengan ibu Dian Purwanti, SP. selaku PPL WKPP Sukomoro II bahwa pembentukan gapoktan ditujukan untuk seluruh poktan bawang merah yang ada di Sukomoro dengan berdasarkan identifikasi wilayah dan kelas poktan. Melihat karakteristik ciri-ciri pembentukan poktan dan gapoktan diatas maka poktan sebagai sasaran dapat mematuhi atau menyesuaikan diri terhadap implementasi kebijakan agropolitan berbasis komoditas unggulan.

Berdasarkan isi kebijakan agropolitan yang sesuai dengan tujuan untuk kepentingan petani bawang merah sebagai kelompok sasaran, manfaat implementasi kebijakan agropolitan berbasis komoditas unggulan serta daya tanggap petani terhadap implementasi kebijakan menjawab pola interaksi dari kebijakan yang diidarkan sehingga petani memberikan tanggapan yang positif terhadap kebijakan tersebut. selain itu karakteristik kelompok sasaran yang sama menjadikan daya tanggap terhadap implementasi kebijakan agropolitan semakin baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa dilihat dari daya tanggap kelompok sasaran, implementasi kebijakan agropolitan telah berhasil.

#### c) Badan-badan pelaksana

Smith dalam Islamy (2001) berpendapat bahwa pelaksana yg bertanggung jawab dalam pelaksanaan. Pelaksana tersebut dapat berupa organisasi ataupun perorangan yang melaksanakan kebijakan di lapangan dengan bertugas sebagai pengelola, pelaksanaan serta pengawasan. Karakteristik lembaga

pelaksana sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Badan-badan pelaksana implementasi kebijakan agropolitan adalah SKPD-SKPD tergabung dalam kelompok kerja (pokja) pengembangan kawasan Agropolitan. Penunjukan pokja-pokja tersebut berdasarkan bidang-bidang SKPD yang sesuai dengan program-program pengembangan kawasan agropolitan. Penunjukan tersebut diharapkan SKPD-SKPD mampu bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya sehingga implementasi kebijakan agropolitan dapat dilaksanakan dengan efektif. Hal ini sesuai dengan pernyataan Edward III dalam Widodo (2010:97) bahwa sumberdaya manusia yang paling penting dalam implementasi adalah staff. Walaupun sebuah kebijakan sangat jelas dan konsisten implementasinya, serta akuratnya penyalurannya, jika tidak ada sumberdaya yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan yang efektif tersebut, pelaksanaannya tidak akan efektif.

Tabel 21. Pelaksana Program Umum Kebijakan Agropolitan

No.	Program Umum	Kegiatan	SKPD
1.	Pengembangan SDM Petani	Pelatihan peningkatan mutu dan produktivitas komoditas unggulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi Daerah</li> <li>- Dinas Pertanian</li> <li>- Bappeda</li> <li>- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata</li> <li>- Bappeda Kabupaten Nganjuk</li> </ul>
		pengenalan teknologi budidaya mutakhir komoditas unggulan yang ramah lingkungan	
		pembentukan petugas penyuluh pertanian (PPL).	
2.	Penguatan kelembagaan tani	Membentuk dan mengaktifkan forum kelompok tani (Poktan) dan Gabungan kelompok Tani	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan</li> <li>- Bappeda Kabupaten Nganjuk</li> </ul>
3.	Pengembangan Sarana dan prasarana	penyediaan jaringan jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah</li> <li>- Dinas PU Pengairan Daerah</li> <li>- Dinas PU Bina Marga Daerah</li> <li>- Bappeda Kabupaten Nganjuk</li> </ul>
		penyediaan jaringan irigasi	
		penyediaan jaringan air bersih	
		penyediaan jaringan telekomunikasi	
		penyediaan jaringan listrik	
		penyediaan jaringan drainase dan sanitasi	
		penyediaan jaringan persampahan	
4.	Pengembangan Agrobisnis	Menciptakan Event Festival Bawang Nganjuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dinas Pertanian Daerah</li> <li>- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Pertambangan dan Energi daerah</li> <li>- Bappeda Kabupaten Nganjuk</li> </ul>
		peningkatan pasar Sentra Pengembangan Agropolitan (SPA).	
		pengembangan agroindustri	

Sumber : olahan Penulis

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pelaksana program implementasi kebijakan agropolitan adalah pokja yang terdiri atas SKPD-SKPD yang bertanggung jawab dalam bidang program umum. Dengan demikian pelaksanaan implementasi agropolitan adalah bentuk kerjasama yang memerlukan koordinasi. Hal ini sependapat dengan Edwards III dalam Winarno (2005:150) bahwa karakteristik struktur birokrasi pelaksana implementasi kebijakan adalah fragmentasi yaitu penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi.

Dengan demikian bila dilihat dari bidang organisasi pelaksana telah sesuai dengan program kegiatan implementasi kebijakan agropolitan. Selain itu karakteristik SKPD-SKPD yang tergabung dalam pokja mendukung koordinasi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan agropolitan sehingga meningkatkan tanggung jawab badan pelaksana terhadap program kegiatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan karakteristik badan pelaksana tersebut telah berhasil melaksanakan program-program dalam implementasi kebijakan agropolitan.

#### d) Unsur-unsur lingkungan yang mempengaruhi

Unsur lingkungan yang dapat memengaruhi implementasi kebijakan agropolitan adalah lingkungan sosial, lingkungan ekonomi dan lingkungan politik. Kemampuan unsur-unsur lingkungan mempengaruhi implementasi dilihat dari bagaimana kondisi unsur-unsur lingkungan tersebut. apabila kondisinya kondusif dapat mendukung implementasi kebijakan agropolitan dan sebaliknya. Hal ini

sesuai dengan pendapat Smith dalam Islamy (2001) bahwa lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak mendukung atau tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan proses implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Kondisi lingkungan sosial yang kondusif pada kawasan agropolitan Sukomoro dapat dilihat dari interaksi masyarakat yang terjadi dengan baik. Hal ini didukung dengan kekompakan serta kerukunan masyarakat. Kondisi ini menjadi kondusif karena mayoritas penduduk kawasan agropolitan adalah petani bawang merah. Rasa persamaan ini menjadikan solidaritas petani makin tinggi. Dengan rasa persamaan ini petani memiliki ikatan persatuan yang kuat sehingga mendukung keberhasilan implementasi kebijakan agropolitan.

Selanjutnya kondisi lingkungan ekonomi pada kawasan agropolitan masih labil. Ketidakmapuan petani dalam menentukan harga bawang merah menjadikan kondisi ekonomi yang tidak dapat diprediksi. Hal ini sesuai dengan penjelasan Bapak Wahyu Eko selaku ketua kelompok tani Putra Maju WKPP Sukomoro I bahwa kelemahan petani terletak pada penentuan harga.

Dengan keadaan tersebut menjadikan petani berharap lebih dengan adanya implementasi kebijakan agropolitan. Sesuai dengan visi pengembangan kawasan agropolitan yang termuat dalam *masterplan* pengembangan kawasan agropolitan adalah terwujudnya kawasan pertanian modern sebagai penggerak perekonomian perdesaan yang mampu mensejahterakan masyarakat. Dengan

kondisi tersebut, tentu masyarakat khususnya petani bawang merah mendukung penuh implementasi kebijakan agropolitan.

Kondisi lingkungan yang mempengaruhi kebijakan yang terakhir adalah kondisi politik. Kelompok-kelompok yang berpengaruh dalam kebijakan agropolitan adalah pelaksana, yaitu pemerintah yang tergabung dalam pokja agropolitan. Implementasi kebijakan agropolitan ini dilaksanakan untuk kepentingan petani bawang merah di kawasan agropolitan Sukomoro. Tidak ada kelompok-kelompok yang berpengaruh yang mementingkan kepentingannya sendiri. Selain itu bentuk dukungan pengembangan kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan bawang merah didukung penuh oleh Bupati Nganjuk. Dukungan dari Bupati untuk meningkatkan pertanian adalah membangun jaringan irigasi pedesaan (jides) dan jaringan irigasi tingkat usaha tani (jitut) di 20 Kecamatan untuk seluruh kelompok tani. Dengan demikian diharapkan hasil produksi pertanian meningkat. Bantuan ini tentu mendukung kegiatan pertanian khususnya petani bawang merah dalam memproduksi bawang merah.

Dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur lingkungan pada kawasan agropolitan mendukung implementasi kebijakan agropolitan. Hal ini dapat dilihat dari kondisi yang kondusif dari lingkungan sosial, lingkungan ekonomi serta lingkungan politik pada kawasan agropolitan Sukomoro. Sesuai dengan Pendapat Smith dalam Islamy (2001) bahwa kondisi yang kondusif berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

## **2. Pembangunan ekonomi daerah sebagai dampak pengembangan kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan di kawasan agropolitan Kecamatan Sukomoro**

Implementasi kebijakan agropolitan dalam pengelolaan kawasan agropolitan memiliki dampak kebijakan terhadap pembangunan ekonomi daerah. Sesuai dengan pendapat Dye (Islamy,2007) bahwa dampak kebijakan dapat dilihat dari situasi atau kelompok sasaran. Objek dalam implementasi kebijakan agropolitan adalah petani bawang merah. Efek yang dituju dari kebijakan agropolitan ini adalah peningkatan kesejahteraan petani bawang merah sebagai kelompok sasaran. Dampak kebijakan agropolitan dapat dilihat dari upaya program pengembangan kawasan sebagai suatu daerah pembangunan ekonomi dengan penentuan pola ruang dan struktur ruang. Dengan pembagian kawasan sesuai fungsi hirarki tersebut menjadikan pemberdayaan petani bawang merah semakin terstruktur.

Arah kebijakan agropolitan adalah pengembangan kawasan agropolitan. pengembangan kawasan agropolitan merupakan suatu upaya untuk mensejahterakan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai salah satu misinya. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat maka diperlukan upaya-upaya membangun sektor-sektor perekonomian. Pembangunan Ekonomi adalah proses meningkatkan perekonomian rakyat melalui pembangunan berbagai sektor. Menurut Adisasmita (2008:13), pembangunan wilayah (regional) merupakan fungsi dari potensi sumber daya alam, tenaga kerja dan sumber daya manusia, investasi modal, prasarana dan sarana pembangunan,



transportasi dan komunikasi, komposisi industri, teknologi, situasi ekonomi dan perdagangan antar wilayah, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah, kewirausahaan (kewiraswastaan), kelembagaan daerah dan lingkungan pembangunan secara luas.

Pengembangan kawasan agropolitan dilaksanakan sesuai dengan arahan pola Ruang dan struktur ruang dimana Kawasan agropolitan Sukomoro menjadi wilayah pembangunan ekonomi. Penyusunan pola dan struktur kawasan sesuai dengan sistem hirarki Pusat Ordo I sebagai Kota Tani Utama (KTU), pusat ordo II sebagai Pusat Distrik Agropolitan (PDA) dan Pusat Ordo III sebagai Pusat Satuan Kawasan Pemukiman (PSKP). Penyusunan pola dan struktur kawasan sesuai dengan pendapat Tarigan (2014:162) bahwa pembangunan ekonomi dapat dilihat dengan pusat pertumbuhan (*Growth Pole*).

Menurut Tarigan bahwa Pusat pertumbuhan (*Growth Pole*) suatu lokasi konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat hubungannya memiliki unsur-unsur kedinamisan sehingga mampu mendorong kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun ke luar. Hal ini Sesuai dengan Penyusunan pola dan struktur kawasan agopolitan Sukomoro. Penentuan struktur kawasan Pusat Ordo I sebagai KTU (Kota Tani utama) memiliki fungsi kegiatan sebagai pusat perdagangan, pusat berbagi kegiatan final manufaktur, pusat kegiatan jasa asuransi pertanian dan lembaga keuangan, *General Agro Industri Service*. Selanjutnya Pusat Ordo II sebagai PDA (Pusat Distrik Agropolitan) memiliki fungsi kegiatan sebagai pusat perdagangan wilayah (grosir/gudang), Pusat pengelolaan barang jadi dan setengah jadi, dan *Spesial agro industri*

*service*. Sedangkan pusat Ordo III sebagai PSKP (Pusat Satuan Kawasan Permukiman) memiliki fungsi kegiatan sebagai pusat perdagangan lokal, pusat koleksi komoditas lokal, pusat penelitian, pusat pelayanan bagi sub kawasan dan pasar harian.

Penentuan struktur kawasan agropolitan sesuai fungsinya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun pengoptimalan fungsi-fungsi sistem hirarki struktur kawasan belum maksimal. Pengoptimalan yang belum maksimal terjadi pada fungsi pusat pengelolaan barang jadi yaitu pengolahan bawang merah pasca panen (*off farm*). Walau demikian, Sukomoro sudah menjadi pusat koleksi komoditas unggulan bawang merah serta menjadi pusat perdagangan bawang merah sehingga Sukomoro mampu memenuhi kebutuhan bawang merah hingga tingkat nasional serta mampu meningkatkan ekonomi petani bawang merah di kawasan agropolitan Sukomoro. Dengan peningkatan ekonomi petani tersebut akan berdampak pada peningkatan ekonomi daerah. Hal ini sesuai dengan pendapat Tarigan (2014:162) bahwa konsentrasi kegiatan ekonomi dapat dianggap pusat pertumbuhan (*Growth Pole*) apabila konsentrasi itu dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi baik dalam maupun keluar.

Berdasarkan pendapat Tarigan (2014:162) Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah suatu lokasi yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*), yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi disitu dan masyarakat senang datang ke lokasi tersebut. Hal ini sesuai dengan pola dan struktur kawasan agropolitan Kecamatan Sukomoro yang menjadi sentra bawang merah sehingga

demikian banyak orang tertarik untuk membeli bawang merah di Sukomoro. Terkenalnya Kecamatan Sukomoro menjadi sentra bawang merah Kabupaten Nganjuk menjadi pusat daya tarik baik dari masyarakat Nganjuk sendiri maupun dari luar daerah Nganjuk. Dengan demikian sentra bawang merah Sukomoro merupakan suatu bentuk pembangunan ekonomi yang berdampak juga pada pembangunan ekonomi daerah.

Selanjutnya empat ciri pusat pertumbuhan menurut pendapat Tarigan (2014:162-163) serta analisa pola dan struktur kawasan agropolitan adalah sebagai berikut:

1. Adanya hubungan intern dari berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi yaitu adanya keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya sehingga apabila ada satu sektor yang tumbuh akan mendorong pertumbuhan sektor lainnya karena saling terkait. Jadi, di dalam kehidupan kota tercipta sinergi untuk saling mendukung terciptanya pertumbuhan. Jika dilihat dari pola dan struktur kawasan agropolitan Kecamatan Sukomoro telah diklasifikasikan berdasarkan sistem hirarki pusat ordo I sebagai Kota Tani Utama (KTU), pusat ordo II sebagai Pusat Distrik Agropolitan (PDA) dan Pusat Ordo III sebagai Pusat Satuan Kawasan Pemukiman (PSKP). Klasifikasi sistem hirarki tersebut membagi fungsi-fungsi setiap ordo yaitu penentuan struktur kawasan Pusat Ordo I sebagai KTU (Kota Tani utama) memiliki fungsi kegiatan pusat perdagangan, pusat berbagai kegiatan final manufaktur, pusat kegiatan jasa asuransi pertanian dan lembaga keuangan serta *General Agro Industri Service*. Pusat Ordo II sebagai PDA (Pusat Distrik Agropolitan)

memiliki fungsi pusat perdagangan wilayah (grosir/gudang), Pusat pengelolaan barang jadi dan setengah jadi dan *Spesial agro industri service*. Pusat Ordo III sebagai PSKP (Pusat Satuan Kawasan Permukiman) memiliki fungsi sebagai pusat perdagangan lokal, pusat koleksi komoditas lokal, pusat penelitian, pusat pelayanan bagi sub kawasan dan Pasar harian. Dengan demikian dapat dilihat bahwa fungsi-fungsi berdasarkan sistem hirarki tersebut saling mendorong dan saling mempengaruhi produktivitas bawang merah.

2. Adanya unsur pengganda (*multiplier effect*) yaitu keberadaan sektor-sektor yang saling terkait dan saling mendukung akan menciptakan efek pengganda. Artinya apabila ada permintaan satu sektor dari luar wilayah, peningkatan produksi sektor tersebut akan berpengaruh pada sektor lain. Peningkatan ini akan terjadi beberapa kali putaran pertumbuhan sehingga total kenaikan produksi dapat beberapa kali lipat dibandingkan dengan kenaikan permintaan di luar untuk sektor tersebut. Unsur efek pengganda mampu membuat kota memacu pertumbuhan. Arah kebijakan pengembangan kawasan agropolitan salah satunya adalah dengan kegiatan pengembangan agribisnis. Strategi pengembangan agribisnis yang digunakan oleh masyarakat di kawasan agropolitan adalah pola agroindustri. Model pengembangan agroindustri berbasis pada potensi utama yaitu bawang merah, mengutamakan sus sistem agroindustri sebagai penggerak kemajuan (*leading sector*). Sebagai *leading sector* maka agroindustri unggulan bawang merah harus memiliki pangsa pasar yang luas, memiliki keterkaitan ke belakang dan ke depan (*backward-forward*) yang tinggi sehingga mampu menarik pergerakan maju sub sistem

agribisnis lainnya. Memprioritaskan industri akan mendapatkan *multiplier effect* terhadap peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja.

3. Adanya konsentrasi geografis yaitu konsentrasi geografis dari berbagai sektor atau fasilitas, selain menciptakan efisiensi di antara sektor-sektor yang saling membutuhkan juga meningkatkan daya tarik (*attractiveness*) dari kota tersebut. Orang yang tersebut bisa mendapatkan berbagai kebutuhan pada lokasi yang berdekatan. Jadi kebutuhan dapat diperoleh dengan lebih hemat biaya, dan tenaga. Sukomoro yang menjadi sentra bawang merah merupakan bentuk dari konsentrasi geografis. Sebagai sentra bawang merah, Sukomoro mampu memenuhi kebutuhan bawang merah secara daerah, provinsi bahkan Nasional (data kontribusi produksi bawang merah Sukomoro dapat dilihat pada tabel 18).
4. Bersifat mendorong pertumbuhan daerah belakangnya yang berarti antara kota dan wilayah belakangnya terdapat hubungan yang harmonis. Kota membutuhkan bahan baku dari wilayah belakangnya dan menyediakan berbagai kebutuhan wilayah belakangnya untuk dapat mengembangkan diri. Penentuan pola dan struktur kawasan agropolitan berdasarkan fungsinya merupakan bentuk hubungan yang harmonis dalam meningkatkan produktivitas bawang merah. fungsi-fungsi tersebut berorientasi pada komoditas unggulan bawang merah. fungsi-fungsi tersebut saling berkaitan hingga menimbulkan bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama tersebut terlihat dari proses koleksi komoditas lokal bawang merah pada pusat ordo III, adanya pusat pengelolaan barang jadi dan setengah jadi pada pusat ordo II serta pusat perdagangan pada pusat ordo I.

Dengan demikian pembagian pusat ordo berdasarkan fungsinya merupakan bentuk kerjasama dalam memproduksi bawang merah dengan hubungan yang harmonis.

Laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. hal ini sesuai dengan pendapat Tarigan (2014:55) berdasarkan teori basis ekonomi bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut dengan mengelompokkan kegiatan basis dan nonbasis. Hanya kegiatan basis yang dapat mendorong ekonomi wilayah. Sesuai dengan kawasan agropolitan Sukomoro yang berbasis komoditas unggulan bawang merah bahwa produksi bawang merah dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dengan produksi bawangmerah yang tinggi dapat meningkatkan ekspor bawang merah. Berdasarkan pernyataan Bapak Achmad Zakin, Kepala Bidang Holtikultura Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk bahwa ekspor bawang merah naik hingga mampu menekan impor bawang merah berkat kontribusi Kabupaten Nganjuk sebagai sentra bawang merah. Dapat disimpulkan bahwa produksi bawang merah sebagai basis komoditas pada kawasan agropolitan mampu meningkatkan ekspor secara nasional. Tarigan (2014:55) menyatakan bahwa dalam pengertian ekonomi regional, ekspor dalah menjual produk/jasa ke luar wilayah baik ke wilayah lain dalam negara maupun ke luar negeri. Produksi bawang merah Kabupaten Nganjuk memang kebanyakn dijual ke luar daerah. Terutama bibit bawang merah yang terkenal unggul. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Wahyu Eko selaku ketua kelompok tani Putra Maju WKPP Sukomoro I bahwa produk bawang merah

Kabupaten Nganjuk banyak dinikmati oleh daerah luar Nganjuk. Melihat kemampuan produk bawang merah Kabupaten Nganjuk memenuhi kebutuhan luar wilayah Nganjuk hingga nasional serta mampu meningkatkan ekspor maka produksi bawang merah ini mampu meningkatkan nilai tambah dan mendorong sektor lain untuk berkembang.

Menurut Arsyad (1999 :108) Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Pengelolaan sumberdaya-sumberdaya tersebut merupakan suatu upaya menambahkan nilai (*added value*) terhadap suatu produk. Model pengembangan produk agroindustri terdiversifikasi merupakan model peningkatan nilai tambah (*added value*). Komoditas unggulan bawang merah memberikan nilai tambah sebesar 2 sampai 3 kali lipat jika melalui proses pengolahan. Bawang merah memang dibutuhkan oleh konsumen akhir dalam bentuk segar yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Di samping itu, bawang merah dapat diolah dalam bentuk lain, antara lain menjadi bawang goreng, pasta bawang, *Pickles* bawang, minyak atsiri dan lain-lain. Pengembangan dan pengolahan bawang merah mengarah pada proses peningkatan mutu sumberdaya manusia dan sumberdaya alam bawang. Peningkatan sumberdaya manusia dibutuhkan untuk menyeimbangkan perkembangan produk-produk yang dapat dihasilkan dari bahan baku bawang merah. hal ini diperlukan baik dari sisi teknis maupun administrative.

Sedangkan peningkatan produk dan kualitas bawang merah diperlukan untuk mendukung pasokan bawang merah berkualitas yang diperlukan pasar lokal, nasional maupun internasional. Pola kemitraan yang diusung menggunakan strategi yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Perusahaan-perusahaan dihimpun menjadi lembaga mitra kerja industri-industri yang memerlukan bahan baku bawang merah. Pola kemitraan akan menjamin bahwa pasokan bahan yang akan didistribusikan dan menjamin para mitra akan ketersediaan pasokan bahan mentah yang dibutuhkan.

Akses manfaat lain dari adanya pengolahan hasil produk bawang merah dengan konsep agroindustri adalah adanya penyerapan tenaga kerja guna mengurangi tingkat pengangguran pada angkatan kerja. Hal ini sesuai dengan visi pengembangan agropolitan Kabupaten yaitu terwujudnya kawasan pertanian modern sebagai penggerak perekonomian perdesaan yang mampu mensejahterakan masyarakat dengan salah satu tolak ukur terciptanya kondisi *full employment*. Secara konseptual strategi pengembangan agribisnis yang tepat digunakan oleh masyarakat agribisnis kawasan agropolitan adalah pola produk terdiversifikasi vertikal. Model ini mengutamakan sub sistem agroindustri sebagai penggerak kemajuan sektor. Model pengembangan produk terdiversifikasi vertikal merupakan model peningkatan nilai tambah (*added value*). Dimana jika produk memiliki nilai tambah akan meningkatkan ekonomi. Hal ini sependapat dengan Tarigan (2014:122) bahwa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi daerah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang



terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi di wilayah tersebut.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi sebagai upaya peningkatan ekonomi rakyat merupakan misi dari pengembangan kawasan agropolitan. Upaya-upaya pembangunan ekonomi dilakukan dengan penyusunan pola dan struktur kawasan agropolitan sehingga menjadi pusat pertumbuhan (*growth pole*). Dengan penyusunan pola dan struktur kawasan ini didapat fungsi-fungsi wilayah sesuai dengan sistem hirarki sehingga memiliki hubungan intern, *multiplier effect*, konsentrasi geografis serta mendorong pertumbuhan daerah belakangnya dalam berbagai kegiatan produksi bawang merah. dengan demikian pengembangan kawasan agropolitan merupakan pusat pertumbuhan dengan menjasi pusat daya tarik (*pole of attraction*).

### **3. Faktor yang berpengaruh terhadap pengembangan kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan dalam membangun ekonomi daerah di kawasan agropolitan bawang merah Kecamatan Sukomoro**

#### **a. Faktor pendukung**

Keberhasilan suatu program tidak terlepas dari beberapa faktor, berikut ini adalah pemaparan faktor pendukung keberhasilan implementasi kebijakan agropolitan berbasis komoditas unggulan pada kawasan agropolitan kecamatan Sukomoro :

### 1) Komitmen pemerintah yang tinggi

Komitmen pemerintah sebagai pelaksana kebijakan yang tinggi menjadi faktor pendukung keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, pemerintah sebagai pelaksana tergabung dalam pokja agropolitan. Komitmen Pokja dapat dilihat dari program revitalisasi pokja yang dilakukan. Selain itu tim pokja agropolitan tetap berusaha mengevaluasi kebijakan agar tepat sasaran. Hal ini terlihat dari review masterplan Kawasan Agropolitan Kabupaten Nganjuk Tahun 2013 atas masterplan Kawasan Agropolitan Kabupaten Nganjuk Tahun 2009 sebagai usaha pengoptimalan implementasi kebijakan agropolitan. Hal ini sependapat dengan Donald P. Warwick dalam Tacjhan (2006 :28) bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi adalah komitmen para pelaksana. Warwick meyakini jika secara umum pemimpin siap untuk berpindah maka prajurit akan mengikutinya. Dengan demikian komitmen pemerintah akan menjadikan kelompok sasaran tetap mengikuti kebijakan dari pemerintah tersebut.

### 2) Dukungan dan partisipasi yang besar dari masyarakat

Masyarakat khususnya petani bawang merah di kawasan Agropolitan Kecamatan Sukomoro mendukung penuh dan berpartisipasi karena implementasi kebijakan agropolitan terlibat langsung dengan kepentingan petani bawang merah. Hal ini sesuai dengan pendapat Donald P. Warwick dalam Tacjhan (2006 :28) bahwa faktor pendukung yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi adalah adanya dukungan kelompok kepentingan (*interest group support*). Dalam

implementasi kebijakan agropolitan ini, kelompok kepentingan adalah petani bawang merah.

Selama ini bentuk dukungan dari petani sudah cukup baik. Bentuk dukungan dari petani dapat dilihat dari keterlibatan seluruh petani bawang merah kedalam poktan dan gapoktan. Dimana poktan dan gapoktan merupakan kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan agropolitan. Petani sebagai kelompok sasaran yang mendukung kebijakan agropolitan ini tentunya sangat memberikan pengaruh yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan agropolitan. Salah satu program umum dari kebijakan agropolitan ini adalah menguatkan kelembagaan tani dengan membentuk dan mengaktifkan forum kelompok tani (Poktan) dan Gabungan kelompok Tani (Gapoktan) Kabupaten Nganjuk. Jadi, dengan aktifnya poktan menjadi dukungan implementasi kebijakan agropolitan.

#### b. Faktor penghambat

Implementasi kebijakan agropolitan berbasis komoditas unggulan memiliki permasalahan yang menjadi faktor penghambat. Pembahasan Faktor penghambat implementasi kebijakan agropolitan berbasis komoditas unggulan adalah sebagai berikut :

##### 1) Rendahnya permodalan petani

Sumber daya anggaran merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi. Sama halnya dengan pandangan Edward III dalam Widodo (2010:97) bahwa terbatasnya anggaran yang tersedia

menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

Terhambatnya kegiatan agrobisnis petani dikarenakan masih minimnya lembaga permodalan untuk petani. Khususnya permodalan untuk pengembangan pengolahan bawang merah pasca panen (*off farm*). Untuk mengembangkan usaha pengolahan bawang merah pasca panen tentu memerlukan modal. Dengan demikian, keadaan redahnya kemampuan permodalan petani sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan Agropolitan.

## 2) Terbatasnya sarana pengolahan bawang merah pascapenen (*off farm*)

Telah dijelaskan bahwa pandangan Edward II dalam Widodo (2010:97) bahwa peralatan merupakan sarana yang baik untuk operasional implementasi. Sumberdaya peralatan akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam imlementasi kebijakan. Demikian juga dengan Implementasi kebijakan Agropolitan.

Minimnya sarana pengolahan bawang merah pasca penen yang dilakukan dengan menghasilkan produk bawang goreng kemasan tidak dapat dilakukan oleh petani sendiri. Sarana produksi tersebut berupa wajan besar, kompor serta alat pengering minyak. Selain itu sarana pembungkusan yang baik

juga diperlukan. Tentu hal ini menjadi penghambat bagi petani untuk mengembangkan pengolahan bawang merah pasca panen (*off farm*).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan agropolitan dalam mengembangkan kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan dalam membangun ekonomi daerah di kawasan agropolitan bawang merah Kecamatan Sukomoro telah dilaksanakan dengan baik. Sesuai dengan teori Thomas B. Smith implementasi kebijakan agropolitan dalam mengembangkan kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan di kawasan agropolitan bawang merah Kecamatan Sukomoro adalah sebagai berikut:

- a. Arah kebijakan agropolitan adalah pengembangan kawasan agropolitan. Kebijakan agropolitan diidealkan dengan pola interaksi komunikasi. Komunikasi dilaksanakan dengan baik, yaitu melalui koordinasi dan sosialisasi. Dengan koordinasi dan sosialisasi program-program kegiatan implementasi kebijakan agropolitan dapat dilaksanakan dan diterima oleh kelompok sasaran. Terdapat 4 (empat) Program dari arah kebijakan agropolitan. Pertama, pengembangan SDM petani yang dilaksanakan dengan Pelatihan peningkatan mutu dan produktivitas komoditas unggulan, pengenalan teknologi budidaya mutakhir komoditas unggulan yang ramah lingkungan dan pembentukan petugas penyuluh pertanian (PPL). Kedua,

- penguatan kelembagaan tani yang dilaksanakan dengan membentuk dan mengaktifkan forum kelompok tani (Poktan) dan Gabungan kelompok Tani. Ketiga, Pengembangan Sarana dan prasarana yang dilaksanakan dengan penyediaan jaringan jalan, penyediaan jaringan irigasi, penyediaan jaringan air bersih, penyediaan jaringan telekomunikasi, penyediaan jaringan listrik, penyediaan jaringan drainase dan sanitasi, dan penyediaan jaringan persampahan. Dan keempat, Pengembangan Agrobisnis dengan melaksanakan pengembangan pasar Sentra Pengembangan Agrobisnis (SPA) dan pengembangan agroindustri. Seluruh program telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan arah kebijakan pengembangan kawasan agropolitan. Namun belum berkembangnya kemampuan petani dalam pengolahan produk bawang merah pasca panen (*off farm*) serta belum optimalnya pengembangan pasar Sentra Pengembangan Agropolitan (SPA) masih menjadi perhatian khusus pokja pengembangan kawasan agropolitan.
- b. Daya tanggap kelompok sasaran terhadap program-program yang dilaksanakan dalam implementasi kebijakan agropolitan berbasis komoditas unggulan sangat baik. Daya tanggap tersebut dapat dilihat dari keterlibatan kelompok sasaran mendukung dengan positif kebijakan agropolitan berbasis komoditas unggulan.
  - c. Badan-badan pelaksana implementasi kebijakan agropolitan adalah SKPD-SKPD tergabung dalam kelompok kerja (pokja) pengembangan kawasan Agropolitan. Penunjukan pokja-pokja tersebut berdasarkan bidang-bidang

dan karakteristik SKPD yang sesuai dengan program-program pengembangan kawasan agropolitan.

d. Unsur-unsur lingkungan pada kawasan agropolitan mendukung implementasi kebijakan agropolitan. Hal ini dapat dilihat dari kondisi yang kondusif dari lingkungan sosial, lingkungan ekonomi serta lingkungan politik pada kawasan agropolitan Sukomoro.

2. Pembangunan ekonomi pengembangan agropolitan Kabupaten Nganjuk yaitu merupakan tujuan dari terwujudnya kawasan pertanian modern sebagai penggerak perekonomian perdesaan yang mampu mensejahterakan masyarakat. Penyusunan pola dan stuktur kawasan agropolitan Sukomoro membagi kawasan sesuai fungsinya karena mempercepat pertumbuhan ekonomi sebagai pusat pertumbuhan (*growth pole*) sehingga Sukomoro menjadi sentra bawang merah. Empat ciri pola dan strukur kawasan agropolitan sebagai pusat pertumbuhan adalah 1) adanya hubungan intern dari berbagai macam kegiatan, 2) adanya unsur pengganda (*multiplier effect*), 3) adanya konsentrasi geografis, dan 4) bersifat mendorong pertumbuhan daerah belakangnya.
3. Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan kawasan agropolitan berbasis komoditas unggulan dalam membangun ekonomi daerah. Faktor pendukung pengembangan kawasan agropolitan adalah komitmen pemerintah yang tinggi dan adanya dukungan dan partisipasi yang besar dari masyarakat. Sedangkan faktor penghambat pengembangan kawasan agropolitan adalah rendahnya permodalan petani dan terbatasnya sarana pengolahan bawang merah pascapenen (*off farm*).



## B. SARAN

Pengembangan potensi pertanian tidak hanya berkaitan dengan pembenihan, penenaman, pemumukan, penanaman serta pemanenan. Upaya peningkatan potensi pertanian dilakukan dengan penyediaan daya dukung infrastruktur sehingga memudahkan akses kegiatan pertanian. Implementasi Kebijakan Agropolitan menjadi penting karena tujuannya terwujudnya kawasan pertanian modern sebagai penggerak perekonomian perdesaan yang mampu mensejahterakan masyarakat. Dari hasil penelitian yang disajikan, peneliti berusaha untuk memberikan saran dalam implementasi kebijakan agropolitan berbasis komoditas unggulan dalam membangun ekonomi daerah pada kawasan agropolitan Kecamatan Sukomoro, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Membentuk kelembagaan masyarakat untuk pengembangan pengolahan bawang merah pasca panen (*off farm*). Pembentukan kelembagaan pengolahan bawang merah pasca panen ini sesuai dengan pendapat Suwandi (2005) bahwa tujuan dan sasaran jangka menengah pengembangan kawasan agropolitan adalah menumbuhkembangkan kelembagaan usaha ekonomi petani *on farm* dan *off farm* yang efektif, efisien dan berdaya saing. Dalam program umum kebijakan agropolitan pengembangan kawasan, kelembagaan petani masih terkait kelembagaan produksi bawang merah (*on farm*). Untuk itu diperlukan pembentukan kelembagaan masyarakat untuk pengembangan pengolahan bawang merah pasca panen (*off farm*). Kelembagaan tersebut diharap mampu mengorganisir kegiatan pengolahan bawang merah pasca panen (*off farm*)

sehingga akan semakin berkembang. Seperti yang telah dipaparkan bahwa harga bawang merah bersifat fluktuatif sehingga perlu cara lain untuk meningkatkan nilai tambah produksi bawang merah.

2. Pengoptimalan fungsi Sentra Pengembangan Agrobisnis (SPA) menjadi pusat kawasan agropolitan Kabupaten Nganjuk. Pengembangan kawasan agropolitan berdasarkan Penyusunan pola dan struktur kawasan yang mengoptimalkan fungsi hirarki kawasan. Sentra Pengembangan Agrobisnis (SPA) merupakan fasilitas pendukung kegiatan agribisnis yang memiliki fungsi sebagai sarana kegiatan jual beli produksi hasil produksi bawang merah, selain itu sebagai tempat penyimpanan dan pengolahan hasil pertanian. Pengoptimalan fungsi SPA masih belum optimal sehingga belum dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Dengan demikian pengoptimalan fungsi SPA ini diperlukan agar kegiatan produksi bawang merah lebih terpusat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, raharja. 2008. *Pembangunan wilayah : Konsep dan teori*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustinus, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan publik*. Bandung: AIPI.
- Ambardi, U.M. 2002. *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah, kajian Konsep dan pengembangan pasar Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah*. Jakarta.
- Arikunto dan Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.
- Badan Litbang Pertanian. 2003. *Panduan Umum : Pelaksanaan pengkajian dan Program Informasi, komunikasi dan desiminasi BPTP*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian.
- Baladina, Nur, *et al.* 2013. Identifikasi Potensi komoditi Pertanian Unggulan Dalam Penerapan Konsep Agropolitan di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. *Jurnal AGRISE Sosial Ekonomi Pertanian*, 8:30 41.
- Bappeda Kabupaten Nganjuk. 2015. *Laporan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nganjuk Tahun 2015-2018*.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Masterplan Kawasan Agropolitan Kabupaten Nganjuk Tahun 2013*.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk tahun 2010-2030*.
- Bappeda Provinsi Jawa Timur. 2014. *Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur*.
- BPS Kabupaten Nganjuk. 2012. *Nganjuk dalam Angka*
- \_\_\_\_\_. 2013. *Nganjuk dalam Angka*
- \_\_\_\_\_. 2014. *Nganjuk dalam Angka*

- Departemen Pertanian Republik Indonesia. 2002. *Pengembangan Kawasan Agropolitan*.
- Dinas Infokom Jawa Timur. 2015. *Kontribusi Bawang Merah Jawa Timur*.
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk. 2016. *Denah Pasar Bawang Merah Sukomoro*.
- Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk. 2014. *Pembentukan Poktan dan Gapoktan Bawang Merah Kecamatan Sukomoro*.
- Direktorat Jenderal Holtikultura Kementerian Pertanian. 2013. *Pedoman Teknis Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Hortikultura Berkelanjutan*.
- Djakapermana, Ruchyat Deni. 2003. *Makalah Seminar Nasional : Pengembangan Agropolitan Dalam Rangka Pengembangan Wilayah yang Berbasis rencana Tata Ruang Wilayah Nasional*.
- Haryono, Sumirin Teguh. 2008. "Evaluasi dampak program Pengembangan Agropolitan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus di Kawasan Agropolitan Waliksarimadu Kabupaten Pematang", diakses pada tanggal 29 November 2015 dari <http://www.repository.ipb.ac.id/>
- Henry, Nicholas. 1989. *Public Administration and Public Affairs, fourth edition*. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs.
- Hughes, Owen E. 1994. *Public Management and Administration*. New York : Santa Martin Press Inc.
- Irkham, Mohammad. 2011. "Ekonomi Tumbuh, Rakyat Sejahtera?". Diakses pada tanggal 11 November 2015 dari <http://m.kompasiana.com/mohammad-irkham/ekonomi-tumbuh-rakyat-sejahtera/>
- Islamy, Irfan. 2001. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta
- \_\_\_\_\_. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika
- Iqbal, Muhammad dan Anugrah, Iwan Setiadjie. 2009. Rancang Bangun Sinergi Kebijakan Agropolitan Dari Pengembangan Ekonomi Lokal Menunjang Percepatan Pembangunan Wilayah. *Jurnal Analisa Kebijakan Pertanian*, 7 (2): 169-188.

- Kabupaten Nganjuk. 2015. Pendopo Kabupaten Nganjuk tahun 1860. Diakses pada tanggal 31 Desember 2015 dari <http://www.Nganjukkab.go.id/>
- \_\_\_\_\_. 2016. Logo Kabupaten Nganjuk tahun 1860. Diakses pada tanggal 13 Januari 2016 dari <http://www.Nganjukkab.go.id/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1990. *Definisi Penghambat*.
- Kasim, Azhar. *Perkembangan Ilmu Administrasi Publik, Manajemen Pembangunan*, No. 3/I, April 1993.
- Kementrian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Cipta Karya. 2012. *Agropolitan dan Minopolitan: Konsep Kawasan Menuju Keharmonisan*.
- Kementrian Pertanian. 2014. *Rencana Strategi Kementrian Pertanian Tahun 2015-2019*.
- Knill, Christopher. 2001. *The Europeanisation of National Administration*. UK: Cambridge University Press.
- Miles, B. Matthew ,A. Michael Huberman and Johanny Saldana. 2014. *Qualitative Data analysis : A Methods Sourcebook Third Edition*. Thousand Oaks CA : Sage Publications.
- Muhammad, Fadel dan Toruan Rayendra. L. 2008. *Reinventing Local Government: Pengalaman dari daerah*. Jakarta: Elex Media Computindo.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2008 *tentang Pengembangan Kawasan Cepat Tumbuh di Daerah*.
- Peraturan Menteri Pertanian No. 82 Tahun 2013 *tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani* .
- Rostow, Walt Whitman. 1960. “*The Stage of economic Growth*”. Diakses pada tanggal 13 Januari 2016 dari <http://e-learning.gunadarma.ac.id/>
- Siagian, sondang P. 1985. *Proses Pengelolaan Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT. Gunung Agung.

- Sistem Informasi Agropolitan. 2015. "*Lokasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Jawa Timur*". Diakses tanggal 28 November 2015 dari <http://agropolitan-jatim.net/>
- \_\_\_\_\_. 2015. "*Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Agropolitan-Minapolitan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015*". Diakses tanggal 28 November 2015 dari <http://agropolitan-jatim.net/>
- Smith, Kevin B., and Christopher W. Larimer. 2009. *The Public Policy Theory Primer*. USA : Westview press.
- Soemarno. 2008. *Komoditas Unggulan Holtikultura Agropolitan Poncokusumo*. Malang: PPSUB.
- Steenis, C.G.G.J. Van, dkk. 2008. *FLORA Untuk Sekolah di Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Subarsono, AG. 2009. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suud, Mohammad. 2006. *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Surat Keputusan Bupati Nganjuk No.188/84/K/411.101.03/2007 *tentang Komoditas Unggulan Kabupaten Nganjuk*.
- Surat Keputusan Gubernur Nomor 520/127/201.2/2009 *tentang Penetapan Kawasan Agropolitan Kabupaten Nganjuk*.
- Suwandi. 2005. *Agropolitan Meretas Jalan Meniti Harapan*. Jakarta: PT. Duta Karya Swasta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung : AIPI
- Tarigan, Robinson. 2014. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 *tentang Penataan Ruang*.

Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wibawa, Samodra. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Wibowo, S. 1999. *Budidaya Bawang Putih, Merah dan Bombay*. Jakarta: Penebar Swadaya



Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayu media.

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo (Anggota IKAPI).

\_\_\_\_\_. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo (Anggota IKAPI).

## Lampiran 1

### SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

	<p align="center"><b>PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK</b> <b>KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN</b> <b>PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH</b> Jl. Supriyadi No. 5 Nganjuk 64412 Telp/Fax (0358) 328079 Email : Kesbang_Ngk@gmail.com</p>
<p align="center"><b>REKOMENDASI PENELITIAN</b> Nomor : 072/ <u>34</u> /411.308/2016</p>	
Memperhatikan :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;</li><li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.</li><li>3. Surat dari Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang, tanggal 22 Desember 2015 Nomor : 1026/UN10.3/PG/2015 Perihal Riset.</li></ol>
Dengan ini menyatakan memberikan Rekomendasi kepada :	
Nama :	DINA ZUHRUFIA
Status :	Mahasiswa Fakultas Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
Alamat :	Jalan MT. Haryono 163 Malang.
Untuk Keperluan :	Ijin Riset
Judul/Tema :	"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM AGROPOLITAN BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN DALAM MEMBANGUN EKONOMI DAERAH STUDI PADA KAWASAN AGROPOLITAN BAWANG MERAH KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN NGANJUK".
Lokasi Kegiatan :	Kantor Kecamatan Sukomoro.
Durasi Kegiatan :	1 (satu) bulan terhitung tanggal surat dikeluarkan.
Penyikut dalam Kegiatan :	-
<p align="center"><b>DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Daerah Hukum Pemerintah Kabupaten Nganjuk;</li><li>2. Menjaga tata tertib, keamanan, kesopanan, dan kesucilaan serta menghindari dari perbuatan, pernyataan, baik lisan, tulisan maupun lukisan yang dapat melukai dan menyinggung perasaan atau menghina Agama, Bangsa dan Negara, maupun penduduk setempat ;</li><li>3. Kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan rencana / proposal yang telah diajukan ;</li><li>4. Tidak diperkenankan menjalankan kegiatan – kegiatan diluar ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dinas/Badan/Kantor/Instansi lokasi Kegiatan ;</li><li>5. Setelah berakhirnya kegiatan, pemegang surat rekomendasi ini wajib melapor kepada Pejabat Dinas/Badan/Kantor/Instansi lokasi Kegiatan ;</li><li>6. Setelah selesai melaksanakan kegiatan, wajib memberikan laporannya kepada Bupati Nganjuk tentang hasil kegiatan maupun temuan-temuan yang ada didalamnya, melalui Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk ;</li><li>7. Surat Rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata pemegang surat Rekomendasi ini tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas.</li></ol>	
Disampaikan Kepada Yth :	Nganjuk, 15 Februari 2016
Kepala UPTD Pertanian Sukomoro	KEPALA KANTOR KESBANGPOLINMAS DAERAH
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk	KABUPATEN NGANJUK
Kepala Dinas Pendapatan, pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk	Drs. ABDUL WAKID, MM
Terbusan disampaikan Kepada Yth :	Pembina Tingkat I
1. Bupati Nganjuk (sebagai Laporan)	NIP. 19631112 198504 1 002
2. Kepala Bappeda Kabupaten Nganjuk	



## **Lampiran 2**

### **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana gambaran umum Kabupaten Nganjuk meliputi:
  - a. Sejarah
  - b. Keadaan Geografis
  - c. Makna lambang
  - d. Pembagian administratif
2. Bagaimana gambaran umum kawasan agropolitan Kecamatan Sukomoro meliputi:
  - a. Kondisi geografis
  - b. Pembagian administratif
  - c. Profil komoditas unggulan
3. Bagaimana profil kebijakan agropolitan meliputi:
  - a. Latar belakang
  - b. Sejarah agropolitan Kabupaten Nganjuk
  - c. Kawasan dan komoditas agropolitan Kabupaten Nganjuk
  - d. Visi dan misi pengembangan kawasan agropolitan
  - e. Tujuan agropolitan
  - f. Landasan hukum
  - g. Hubungan agropolitan dan komoditas unggulan dalam meningkatkan ekonomi daerah
4. Bagaimana implementasi kebijakan agropolitan berbasis komoditas unggulan.
  - a. Kebijakan yang diidealkan
    - 1) Peningkatan SDM Petani
      - Pelatihan peningkatan mutu dan produktivitas komoditas unggulan dan pengenalan teknologi budidaya mutakhir
        - Bagaimana pelaksanaan kegiatan program Pelatihan peningkatan mutu dan produktivitas komoditas unggulan?
        - Kapan pelaksanaan pelatihan dilakukan?
        - Siapa peserta pelatihan?
        - Apa materi pelatihan?
        - Dimana pelatihan dilaksanakan?
        - Kenapa pelatihan dilaksanakan?
      - Membentuk petugas penyuluh pertanian (PPL)
        - Bagaimana pelaksanaan pembentukan petugas penyuluh pertanian (PPL)?
        - Dimana pembentukan PPL dilaksanakan?
        - Apa fungsi dan manfaat PPL bagi petani?
        - Apa tugas PPL?

- Siapa yang membentuk PPL?
- Kapan pembentukan PPL?
- 2) Penguatan kelembagaan tani
  - Membentuk dan mengaktifkan forum kelompok tani (Poktan) dan Gabungan kelompok Tani
    - Bagaimana pelaksanaan pembentukan poktan dan gapoktan?
    - Apa manfaat dan tugas poktan dan gapoktan?
    - Kapan pembentukan poktan dan gapoktan dilaksanakan?
    - Siapa yang menjadi poktan dan gapoktan serta apa syarat menjadi poktan dan gapoktan?
    - Dimana pembentukan poktan dan gapoktan dilaksanakan?
    - Kenapa dibentuk poktan dan gapoktan dalam penguatan kelembagaan?
    - Bagaimana upaya pengaktifan forum poktan dan gapoktan?
- 3) Pengembangan sarana dan prasarana
  - penyediaan jaringan jalan
  - penyediaan jaringan irigasi
  - penyediaan jaringan air bersih
  - penyediaan jaringan telekomunikasi
  - penyediaan jaringan listrik
  - penyediaan jaringan drainase dan sanitasi
  - penyediaan jaringan persampahan
- 4) pengembangan agrobisnis
  - Menciptakan event festival bawang Nganjuk
    - Apa tujuan event festival bawang Nganjuk?
    - Bagaimana pelaksanaan festival bawang Nganjuk?
    - Dimana pelaksanaan event festival bawang Nganjuk?
    - Siapa yang terlibat dalam event festival bawang Nganjuk?
    - Kapan dilaksanakan event festival bawang Nganjuk?
    - Kenapa dilaksanakan event festival bawang Nganjuk?
  - Pengembangan agroindustri
    - Pengolahan bawang merah pasca panen (*off farm*)
    - Kemitraan
  - Peningkatan pasar Sentra Pengembangan Agropolitan (SPA)
- b. Kelompok sasaran
  - Siapa yang menjadi kelompok sasaran implementasi kebijakan agropolitan?
    - Petani bawang merah : bagaimana daya tanggap petani terhadap implementasi kebijakan agropolitan berbasis komoditas unggulan.

- c. Organisasi pelaksana
    - Pelaksana implementasi kebijakan agropolitan tergabung dalam kelompok kerja (pokja) pengembangan kawasan : apa yang menjadi dasar pemilihan pokja.
  - d. Lingkungan yang mempengaruhi
    - Kondisi sosial
    - Kondisi ekonomi
    - Kondisi politik
5. Pembangunan ekonomi sebagai dampak implementasi kebijakan agropolitan berbasis komoditas unggulan di Kecamatan Sukomoro
- Susunan pola dan struktur kawasan : bagaimana susunan pola dan struktur kawasan menjadi pusat pertumbuhan (*growth pole*)
  - Basis ekspor : seberapa besar kontribusi bawang merah Kabupaten Nganjuk dalam memenuhi kebutuhan pasar bawang merah hingga tingkat nasional
  - Penambahan nilai (*value added*) produk bawang merah dengan pengolahan *off farm* serta kemitraan : bagaimana upaya penambahan nilai produk bawang merah
6. Faktor pendukung dan faktor penghambat.

### Lampiran 3

#### DATA KELOMPOK TANI

No.	Nama Kelompok tani	Nama Ketua kelompok	Alamat		Kls	Jumlah Anggota	Luas Lahan (m <sup>2</sup> )	Tahun Berdiri	WKPP
			Dusun	Desa					
1.	Budi Lestari	Suyono	Kali Ulo	Pehserut	L	34	20.000	1994	Sukomoro I
2.	Tani Mandiri	Totok W.	Dorogeneng	Pehserut	P	135	46.000	1988	Sukomoro I
3.	Sido Mulyo	Sutiyadi	Gerung	Pehserut	L	34	38.000	1984	Sukomoro I
4.	Mitro Sejati	Eko Sutajianto	Pehserut	Pehserut	P	45	62.000	2009	Sukomoro I
5.	Budi Iaksono	Sukirno	Bulak	Ngrenget	M	50	27.500	1986	Sukomoro I
6.	Tani Subur	Sukidjo	Kendal	Ngrenget	L	65	27.000	1973	Sukomoro I
7.	Tani Mulyo	Yasin	Ngrenget	Ngrenget	P	65	31.000	1985	Sukomoro I
8.	Karya Bahagia	Sutiyo	Putren	Putren	L	139	78.000	1983	Sukomoro I
9.	Sugih Mukti	M. Roffi'i	Sugihan	Putren	L	65	39.000	1981	Sukomoro I
10.	Budi Luhur	Prawito	Bulu	Putren	L	100	55.000	1991	Sukomoro I
11.	Putra Maju	Wahyu Eko	Ngrandu	Putren	L	187	101.000	1980	Sukomoro I
12.	Satya Karya	Kuswantoro	Sekar Putih	Putren	P	23	19.000	1999	Sukomoro I
13.	Mardi Rahayu	Suwarno	Sukomoro	Sukomoro	L	79	22.500	1982	Sukomoro II
14.	Tabi Mulyo	Sanimio	Sukomoro	Sukomoro	L	45	27.500	1982	Sukomoro II
15.	Tani Subur	Putut Purwanto	Sukomoro	Sukomoro	L	40	26.000	1982	Sukomoro II
16.	Sumber Rejeki I	Mardi	Sukomoro	Sukomoro	L	48	26.000	1982	Sukomoro II
17.	Sumber Rejeki II	Sunarto	Sukomoro	Sukomoro	L	41	28.000	2000	Sukomoro II
18.	Mitro Tani	Darto	Ngrami	Ngrami	M	93	135.000	1984	Sukomoro II
19.	Samiaji	Satimin	Pengkol	Ngrami	M	77	82.250	1984	Sukomoro II
20.	Tani Subur	Daman	Kedungrejo	Ngrami	L	90	52.500	1984	Sukomoro II
21.	Maju tentrem	Damianto	Mlaten	Ngrami	L	105	47.500	1984	Sukomoro II

22.	Sumber Urip	Muslipin	Balongdringo	Ngrami	L	65	39.000	1984	Sukomoro II
23.	Sumber Rejeki	Akadono	Santren	Kapas	L	71	60.000	2000	Sukomoro III
24.	Randu Agung	Suparmin	Koripan	Kapas	L	68	30.500	1982	Sukomoro III
25.	Mardi Santoso	Saniman	Jatirejo	Kapas	L	47	34.240	1982	Sukomoro III
26.	Mardi Mulyo	Suparlan	Karangrejo	Kapas	L	59	45.000	2000	Sukomoro III
27.	Sumber Pangan	Wahyu Pri	Sumengko	Sumengko	L	221	151.695	1983	Sukomoro III
28.	Suko Makmur	Katimin	Ganggang	Sumengko	M	151	102.325	1983	Sukomoro III
29.	Subur Makmur	Woniran	Plosorejo	Sumengko	L	46	54.500	1983	Sukomoro III
30.	Margo Rukun I	Parlan	Ngrowo	Sumengko	L	43	30.750	1983	Sukomoro III
31.	Margo Rukun II	Masdi	Nglegok	Sumengko	L	72	35.210	1983	Sukomoro III
32.	Margo Rukun III	Tono	Gempolan	Sumengko	L	51	9.260	1995	Sukomoro III
33.	Rukun Tani I	Kasan Sampiko	Bulak jeruk	Blitaran	L	44	37.210	1983	Sukomoro III
34.	Rukun Tani II	Ismanto	Blitaran	Blitaran	L	35	25.000	1983	Sukomoro III
35.	Mlati Rahayu	Sumidi	Mlaten	Blitaran	L	56	28.000	1982	Sukomoro III
36.	Sambung Rejeki	Suyanto	Sembung	Blitaran	L	36	21.250	1982	Sukomoro III
37.	Barokah	Tanoo	Kedungsuko	Kedungsuko	L	65	62.000	1999	Sukomoro IV
38.	Cahyo Martari	Samsul Hadi	Kedungsuko	Kedungsuko	L	43	33.280	1984	Sukomoro IV
39.	Sentiko Joyo	Sumijo	Kencong	Kencong	M	82	50.600	1984	Sukomoro IV
40.	Joso Mulyo	Sumarlan	Gamblek	Gamblek	M	40	28.500	1984	Sukomoro IV
41.	Margo Santoso	M. Iksan	Nglundo	Nglundo	M	111	91.000	1997	Sukomoro IV
42.	Tai Murni	Waridi	Turi	Turi	M	40	39.000	1997	Sukomoro IV
43.	Sri Agung	Damin	Jo Patran	Jo Patran	L	100	66.000	1984	Sukomoro IV
44.	Karya Tani	Sukotjo	Bungur	Bungur	M	60	59.000	1984	Sukomoro IV
45.	Rukun Makmur	Mujanto	Jali	Jali	L	40	27.500	1984	Sukomoro IV
46.	Gemi Makmur	Nyono A.	Kajang	Kajang	M	68	70.000	1984	Sukomoro IV
47.	Suko Makmur	Jaswadi	Karangasem	Karangasem	M	45	45.500	1984	Sukomoro IV
48.	Sempurna	Sudjiono	Bagorwetan	Bagorwetan	M	75	65.000	1984	Sukomoro V
49.	Gotong royong	Mukhayat	Bagorwetan	Bagorwetan	P	61	34.000	1986	Sukomoro V

50.	Arum	Siti rohmah	Bagorwetan	Bagorwetan	P	34	10.000	2009	Sukomoro V
51.	Karya mukti	Asmijah	Bagorwetan	Bagorwetan	P	50	92.000	1993	Sukomoro V
52.	Jogo makmur	Sabin	Bagorwetan	Bagorwetan	U	36	75.000	1986	Sukomoro V
53.	Sumber rejeki	A'an M	Bagorwetan	Bagorwetan	P	20	25.000	2005	Sukomoro V

#### Lampiran 4

#### FOTO OBSERVASI



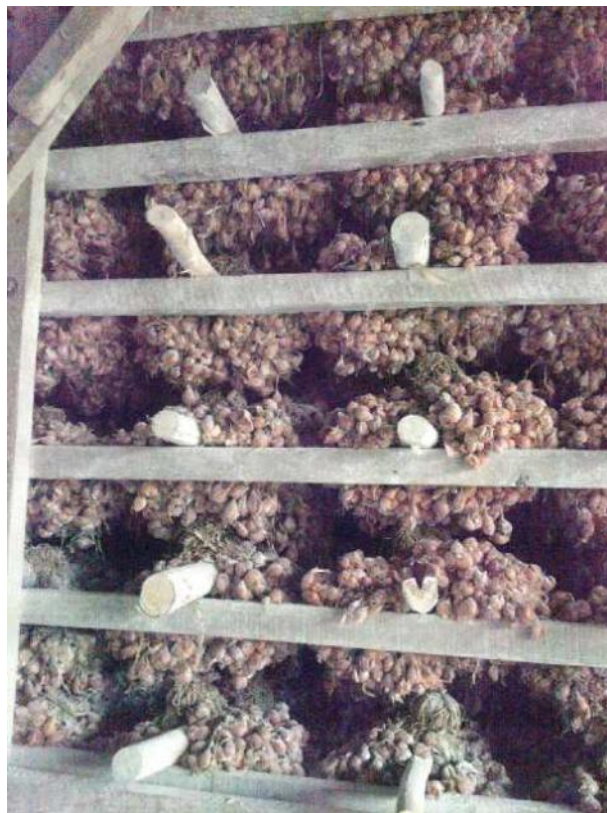
Lahan bawang merah Kecamatan Sukomoro



Gudang penyimpanan bawnag merah



Pasar bawang merah Sukomoro



Penyimpanan bawang merah sebagai bibit